

087

BAGIAN
ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019

(AUDITED)

20

19



— ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA —

BAGIAN ANGGARAN 087



LAPORAN KEUANGAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(AUDITED)

Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada ANRI. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Jakarta, April 2020

Sekretaris Utama,



u

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	53
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	78
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	112
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	130
F. Pengungkapan Penting Lainnya	134
VI. Lampiran	
i. Laporan Keuangan Utama	
ii. Laporan Keuangan Tambahan	
iii. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN	
iv. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
v. Telaah Laporan Keuangan	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 (Audited)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan merupakan penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, April 2020
Inspektur,

Syaifuddin
NIP. 19643112 199303 1 001

u



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 (*Audited*) Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020

Plt. Kepala,



4

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (netto) sebesar Rp13.802.999.892,00 atau mencapai 113,53 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp12.157.936.000,00

Realisasi Belanja Negara (bruto) pada TA 2019 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp310.768.878.093,00 atau mencapai 97,70 persen dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.379.244.835,00, sehingga Realisasi Belanja Negara (netto) sebesar Rp309.389.633.258,00 atau mencapai 97,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp318.082.964.000,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019			TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Real. thd Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	12.157.936.000,00	13.802.999.892,00	113,53%	11.663.284.224,00
Belanja Negara	318.082.964.000,00	309.389.633.258,00	97,27%	189.857.701.021,00

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

AKUN	PAGU	REALISASI BRUTO		PENGEMBALIAN BELANJA (Rp)	REALISASI NETTO	
		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
51	100.299.579.000,00	100.096.423.584,00	99,80	3.558.486,00	100.092.865.098,00	99,79
52	112.176.482.000,00	108.954.972.845,00	97,13	1.019.000.782,00	107.935.972.063,00	96,22
53	105.606.903.000,00	101.717.481.664,00	96,32	356.685.567,00	101.360.796.097,00	95,98
JUMLAH	318.082.964.000,00	310.768.878.093,00	97,70	1.379.244.835,00	309.389.633.258,00	97,27

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.246.484.378.838,00 yang terdiri dari: Aset Lancar (netto) sebesar Rp1.807.676.408,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.238.691.478.781,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp5.985.223.649,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp784.578.417,00 dan Rp1.245.699.800.421,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	(%)
Aset				
Aset Lancar	1.807.676.408,00	2.268.275.397,00	(460.598.989,00)	(20,31)
Aset Tetap	1.238.691.478.781,00	466.871.545.072,00	771.819.933.709,00	165,32
Aset Lainnya	5.985.223.649,00	2.592.934.542,00	3.392.289.107,00	130,83
Jumlah Aset	1.246.484.378.838,00	471.732.755.011,00	774.751.623.827,00	164,24
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	784.578.417,00	2.458.992.441,00	(1.674.414.024,00)	(68,09)
Jumlah Kewajiban	784.578.417,00	2.458.992.441,00	(1.674.414.024,00)	(68,09)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana	1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00	776.426.037.851,00	165,45
Jumlah Ekuitas Dana	1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00	776.426.037.851,00	165,45
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.246.484.378.838,00	471.732.755.011,00	774.751.623.827,00	164,24

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.366.513.594,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp243.141.558.641,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp229.775.045.047,00, Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp366.398.781,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp229.408.646.266,00.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Operasional	13.366.513.594,00	11.385.593.550,00	1.980.920.044,00	17,40
Beban Operasional	243.141.558.641,00	195.424.680.354,00	47.716.878.287,00	24,42
Surplus/defisit dari operasi	(229.775.045.047,00)	(184.039.086.804,00)	(45.735.958.243,00)	24,85
Kegiatan Non Operasional	366.398.781,00	(24.359.919.114,00)	24.726.317.895,00	(101,50)
Pos-pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/defisit dari non operasi	366.398.781,00	(24.359.919.114,00)	24.726.317.895,00	(101,50)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(229.408.646.266,00)	(208.399.005.918,00)	(21.009.640.348,00)	10,08

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp469.273.762.570,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp229.408.646.266,00 kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00; Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp710.248.050.751,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp295.586.633.366,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.245.699.800.421,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Ekuitas Awal	469.273.762.570,00	444.260.237.964,00	25.013.524.606,00	5,63
Surplus / Defisit-LO	(229.408.646.266,00)	(208.399.005.918,00)	(21.009.640.348,00)	10,08
Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	710.248.050.751,00	30.600.039.727,00	679.648.011.024,00	2221,07
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	25.519.398.478,00	0,00	25.519.398.478,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	724.611.109.018,00	0,00	724.611.109.018,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(39.898.698.245,00)	30.600.039.727,00	(70.498.737.972,00)	(230,39)
Lain-lain	16.241.500,00	0,00	16.241.500,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	295.586.633.366,00	202.812.490.797,00	92.774.142.569,00	45,74
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	776.426.037.851,00	25.013.524.606,00	751.412.513.245,00	3004,02
Ekuitas Akhir	1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00	776.426.037.851,00	165,45

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2019		Thd Angg (%)	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.157.936.000,00	13.802.999.892,00	113,53	11.663.284.224,00
JUMLAH PENDAPATAN		12.157.936.000,00	13.802.999.892,00	113,53	11.663.284.224,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	100.299.579.000,00	100.092.865.098,00	99,79	84.018.523.695,00
Belanja Barang	B.4	112.176.482.000,00	107.935.972.063,00	96,22	83.934.300.921,00
Belanja Modal	B.5	105.606.903.000,00	101.360.796.097,00	95,98	21.904.876.405,00
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		318.082.964.000,00	309.389.633.258,00	97,27	189.857.701.021,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	2.720.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.5	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.8	0,00	0,00
Persediaan	C.9	1.804.956.408,00	2.268.275.397,00
Jumlah Aset Lancar		1.807.676.408,00	2.268.275.397,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.10	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.11	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	C.12	802.566.806.600,00	216.312.132.396,00
Peralatan dan Mesin	C.13	221.057.763.568,00	196.135.354.724,00
Gedung dan Bangunan	C.14	364.584.089.636,00	232.559.835.154,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.15	62.881.974.526,00	11.741.372.797,00
Aset Tetap Lainnya	C.16	26.865.394.160,00	15.627.955.878,00
Konstruksi dalam pengerjaan	C.17	0,00	28.583.355.350,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	(239.264.549.709,00)	(234.088.461.227,00)
Jumlah Aset Tetap		1.238.691.478.781,00	466.871.545.072,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	15.970.656.383,00	11.520.424.655,00
Aset Lain-Lain	C.20	5.719.311.911,00	7.254.929.769,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.21	(15.704.744.645,00)	(16.182.419.882,00)
Jumlah Aset Lainnya		5.985.223.649,00	2.592.934.542,00
JUMLAH ASET		1.246.484.378.838,00	471.732.755.011,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	781.858.417,00	2.458.992.441,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.23	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.24	2.720.000,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		784.578.417,00	2.458.992.441,00
JUMLAH KEWAJIBAN		784.578.417,00	2.458.992.441,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00
JUMLAH EKUITAS		1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.246.484.378.838,00	471.732.755.011,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	13.366.513.594,00	11.385.593.550,00
JUMLAH PENDAPATAN		13.366.513.594,00	11.385.593.550,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	98.235.109.047,00	85.876.547.475,00
Beban Persediaan	D.3	5.210.490.065,00	2.989.890.272,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	48.446.714.781,00	40.802.730.838,00
Beban Pemeliharaan	D.5	9.110.528.492,00	8.260.737.266,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	42.140.628.136,00	28.091.128.769,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	4.334.256.173,00	2.629.172.965,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	35.663.831.947,00	26.774.472.769,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		243.141.558.641,00	195.424.680.354,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(229.775.045.047,00)	(184.039.086.804,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1	(16.369.904,00)	(18.894.174,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.1	94.999.999,00	8.000.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.2	111.369.903,00	26.894.174,00
Surplus/(Defisit) Pelepasan Keg. Non Operasional Lainnya	D.11.2	382.768.685,00	(24.341.024.940,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.2.1	412.360.234,00	276.345.764,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.2.2	29.591.549,00	24.617.370.704,00
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	366.398.781,00	(24.359.919.114,00)
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(229.408.646.266,00)	(208.399.005.918,00)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(229.408.646.266,00)	(208.399.005.918,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	469.273.762.570,00	444.260.237.964,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(229.408.646.266,00)	(208.399.005.918,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	0,00
	E.4	710.248.050.751,00	30.600.039.727,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.2	25.519.398.478,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	724.611.109.018,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	(39.898.698.245,00)	30.600.039.727,00
Koreksi Lain-lain	E.4.5	16.241.500,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	295.586.633.366,00	202.812.490.797,00
	E.6	776.426.037.851,00	25.013.524.606,00
EKUITAS AKHIR	E.7	1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Arsip Nasional Republik Indonesia

Dasar Hukum

Sejarah Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia

Entitas dan

Landarchief (1892- 1942)

Rencana

Strategis

Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara *de facto* sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Landarchief*. Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan *Landarchivaris* yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun *Landarchivaris* pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1922 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat *Landarchivaris* yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, *Lansarchief* mendapat tugas khusus, yaitu: ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Arschief Ordonantie* yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain :

1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah;
2. Batas arsip baru adalah 40 tahun;

3. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada *Algemeen Landarchief* di Batavia (Jakarta).

Kobunsjokan (1942-1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama *Landarchief*, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah *Kobunsjokan* yang ditempatkan dibawah *Bunkyojoku*. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai *Landarchief* pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi *Landarchief* sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan.

Arsip Negeri (1945-1947)

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak dimungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (*Landarchief*) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (*Landarchief*) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

Landsarchief (1947-1949)

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil

menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi *Landsarchief* kembali. Sebagai pimpinan *Landsarchief* adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia.

Arsip Negara (1950-1959)

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun 1945-1947, *Landsarchief* ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan *Landsarchief* oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959.

Arsip Nasional (1959-1967)

Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K (1959-1961)

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Negara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K Nomor 69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962)

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus (1963-1964)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 188 Tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1964-1966)

Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Di bawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas

untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961.

Arsip Nasional dibawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-Lembaga Politik (1966-1967)

Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No. 08/WPM/BLLP/KPT/1966, Arsip Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RI bidang Lembaga-lembaga Politik. Namun secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.

Arsip Nasional RI (1967- sekarang)

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara anggaran pembelanjannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS Nomor A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI;
2. Mengajukan usulan perubahan Perpres Nomor 19/1961 menjadi Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kearsipan.

Usulan-usulan tersebut hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali (1970) belum terlaksana. Oleh karena itu Dra. Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional, berjuang untuk melanjutkan cita-cita pemimpin sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, serta atas dukungan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam

memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 19 ayat (1) ANRI adalah lembaga kearsipan nasional yang wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

VISI ANRI

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional 2000-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan kearsipan

Tahun 2015-2019, yaitu: **“Arsip Sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”**

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah **“Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Dicapai pada Tahun 2025”**.

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MISI ANRI

Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 **“Arsip Sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”** ditempuh melalui 6 (enam) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip aset melalui pengembangan aplikasi *electronic records system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah

terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ANRI. Karena itu, ada 6 (enam) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi “Arsip Sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”. ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat pengelolaan arsip yang andal dapat meningkatkan pemanfaatan arsip. Selain itu, hasil *think tank*, diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai *think tank* dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan

koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2000-2025 yaitu :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut :

1. Integritas;
2. Profesional;
3. Visioner;
4. Sinergi;
5. Akuntabel.

TUJUAN ANRI

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional (T1);
2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional (T2);
3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional (T3);

4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional (T4).

Keempat tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

STRATEGI PEMBANGUNAN KEARSIPAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, disusun strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pencapaian Tujuan 1 Sasaran 1 (T1S1)

Untuk mencapai T1S1 yaitu terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;

- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/ kota, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif serta peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang disupervisi;
- c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa;
- d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM kearsipan;
- e) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah (a) meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 2 (T2S2)

Untuk mencapai T2S2 yaitu terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- b) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari

seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;

- c) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya *server storage* arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai guna arsip yang terkandung di dalamnya;
- d) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas layanan kearsipan.

3. Strategi Pencapaian Tujuan 3 Sasaran 3 (T3S3)

Untuk mencapai T3S3 yaitu terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;

- c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
- d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;
- e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;
- f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

4. Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 4 (T4S4)

Untuk mencapai T4S4 mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
- c) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;
- d) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,

organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;

- e) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
- f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;
- g) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan secara terus menerus pada instansi pemerintah dan swasta;
- h) Meningkatkan kualitas Pusat Jasa Kearsipan dalam membenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta;
- i) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai T4S4 yaitu terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengawasan internal terutama dalam rewiu perencanaan, pengelolaan anggaran, dan BMN;
2. Peningkatan pemahaman unit kerja dalam pengelolaan anggaran.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI.

Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.

5. Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 5 (T4S5)

Untuk mencapai T4S5 yaitu terwujudnya manajemen internal yang akuntabel, ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a) Peningkatan pemahaman unit kerja tentang SAKIP;
- b) Peningkatan kemampuan unit kerja tentang penyusunan dokumen

perencanaan dan LAKIP;

c) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI. Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ANRI. Sasaran program ini adalah meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

KERANGKA REGULASI

Di sini peran ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota maupun di unit kearsipan kementerian/ lembaga serta melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/ lembaga. Namun pembinaan kearsipan masih kurang efektif, karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan

arsip. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan. Masih terdapat ketidakselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 145 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- f. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Pembentukan kerangka regulasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan

sumber daya manusia kearsipan.

2. Terwujudnya perlindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria tanggung jawab; dan strategi perlindungan dan penyelamatan arsip.
3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektifitas NSPK sistem kearsipan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD serta semua pihak terkait.
4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

KERANGKA KELEMBAGAAN

a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Organisasi dan Tata Kerja

ANRI telah mengalami perubahan dua kali dan terakhir dicabut dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum mendapat perhatian yang proposional dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang belum mempunyai unit kearsipan.

b. Ketatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh, ANRI mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;

3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
 - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Sedangkan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- c. Pelaksanaan pengolahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- d. Pelaksanaan preservasi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- e. Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perencanaan program dan anggaran serta pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat. Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu :

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI. Sekretariat Utama terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Biro Umum.
2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Direktorat Kearsipan Pusat;
 - b. Direktorat Kearsipan Daerah I;
 - c. Direktorat Kearsipan Daerah II;
 - d. Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi.
3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional. Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas :
 - a. Direktorat Akuisisi;
 - b. Direktorat Pengolahan;
 - c. Direktorat Preservasi;
 - d. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan.
4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari :
 - a. Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - b. Pusat Data dan Informasi;
 - c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Selain itu terdapat empat unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, Inspektorat, dan Pusat Akreditasi Kearsipan dengan tugas sebagai berikut :

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan;
2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan;
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI;
4. Pusat Akreditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akreditasi kearsipan.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan ANRI posisi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



• **Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia**
Dr. M. Taufik, M.Si



• **Sekretaris Utama**
Drs. Sumrahyadi, MIMS



• **Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan**
Dr. Andi Kasman M, S.E., M.M.



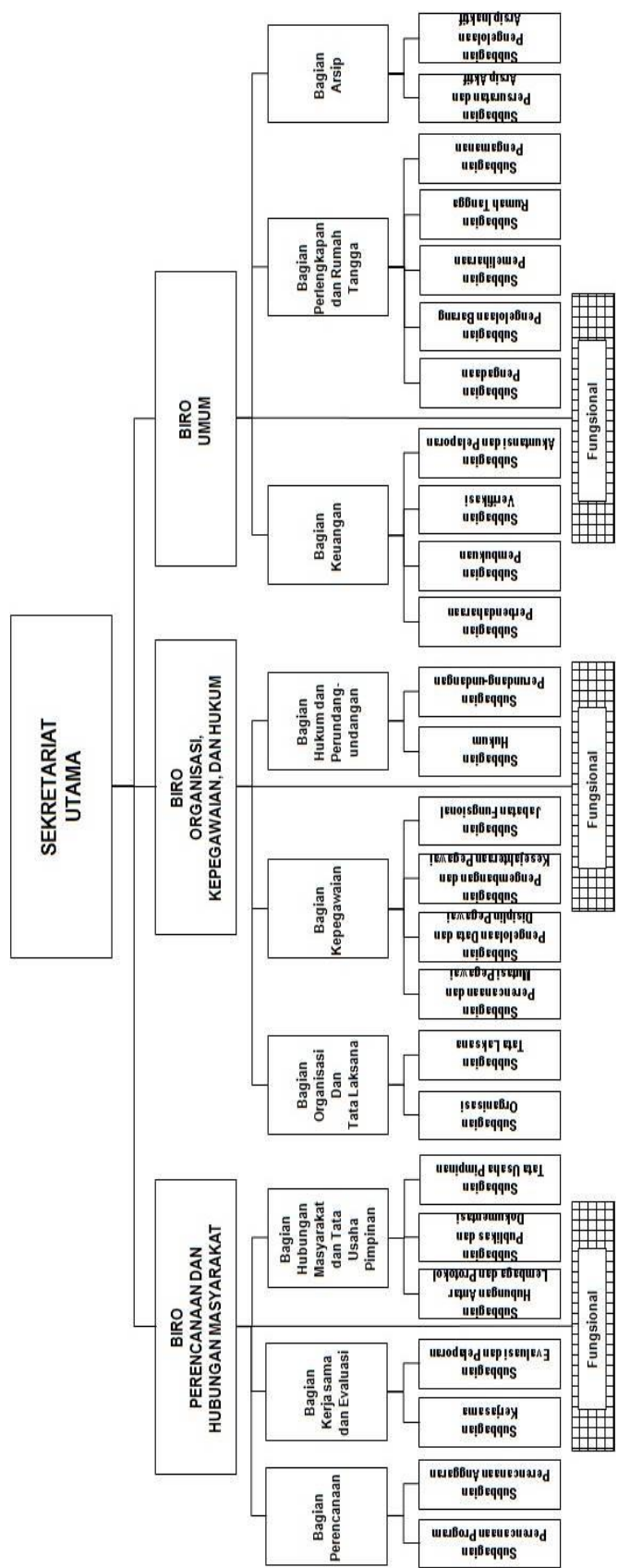
• **Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK)**
Drs. Imam Gunarto, M.Hum



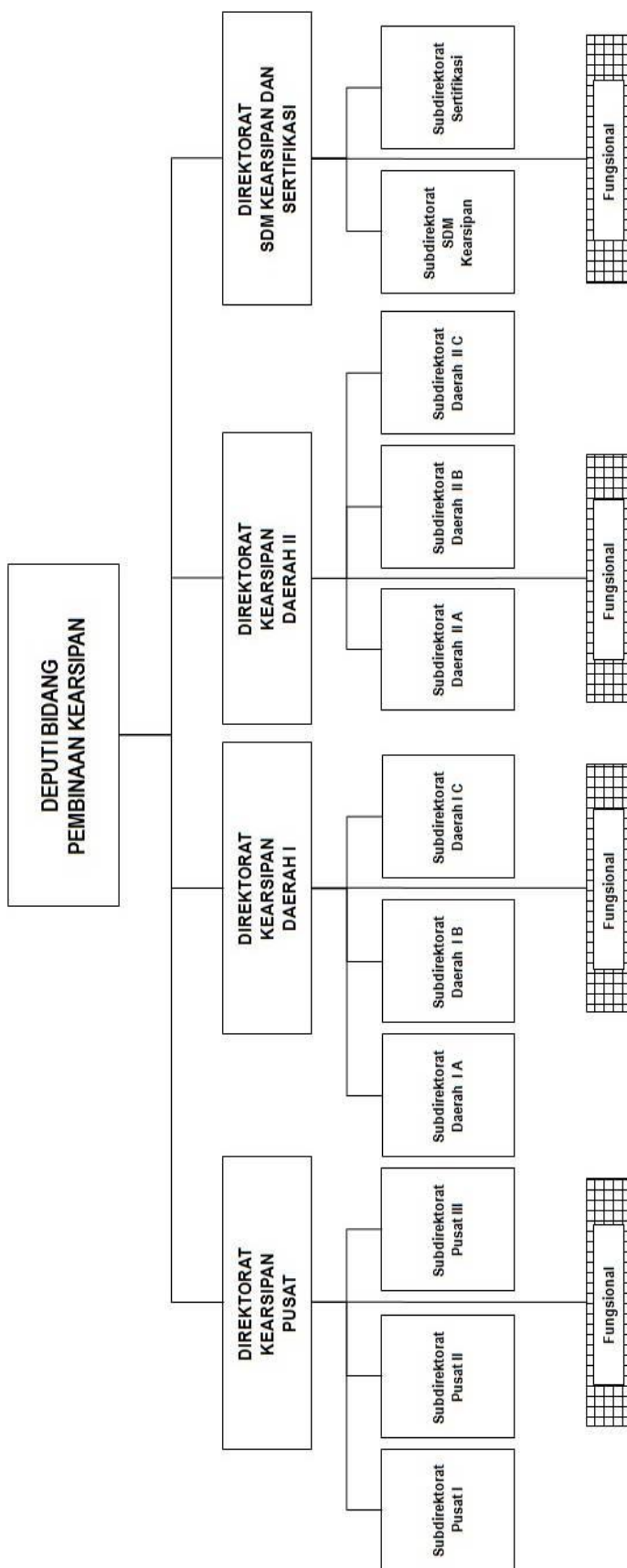
• **Deputi Bidang Konservasi Arsip**
Dr. M. Taufik, M.Si

Sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia bahwa struktur organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai berikut :

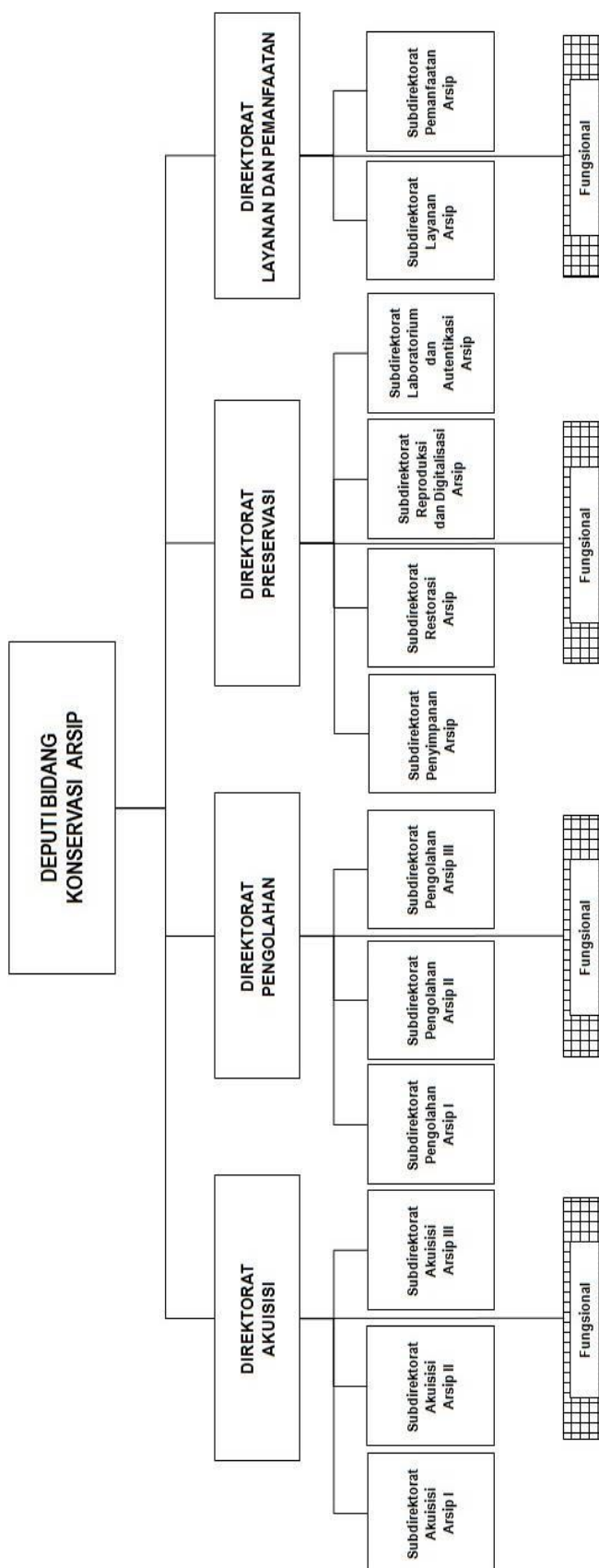
A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



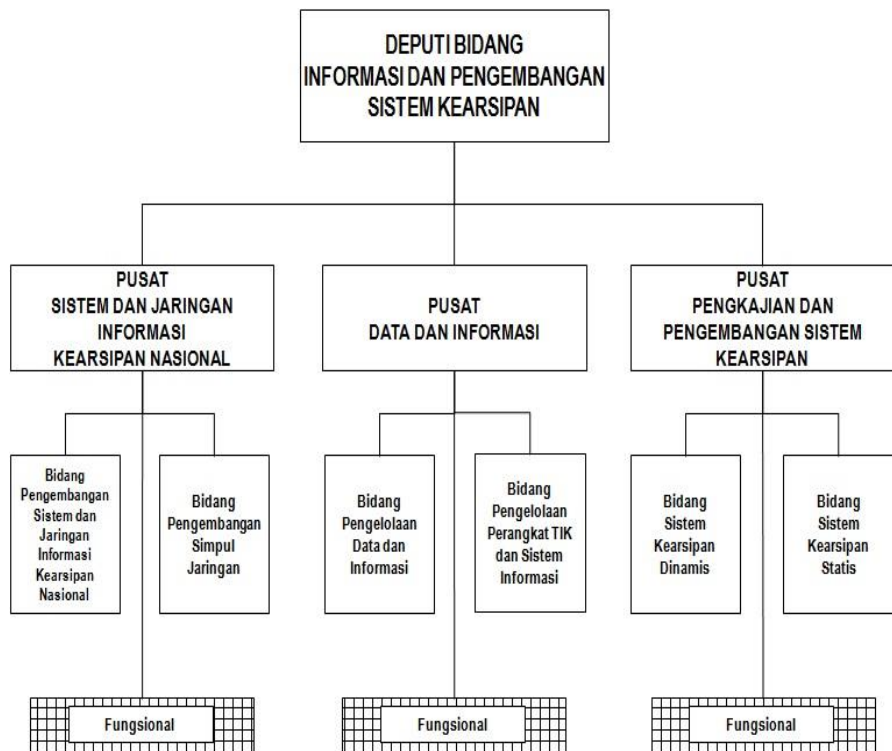
B. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN



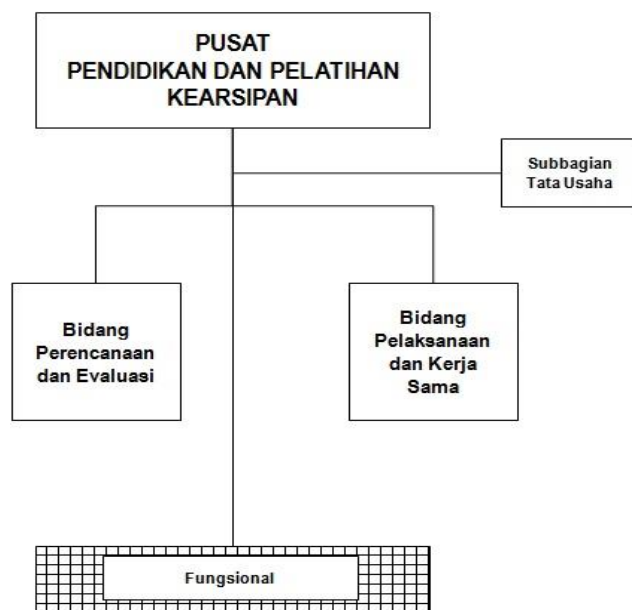
C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP



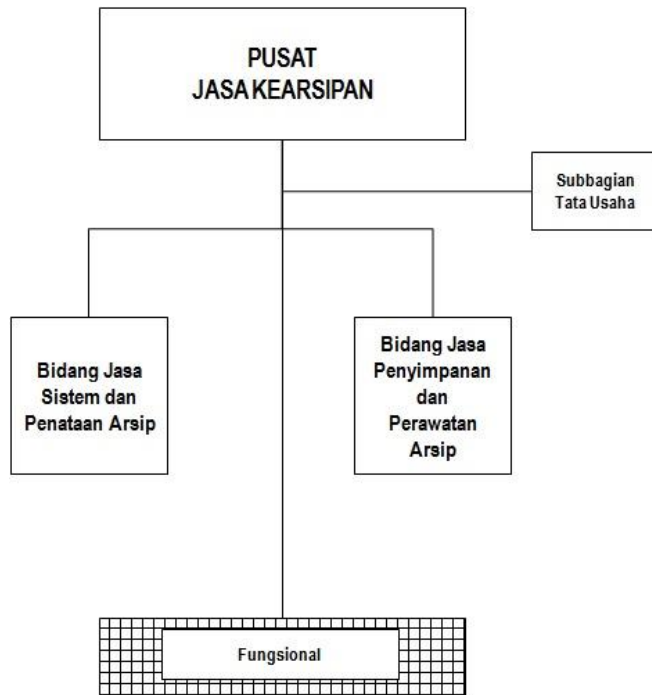
D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN



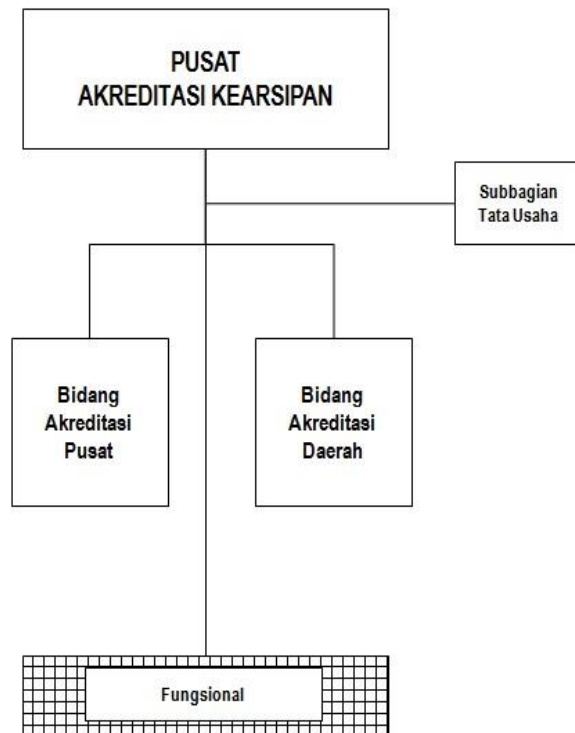
E. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN



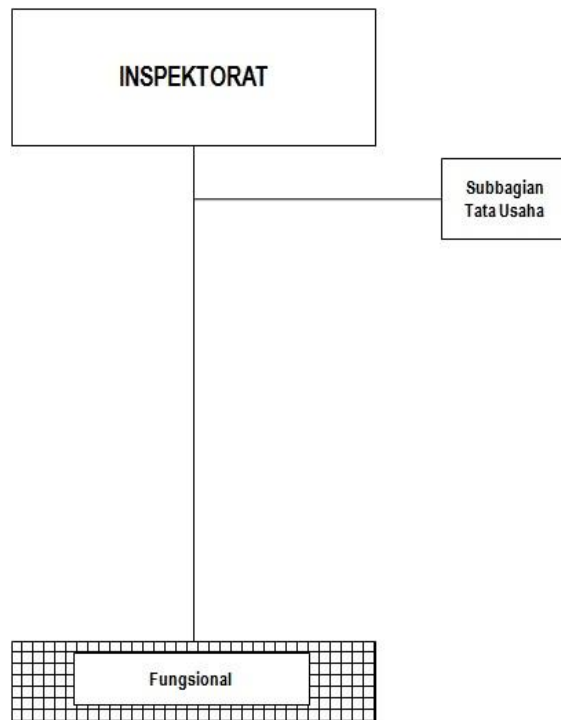
F. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT JASA KEARSIPAN



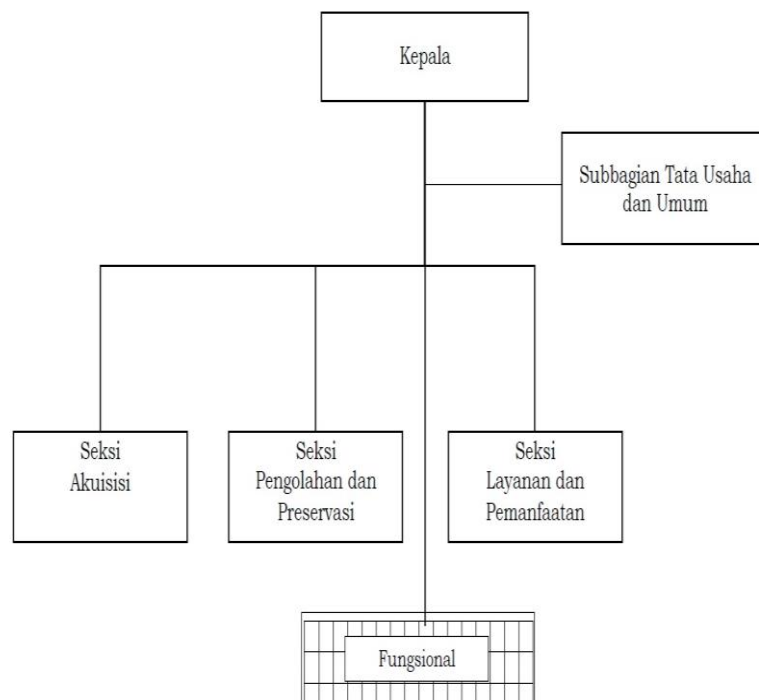
G. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN



H. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



I. STRUKTUR ORGANISASI BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI ACEH



Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI posisi per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 645 orang. Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan sebagai berikut :

Pegawai ANRI Menurut Penempatan

NO	PENEMPATAN	JUMLAH	%
1	PNS ANRI Pusat	595	92,25
2	PNS ANRI Pusdiklat Bogor	25	3,8
3	PNS ANRI Gajah Mada	1	0,16
4	Balai Arsip Statis Tsunami Aceh	16	2,48
5	PNS yang dipekerjakan diluar ANRI	8	1,24
TOTAL		645	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1	Jabatan Struktural	102	15,81
2	Jabatan Fungsional Tertentu	313	48,53
3	Jabatan Fungsional Umum	148	22,95
4	CPNS	82	12,71
TOTAL		645	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki-laki	323	50,08
2	Perempuan	322	49,92
TOTAL		645	100,00

Pegawai ANRI Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Doktoral (S3)	7	1,08
2	Pasca Sarjana (S2)	129	20,00
3	Sarjana (S-1)	318	49,30
4	Diploma IV	23	3,57
5	Diploma III	113	17,52
7	SLTA	55	8,53
TOTAL		645	100,00

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun jumlah satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dilingkup ANRI adalah 37 (tiga puluh tujuh) satker yang terdiri atas 3 (tiga) satker Kantor Pusat (KP), 1 (satu) satker Kantor Daerah (KD) dan 33 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi (DK).

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

Kode BA	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
087	01	Arsip Nasional RI	3	1	33	0	37
Jumlah			3	1	33	0	37

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Arsip Nasional Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia berupa penerimaan yang berasal dari :

- a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang bersifat umum meliputi :
 - 1) Penerimaan Kembali Belanja yang berasal dari pengembalian belanja (pegawai, barang dan modal) dari tahun anggaran yang lalu;
 - 2) Jasa Giro yang berasal dari jasa lembaga keuangan (perbankan) pada tahun berjalan;
 - 3) Hasil penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak maupun dihapuskan dengan cara dijual melalui lelang;
 - 4) Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (TP/TGR) yang berasal dari kewajiban oleh Bendahara maupun pegawai yang ditetapkan berdasarkan SK Penetapan.
- b) Penerimaan dari kegiatan pelayanan ANRI yang bersifat Fungsional.
 - 1) Pusat Jasa Kearsipan menyelenggarakan pemberian jasa berupa :
 - 1.1. Jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi

menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system,encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media;

1.2. Jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan meliputi penataan kearsipan, layanan penataan *record centre* pusat dan pembuatan pedoman manual kearsipan untuk organisasi atau lembaga;

1.3. Jasa Penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di *Record* Arsip.

2) Direktorat Layanan Pemanfaatan memberikan layanan jasa berupa :

2.1 Jasa penggandaan dan alih media meliputi fotokopi arsip, fotokopi referensi/buku, foto, *print out* mikrofilm ukuran A4, film, *scanning* arsip, alih media arsip kertas ke mikrofilm, reproduksi rekaman suara;

2.2 Naskah Sumber Arsip dan sumber-sumber Sejarah meliputi penerbitan naskah sumber periode sebelum Republik Indonesia (VOC-Belanda), Penerbitan Naskah Sumber Periode Republik Indonesia (1945-sekarang), bentuk elektronik;

2.3 Jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan berupa penelusuran arsip dan penggandaan arsip.

3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang memberikan layanan jasa berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan meliputi diklat fungsional arsiparis dan diklat teknis kearsipan.

4) Biro Umum yang menyediakan layanan berupa jasa sewa gedung Gajah Mada.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan

dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari :

2.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan yang diperoleh ANRI berasal dari kelompok PNBP Lainnya antara lain :

- a) Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN (pemanfaatan) dan Iuran Badan (4251). Tahun Anggaran 2019 ANRI diperoleh pendapatan yang berasal dari :
 - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119) yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi pada Direktorat Layanan dan Pemanfaatan;
 - Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) yang diperoleh dari persewaan gedung Arsip Gajah Mada yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi Biro Umum dan persewaan gedung dan kamar Pusdiklat Kearsipan Bogor.
- b) Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254), pendapatan ini berasal dari satker Pusdiklat Kearsipan ANRI Bogor yang menjalankan tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) merupakan jasa tenaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan kepada pengguna/konsumen.
- c) Pendapatan Jasa Lainnya (4256) dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi, ANRI merupakan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL (425692) yang diberikan oleh Pusat Jasa Kearsipan kepada pengguna/konsumen berupa jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system, encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media, jasa penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di *Record Arsip* dan Direktorat Layanan Pemanfaatan dan Layanan Kearsipan berupa Jasa Pengandaan, Fotokopi dan Transkripsi.

d) Pendapatan Denda (4258) dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) merupakan pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah yang biasa (umum) ada pada semua Kementerian/Lembaga.

2.2 Pendapatan Non Operasional

- a) Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang Berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) merupakan pendapatan hasil penjualan lelang Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- b) Pendapatan Lain-Lain (4259) yang berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (425911), penerimaan kembali belanja barang TAYL (425912) dan penerimaan kembali belanja modal TAYL (425913).

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja yakni belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53). Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja meliputi :
 - a) Beban Operasional yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi serta beban penyisihan piutang tak tertagih;
 - b) Beban Non Operasional meliputi beban pelepasan aset non lancar dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
- Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

5.1 Aset Lancar

- a. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- b. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;

e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

5.2 Aset Tetap

- a. Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta

Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilaian Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- e. Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- f. Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 Hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 (*Unaudited*) sesuai mekanisme yang berlaku.
- g. Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan

keuangan.

- h. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya;
- i. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

5.3 Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat;
- e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

5.4 Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- b. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

5.5 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- b. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- c. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- d. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai

buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;

- e. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tetap tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat disajikan sebagai berikut :

Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan

Rp13.802.999.892,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.802.999.892,00 atau mencapai 113,53 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.157.936.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	368.050.000,00	1.789.257.999,00	486,15
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	1.596.446.000,00	1.868.797.000,00	117,06
Pendapatan Jasa Lainnya	10.193.440.000,00	9.534.055.200,00	93,53
Pendapatan Denda	0,00	269.307.604,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	341.582.089,00	0,00
Jumlah	12.157.936.000,00	13.802.999.892,00	113,53

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 untuk Pendapatan Jasa belum ada realisasi dari estimasinya. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan mencapai 486,15 persen dari realisasi. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi tidak tercatat estimasi sehingga belum terukur terhadap realisasi pendapatannya. Pendapatan Jasa Lainnya mencapai 93,53 persen dari estimasinya. Pendapatan Denda belum tercatat estimasi sehingga belum terukur terhadap realisasi pendapatannya. Pendapatan Lain-lain belum tercatat estimasi sehingga belum terukur terhadap realisasi pendapatannya. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan terdapat kenaikan sebesar 18,35 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN		NAIK/TURUN	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan	1.789.257.999,00	1.786.884.000,00	2.373.999	0,13
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.868.797.000,00	1.881.372.800,00	(12.575.800)	(0,67)
Pendapatan Jasa Lainnya	9.534.055.200,00	7.661.138.350,00	1.872.916.850	24,45
Pendapatan Denda	269.307.604,00	64.198.400,00	205.109.204	319,49
Pendapatan Lain-lain	341.582.089,00	269.690.674,00	71.891.415	26,66
Jumlah	13.802.999.892,00	11.663.284.224,00	2.139.715.668	18,35

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	15.615.000,00	14.380.000,00	1.235.000,00	8,59
ANRI Jakarta	15.615.000,00	14.380.000,00	1.235.000,00	8,59
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	94.999.999,00	8.000.000,00	86.999.999,00	1.087,50
ANRI Jakarta	94.999.999,00	8.000.000,00	86.999.999,00	1.087,50
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan	1.412.243.000,00	1.406.904.000,00	5.339.000,00	0,38
ANRI Jakarta	1.412.243.000,00	1.406.904.000,00	5.339.000,00	0,38
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	266.400.000,00	357.600.000,00	-91.200.000,00	-25,50
Pusdiklat Kearsipan Bogor	266.400.000,00	357.600.000,00	-91.200.000,00	-25,50
Jumlah	1.789.257.999,00	1.786.884.000,00	2.373.999,00	0,13

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan), Pendapatan dari Penjualan serta pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.789.257.999,00 atau 486,15 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp368.050.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp2.373.999,00 atau 0,13 persen. Adapun rincian realisasi tersebut sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi non Litbang Lainnya sebesar Rp1.235.000,00 atau 8,59 persen yang berasal dari Penjualan hasil penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum RI (VOC-Belanda) dan Periode RI (1945-Sekarang);
2. Terdapat kenaikan realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp86.999.999,00 dibanding TA sebelumnya yang berasal dari proses lelang Barang Milik Negara ANRI Jakarta sesuai RL No. 108/29/2019 tanggal. 26-02-2019 dan RL No. 435/29/2019 tanggal. 23-07-2019 sebesar Rp94.999.999,00;
3. Kenaikan sebesar Rp5.339.000,00 atau 0,38 persen Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dibanding TA sebelumnya yang berasal dari pengguna sewa Gedung Gajah Mada;

4. Adanya penurunan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi sebesar Rp91.200.000,00 atau 25,50 persen yang berasal dari penggunaan kamar dan fasilitas diklat pada Satker Pusdiklat Kearsipan Bogor.

B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi berasal dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor adalah sebesar RP1.868.797.000,00 atau 117,06 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp1.596.446.000,00. Bila dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp1.881.372.800,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp12.575.800,00 atau 0,67 persen. Hal ini disebabkan menurunnya pelaksanaan diklat PNPB pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor.

B.1.3 Pendapatan Jasa Lainnya

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi	9.534.055.200,00	7.661.138.350,00	1.872.916.850,00	24,45
Arsip Nasional RI Jakarta	431.031.500,00	338.793.300,00	92.238.200,00	27,23
BAST Aceh	7.851.000,00	153.000,00	7.698.000,00	5.031,37
Pusat Jasa Kearsipan	9.095.172.700,00	7.322.192.050,00	1.772.980.650,00	24,21
Jumlah	9.534.055.200,00	7.661.138.350,00	1.872.916.850,00	24,45

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya adalah sebesar Rp9.534.055.200,00 atau 93,53 persen dari estimasi sebesar Rp10.193.440.000,00. Bila dibandingkan dengan TA 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.872.916.850,00 atau 24,45 persen. Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari Jasa Penggandaan (*Copy* Arsip dan Buku *Antiquariat*), Reproduksi dan Transkripsi pada Kantor Pusat ANRI Jakarta dan Balai Arsip Statis Tsunami Aceh; Jasa Penyimpanan, Pemeliharaan, Perawatan, dan pembenahan Arsip serta Jasa Pembuatan Pedoman dan Pembuatan Sistem Aplikasi Kearsipan pada Pusat Jasa Kearsipan.

B.1.4 Pendapatan Denda

Uraian	Kenaikan/Penurunan			
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Denda	269.307.604,00	64.198.400,00	205.109.204,00	319,49
Penyelesaian Pekerjaan				
ANRI Jakarta	212.534.183,00	64.198.400,00	148.335.783,00	231,06
Balai Arsip Statis dan Tsunami	56.773.421,00	0,00	56.773.421,00	0,00
Jumlah	269.307.604,00	64.198.400,00	205.109.204,00	319,49

Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah adalah sebesar Rp269.307.604,00. Bila dibandingkan dengan TA 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp205.109.204,00 atau 319,49 persen. Pada TA 2019 terdapat peningkatan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah, di antaranya Pendapatan Denda yang berasal dari satker ANRI Jakarta dan satker BAST dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

1. Pendapatan Denda satker ANRI Jakarta sebesar Rp3.495.049,00 berasal dari denda atas pembayaran belanja modal termin IV pengawas pekerjaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan sesuai SPK No. PL.01.02/14.10/2019 Tanggal 18/2/2019; BAST No. PL.01.02/14.16/2019 Tanggal 10/10/2019; BAP No. PL.01.02/14.17/2019 Tanggal 23/10/2019 sesuai SPM/SP2D No. 2830/191391302072000 Tanggal 1/11/2019;
2. Pendapatan Denda satker ANRI Jakarta sebesar Rp209.039.134,00 berasal dari denda atas pembayaran belanja modal termin IV pembangunan interior gedung arsip kepresidenan sesuai SPK No. PL.01.02/15.09/2019 Tanggal 13/2/2019; BAST No. PL.01.02/15.21/2019 Tanggal 10/10/2019; BAP No. PL.01.02/15.22/2019 Tanggal 23/10/2019 sesuai SPM/SP2D No. 2829/SP2D No. 191391303050326 Tanggal 01/11/2019;
3. Pendapatan Denda satker BAST sebesar Rp56.475.787,00 berasal dari denda sesuai SPM/SP2D No. SPM/SP2D 00249/190011302020000 Tanggal 18/12/2019 yang dipotong

langsung;

4. Pendapatan Denda satker BAST sebesar Rp297.634,00 berasal dari denda sesuai SPM/SP2D No. 00247/190011302020001 Tanggal 18/12/2019.

B.1.5 Pendapatan Lain-lain

Uraian	TA		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	107.341.050,00	(107.341.050,00)	(100,00)
ANRI Jakarta	0,00	107.341.050,00	(107.341.050,00)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	140.255.542,00	156.120.724,00	(15.865.182,00)	(10,16)
ANRI Jakarta	115.963.042,00	154.410.719,00	(38.447.677,00)	(24,90)
Pusdiklat Kearsipan Bogor	0,00	710.000,00	(710.000,00)	(100,00)
Pusat Jasa Kearsipan	8.047.500,00	1.000.005,00	7.047.495,00	704,75
BAST Aceh	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	200.619.057,00	0,00	200.619.057,00	0,00
ANRI Jakarta	200.619.057,00	0,00	200.619.057,00	0,00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	611.700,00	6.228.900,00	(5.617.200,00)	(90,18)
ANRI Jakarta	611.700,00	6.228.900,00	(5.617.200,00)	(90,18)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	95.790,00	0,00	95.790,00	0,00
ANRI Jakarta	95.790,00	0,00	95.790,00	0,00
Jumlah	341.582.089,00	269.690.674,00	71.795.625,00	26,62

Realisasi Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp341.582.089,00 atau 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp71.795.625,00 atau 26,62 persen. Hal ini disebabkan adalah sebagai berikut :

- 1) Penurunan pada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dengan tidak adanya setoran atas pengembalian belanja pegawai Tahun 2018.
- 2) Penurunan pada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
Pusat Jasa Kearsipan					
1	09/04/2019	Pengembalian Honor Pengelola SAI 2018 a.n M. Imam M, Amieka H., Ali Sugeng, Kismandi, M. M. Akbar, Pati Sunjaya, Shita Rouli H., M Fahrin, dan Erma S.	E16720E3H7FNNTSO	425912	8.047.500,00
Jumlah					8.047.500,00
Balai Arsip Statis dan Tsunami					
1	15/01/2019	Pengembalian honor tim website BAST bulan Maret-November	593E30PB61M0JUPO	425912	16.245.000,00
Jumlah					16.245.000,00

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
ANRI Jakarta					
1	01/03/2019	Pengembalian kelebihan tiket perjadi an. Tony A (5 org) ke Kaltim tgl. 4-7 Sept 2018	BF8BC4SJ14E9ABJP	425912	2.679.500,00
2	01/04/2019	Pengembalian kelebihan Perjadi ke LN an. Evi Indavani tgl 10-12 Desember 2018 ke Kairo	829C36LSLUGG41C9	425912	1.827.000,00
3	01/08/2019	Pengembalian honor Tim Kajian Map Grang Design an. Sari Hasanah bln Okt 18	119BC1PN0VJ0VUE9	425912	475.000,00
4	01/08/2019	Pengembalian honor Tim Kajian Road Map Grand Design an. Sari Hasanah bln Nop sd Des 2018	C392B1PLL19GOVE9	425912	950.000,00
5	01/09/2019	Pengembalian perjalanan dinas a.n Imam Gunarto dkk (6 org) tgl 3-6 Juli 2018 ke Padang	6CEB84MP5FBM2I6P	425912	249.400,00
6	01/10/2019	Pengembalian kelebihan akomodasi perjadi Adi Gesi (2 org) ke Bogor tgl 7-8 Mei 2018	5FB0388V02JN1IV8	425912	401.855,00
7	01/10/2019	Pengembalian kelebihan perjadi Adi Gesit (2 org) ke Solo tgl 19-21 Des 2018	E329B8AA5TPVIUV8	425912	1.408.600,00
8	24/04/2018	Pengembalian honor panitia a.n Abdul Anas kegiatan rakor pembentukan simpul percontohan tgl 12-13 April 2018	31C226PSE5CNHLEP	425912	300.000,00
9	24/04/2018	Pengembalian translok a.n Tiyas Cahyani kegiatan survei implementasi E-Arsip dengan SIKD tgl 26/2/2018	FEAF682CPSKVUJO9	425912	300.000,00
10	24/04/2018	Pengembalian perjalanan dinas a.n Maya dkk (3 org) tgl 7-10 Oktober 2018 ke Jawa Timur	7DD6935QUBCBFP1P	425912	72.000,00
11	24/04/2018	Pengembalian perjalanan dinas a.n Sahraeni dkk (3 org) tgl 27-29 Maret 2018 ke Kendari	90D9E64R989RP870	425912	15.000,00
12	24/04/2018	Pengembalian perjalanan dinas a.n M. Taufik dkk (4 org) tgl 28 Juli-3 Agustus 2018 ke Serbia	BD3BC3VUGANVKJA8	425912	14.048.620,00
13	24/04/2018	Kekurangan pengembalian dan atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri	629044PDUQI9FADO	425912	981.631,00
14	24/04/2018	Pembayaran honorarium operasional satuan kerja pengelola sistem akuntansi instansi (SAI) yang tarifnya tidak sesuai dengan SBM tahun 2018	6B2F44JIMTS56UDO	425912	10.687.500,00
15	24/04/2018	Kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan Gedung Warung Buncit berupa paket penggantian kaca	70CB34L17OCTOFDO	425912	65.539.236,00
16	24/04/2018	Pengembalian kelebihan Perjadi ke Luar Negeri ke Malaysia tahun 2018	1A6A010GG9BLMMC8	425912	6.700.000,00
17	24/04/2018	Pengembalian honor Tim Pelks. Kegiatan di ANRI Th. 2018 berdasar SK KA ANRI yg melebihi Batas Maksimal	7448211HI6U33HC8	425912	4.342.500,00
18	24/04/2018	Pengembalian kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas ke Rusia TA 2018	21DA82PM45LK44GO	425912	687.200,00
19	24/04/2018	Pengembalian kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas ke Vietnam	A212B6NP192NL7GO	425912	4.298.000,00
Jumlah					115.963.042,00

- 3) Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp200.619.057,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung arsip kepresidenan di Gajah Mada. Hal ini menyebabkan kenaikan realisasi dibandingkan TA 2018;

Penerimaan atas Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL

Tahun 2019

TGL DOK	NTPN	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
3/5/2019	B1D0D8DOBI7E0URO	Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung arsip kepresidenan di Gajah Mada	200,619,057,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL			200,619,057,00

- 4) Terdapat Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp611.700,00 yang berasal dari PT. Taspen sampai dengan bulan Desember 2019 pada Satker ANRI Jakarta.

Penerimaan Pendapatan Setoran

Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

TGL DOK	NTPN	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
12/6/2019	6A55340ST8RNM6HI	Setoran Kas Negara Non KAI bulan Juni 2019	193.200,00
11/7/2019	31FEB38A9UJ5RLB2	Setoran Kas Negara Non KAI bulan Juli 2019	418.500,00
Penerimaan atas Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			611.700,00

- 5) Terdapat Pendapatan Anggaran lain-lain yang berasal dari kelebihan atas penerimaan PNBP atas jasa *Scan Notarial Archives* pada satker ANRI Jakarta sebesar Rp95.790,00.

Penerimaan atas Pendapatan Anggaran Lain-Lain Tahun 2019

TGL DOK	NTPN	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
13/08/2019	839377QLTAQ51HH3	Kelebihan Pembayaran PNBP scan notarial archives	95.790,00
Penerimaan atas Pendapatan Anggaran Lain-Lain			95.790,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja

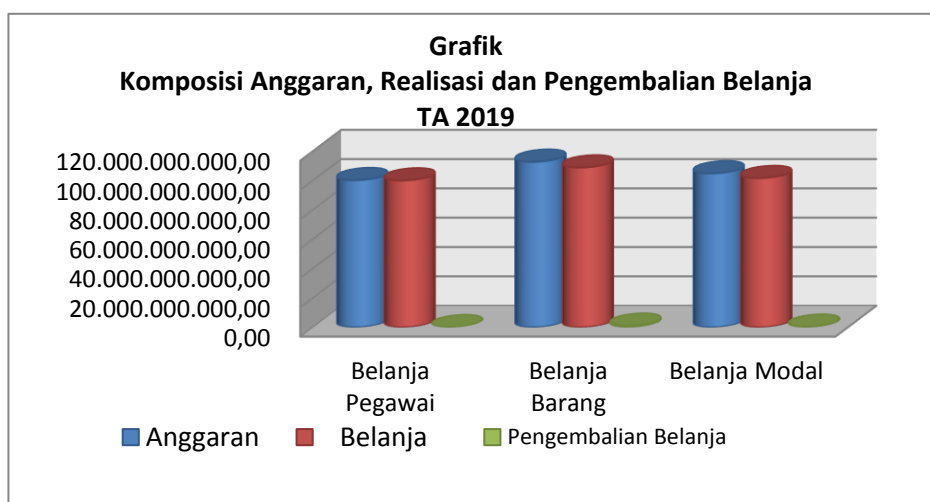
Rp309.389.633.258,00

Realisasi Belanja Negara (netto) sebesar Rp309.389.633.258,00 atau mencapai 97,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp318.082.964.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Pegawai	100.299.579.000,00	100.096.423.584,00	99,80
Belanja Barang	112.176.482.000,00	108.954.972.845,00	97,13
Belanja Modal	105.606.903.000,00	101.717.481.664,00	96,32
Total Belanja Bruto	318.082.964.000,00	310.768.878.093,00	97,70
Pengembalian Belanja	0,00	-1.379.244.835,00	0,00
Total Belanja Netto	318.082.964.000,00	309.389.633.258,00	97,27

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja TA 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 62,96 persen dibandingkan pada TA 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 19,13 persen atau Rp16.074.341.403,00;
2. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 28,60 persen atau Rp24.001.671.142,00;
3. Realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 362,73 persen

atau Rp79.455.919.692,00.

Perbandingan Realisasi Belanja (netto) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) (Rp) (%)	
Belanja Pegawai	100,092,865,098.00	84,018,523,695.00	16,074,341,403.00	19.13
Belanja Barang	107,935,972,063.00	83,934,300,921.00	24,001,671,142.00	28.60
Belanja Modal	101,360,796,097.00	21,904,876,405.00	79,455,919,692.00	362.73
Jumlah Belanja Netto	309,389,633,258.00	189,857,701,021.00	119,531,932,237.00	62.96

Belanja Pegawai

Rp100.092.865.098,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah Rp100.092.865.098,00 dari anggaran sebesar Rp100.299.579.000,00 atau 99,79 persen. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp16.074.341.403,00 atau 19,13 persen. Anggaran Belanja Pegawai hanya terdapat pada Sakter ANRI Jakarta. Rincian realisasi belanja pegawai TA 2019 dan perbandingan belanja pegawai (netto) 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.452.105.000,00	47.249.128.303,00	99,57
Belanja Lembur	113.420.000,00	113.381.000,00	99,97
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	52.734.054.000,00	52.733.914.281,00	100,00
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	100.299.579.000,00	100.096.423.584,00	99,80
Pengembalian Belanja Pegawai		(3.558.486,00)	
Jumlah Belanja Pegawai Netto	100.299.579.000,00	100.092.865.098,00	99,79

Perbandingan Belanja Pegawai (netto) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019 (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN)	
			(Rp)	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.245.569.817,00	42.562.298.306,00	4.683.271.511,00	11,00
Belanja Lembur	113.381.000,00	133.848.000,00	(20.467.000,00)	(15,29)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	52.733.914.281,00	41.322.377.389,00	11.411.536.892,00	27,62
Jumlah Belanja Pegawai Netto	100.092.865.098,00	84.018.523.695,00	16.074.341.403,00	19,13

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja gaji dan tunjangan PNS (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp47.245.569.817,00 atau 99,56 persen dari anggaran sebesar Rp47.452.105.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp4.683.271.511,00 atau 11,00 persen, hal ini dikarenakan masuknya CPNS sebanyak 86 pegawai, kenaikan gaji PNS sebesar 5 % dan adanya Gaji ke-14 atau THR.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	29.604.416.740,00	26.106.362.880,00	3.498.053.860,00	13,40
Belanja Pembulatan Gaji PNS	461.934,00	354.923,00	107.011,00	30,15
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.989.621.494,00	1.850.108.390,00	139.513.104,00	7,54
Belanja Tunj. Anak PNS	528.987.428,00	496.840.234,00	32.147.194,00	6,47
Belanja Tunj. Struktural PNS	2.210.860.000,00	2.155.580.000,00	55.280.000,00	2,56
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.850.509.000,00	2.932.502.000,00	-81.993.000,00	-2,80
Belanja Tunj. PPh PNS	333.353.627,00	279.056.878,00	54.296.749,00	19,46
Belanja Tunj. Beras PNS	1.359.613.080,00	1.289.945.040,00	69.668.040,00	5,40
Belanja Uang Makan PNS	4.248.272.000,00	3.847.526.000,00	400.746.000,00	10,42
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja	3.533.788.000,00	3.143.800.000,00	389.988.000,00	12,40
Belanja Tunj. Umum PNS	589.245.000,00	460.780.000,00	128.465.000,00	27,88
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	47.249.128.303,00	42.562.856.345,00	4.686.271.958,00	11,01
Pengembalian Belanja Pegawai	-3.558.486,00	-558.039,00	-3.000.447,00	537,68
Jumlah Belanja Pegawai Netto	47.245.569.817,00	42.562.298.306,00	4.683.271.511,00	11,00

Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (netto) Tahun 2019 sebesar Rp47.245.569.817,00 sedangkan Beban Gaji dan Tunjangan PNS (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp47.245.157.293,00 terdapat selisih Rp412.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PNS	47.245.569.817,00	47.245.157.293,00	412.524,00
Belanja/Beban Gaji Pokok PNS	29.604.416.740,00	29.604.039.640,00	377.100,00
Belanja/Beban Pembulatan Gaji PNS	461.934,00	461.934,00	0,00
Pengembalian Belanja/Beban Pembulatan	(43.486,00)	(43.486,00)	0,00
Belanja/Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.989.621.494,00	1.989.604.784,00	16.710,00
Belanja/Beban Tunj. Anak PNS	528.987.428,00	528.987.428,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. Struktural PNS	2.210.860.000,00	2.210.860.000,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. Fungsional PNS	2.850.509.000,00	2.850.509.000,00	0,00
Pengembalian Belanja/Beban Tunj.	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. PPh PNS	333.353.627,00	333.334.913,00	18.714,00
Belanja/Beban Tunj. Beras PNS	1.359.613.080,00	1.359.613.080,00	0,00
Belanja/Beban Uang Makan PNS	4.248.272.000,00	4.248.272.000,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.533.788.000,00	3.533.788.000,00	0,00
Belanja/Beban Tunjangan Umum PNS	589.245.000,00	589.245.000,00	0,00
Pengembalian Belanja/Beban Tunjangan	(3.515.000,00)	(3.515.000,00)	0,00

Selisih Belanja/Beban Pegawai sebesar Rp412.524,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal

penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS		
Beban Gaji Pokok PNS		
201901450448001	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	377.100,00
Jumlah		377.100,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS		
201901450448002	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	16.710,00
Jumlah		16.710,00
Beban PPh PNS		
201901450448003	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	18.714,00
Jumlah		18.714,00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA		412.524,00

B.3.2 Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp113.381.000,00 atau 99,97 persen dari anggaran sebesar Rp113.420.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp20.467.000,00 atau 15,29 persen. Penurunan realisasi tersebut disebabkan karena adanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan lembur pegawai.

Uraian			Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Rp	%
Belanja Uang Lembur	113.381.000,00	133.848.000,00	-20.467.000,00	-15,29
Jumlah Belanja Pegawai	113.381.000,00	133.848.000,00	-20.467.000,00	-15,29
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	113.381.000,00	133.848.000,00	-20.467.000,00	-15,29

Realisasi Anggaran Belanja Uang Lembur (netto) Tahun 2019 sebesar Rp113.381.000,00 sedangkan Beban Uang Lembur (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp113.381.000,00. Tidak terdapat selisih diantara keduanya dengan perincian sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Uang Lembur	113.381.000,00	113.381.000,00	0,00
Belanja/Beban Uang Lembur	113.381.000,00	113.381.000,00	0,00
Pengembalian Beban Pegawai (Uang Lembur)	0,00	0,00	0,00

B.3.3 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp52.733.914.281,00 atau 99,99 persen dari anggaran sebesar Rp52.734.054.000,00. Bila dibandingkan dengan 31

Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp11.411.536.892,00 atau 27,62 persen, hal ini disebabkan karena masuknya CPNS sebanyak 86 pegawai dan adanya gaji ke-14 atau THR.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	52.733.914.281,00	41.406.987.829,00	11.326.926.452,00	27,36
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	52.733.914.281,00	41.406.987.829,00	11.326.926.452,00	27,36
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	(84.610.440,00)	84.610.440,00	(100,00)
Jumlah Belanja Pegawai Netto	52.733.914.281,00	41.322.377.389,00	11.411.536.892,00	27,62

Realisasi Anggaran Belanja Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito (netto) Tahun 2019 sebesar Rp52.733.914.281,00 sedangkan Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp50.876.570.754,00 terdapat selisih Rp1.857.343.527,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	52.733.914.281,00	50.876.570.754,00	1.857.343.527,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	52.733.914.281,00	50.876.570.754,00	1.857.343.527,00
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	0,00

Selisih Belanja/Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut:

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Tunjangan Khusus		
201901450448011	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan Nov dan Des 2018	1,814,815,061.00
201901450448012	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI (7 org) bulan Mei s.d Desember 2018	50,379,524.00
201912450448063	Tunjangan kinerja pegawai ANRI yang masih harus dibayar sebanyak (3 org) bulan September 2019	(7,851,058.00)
Jumlah		1,857,343,527.00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA		1,857,343,527.00

Belanja Barang

Rp107.935.972.063,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp107.935.972.063,00 atau 96,22 persen dari anggaran sebesar Rp112.176.482.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp24.001.671.142,00 atau 28,60 persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan anggaran belanja barang dalam rangka menunjang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Rincian Belanja Barang TA 2019 dan Perbandingan Belanja Barang (netto) TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Barang TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Barang Operasional	13.669.901.000,00	13.068.829.521,00	95,60
Belanja Barang Non Operasional	21.517.367.000,00	20.180.557.737,00	93,79
Belanja Barang Persediaan	4.041.413.000,00	4.035.387.513,00	99,85
Belanja Jasa	15.169.483.000,00	14.758.801.876,00	97,29
Belanja Pemeliharaan	10.093.291.000,00	9.987.353.132,00	98,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	40.053.975.000,00	39.320.459.929,00	98,17
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.296.052.000,00	3.285.973.137,00	99,69
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.335.000.000,00	4.317.610.000,00	99,60
Jumlah Belanja Barang Bruto	112.176.482.000,00	108.954.972.845,00	97,13
Pengembalian Belanja Barang		-1.019.000.782,00	
Jumlah Belanja Barang Netto	112.176.482.000,00	107.935.972.063,00	96,22

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI BELANJA		NAIK (TURUN)	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang Operasional	13.068.829.521,00	6.368.702.764,00	6.700.126.757,00	105,20
Belanja Barang Non Operasional	20.180.557.737,00	16.600.495.624,00	3.580.062.113,00	21,57
Belanja Persediaan	4.035.387.513,00	3.033.620.530,00	1.001.766.983,00	33,02
Belanja Jasa	14.758.801.876,00	17.768.726.764,00	-3.009.924.888,00	-16,94
Belanja Pemeliharaan	9.987.353.132,00	9.455.408.566,00	531.944.566,00	5,63
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39.320.459.929,00	26.161.808.533,00	13.158.651.396,00	50,30
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.285.973.137,00	2.650.553.413,00	635.419.724,00	23,97
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	4.317.610.000,00	2.663.115.000,00	1.654.495.000,00	62,13
Jumlah Belanja Barang Bruto	108.954.972.845,00	84.702.431.194,00	24.252.541.651,00	28,63
Pengembalian Belanja	-1.019.000.782,00	-768.130.273,00	-250.870.509,00	32,66
Jumlah Belanja Barang Netto	107.935.972.063,00	83.934.300.921,00	24.001.671.142,00	28,60

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.062.619.741,00 atau 95,56 persen dari anggaran sebesar Rp13.669.901.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp6.700.549.773,00 atau 105,43 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Keperluan Perkantoran	9.629.596.896,00	3.312.505.779,00	6.289.962.717,00	190,70
ANRI Jakarta (KP)	8.900.472.389,00	2.513.941.132,00	6.386.531.257,00	254,04
Balai Arsip Statis dan Tsunami (KD)	550.882.840,00	511.530.500,00	39.352.340,00	7,69
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	151.113.267,00	287.034.147,00	(135.920.880,00)	(47,35)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	27.128.400,00	0,00	27.128.400,00	0,00
Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	742.984.000,00	714.173.850,00	28.810.150,00	4,03
ANRI Jakarta (KP)	679.505.000,00	688.643.850,00	(9.138.850,00)	(1,33)
Balai Arsip Statis dan Tsunami (KD)	63.479.000,00	25.530.000,00	37.949.000,00	148,64
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	126.107.425,00	84.533.135,00	39.878.390,00	49,18
ANRI Jakarta (KP)	112.879.525,00	75.899.835,00	36.979.690,00	48,72
Balai Arsip Statis dan Tsunami (KD)	2.350.000,00	2.971.200,00	(621.200,00)	(20,91)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	5.281.900,00	0,00	5.281.900,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	2.591.000,00	4.353.000,00	(1.762.000,00)	(40,48)
Dinas/Kantor (DK)	3.005.000,00	1.309.100,00	1.695.900,00	129,55
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.049.290.000,00	1.497.685.000,00	551.605.000,00	36,83
ANRI Jakarta (KP)	648.300.000,00	609.480.000,00	38.820.000,00	6,37
Balai Arsip Statis dan Tsunami (KD)	159.640.000,00	74.730.000,00	84.910.000,00	113,62
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	117.480.000,00	138.360.000,00	(20.880.000,00)	(15,09)
Dinas/Kantor (DK)	1.123.870.000,00	675.115.000,00	448.755.000,00	66,47
Belanja Barang Operasional Lainnya	520.851.200,00	759.805.000,00	(216.953.800,00)	(31,45)
ANRI Jakarta (KP)	520.851.200,00	737.805.000,00	(216.953.800,00)	(29,41)
Balai Arsip Statis dan Tsunami (KD)	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Barang Bruto	13.068.829.521,00	6.368.702.764,00	6.693.302.457,00	105,10
Pengembalian Belanja Barang	(6.209.780,00)	(13.457.096,00)	7.247.316,00	(53,85)
Jumlah Belanja Barang Netto	13.062.619.741,00	6.355.245.668,00	6.700.549.773,00	105,43

Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional (netto) Tahun 2019 sebesar Rp13.062.619.741,00 sedangkan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2019 sebesar Rp13.062.619.741,00. Tidak terdapat selisih antara LRA dan LO dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9.629.596.896,00	9.629.596.896,00	0,00
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	742.984.000,00	742.984.000,00	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	126.107.425,00	126.107.425,00	0,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.049.290.000,00	2.049.290.000,00	0,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	520.851.200,00	520.851.200,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang Bruto	13.068.829.521,00	13.068.829.521,00	0,00
	Pengembalian Belanja Barang	-6.209.780,00	-6.209.780,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang Netto	13.062.619.741,00	13.062.619.741,00	0,00

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.161.637.237,00 atau 93,70 persen dari anggaran sebesar Rp21.517.367.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp2.978.189.113,00 atau 17,96 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Bahan	11.118.081.826,00	9.534.141.624,00	1.583.940.202,00	16,61
ANRI Jakarta (KP)	7.008.576.339,00	6.171.896.974,00	836.679.365,00	13,56
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	27.271.000,00	10.432.000,00	16.839.000,00	161,42
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	873.779.500,00	790.088.000,00	83.691.500,00	10,59
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	2.222.244.000,00	1.953.991.900,00	268.252.100,00	13,73
Dinas/Kantor (DK)	986.210.987,00	607.732.750,00	378.478.237,00	62,28
Belanja Honor Output Kegiatan	6.485.205.000,00	5.073.737.000,00	1.411.468.000,00	27,82
ANRI Jakarta (KP)	2.752.280.000,00	2.438.790.000,00	313.490.000,00	12,85
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	10.200.000,00	31.200.000,00	(21.000.000,00)	(67,31)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	2.608.400.000,00	2.018.698.000,00	589.702.000,00	29,21
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	49.225.000,00	37.700.000,00	11.525.000,00	30,57
Dinas/Kantor (DK)	1.065.100.000,00	547.349.000,00	517.751.000,00	94,59
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.974.270.911,00	1.992.617.000,00	(18.346.089,00)	(0,92)
ANRI Jakarta (KP)	1.887.070.511,00	1.961.017.000,00	(73.946.489,00)	(3,77)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	87.200.400,00	31.600.000,00	55.600.400,00	175,95
Belanja Barang Persediaan Penghargaan Dalam Bentuk Uang	603.000.000,00	0,00	603.000.000,00	0,00
ANRI Jakarta (KP)	603.000.000,00	0,00	603.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto	20.180.557.737,00	16.600.495.624,00	2.977.062.113,00	17,93
Pengembalian Belanja Barang	(18.920.500,00)	(20.047.500,00)	1.127.000,00	(5,62)
Jumlah Belanja Barang Netto	20.161.637.237,00	16.580.448.124,00	2.978.189.113,00	17,96

Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional (netto) Tahun 2019 sebesar Rp20.161.637.237,00 sedangkan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2019 sebesar Rp20.295.424.237,00 terdapat selisih sebesar Rp133.787.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
521211	Belanja Bahan	11.118.081.826,00	11.202.648.826,00	(84.567.000,00)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6.485.205.000,00	6.534.425.000,00	(49.220.000,00)
521219	Belanja Barang Non Operasional	1.974.270.911,00	1.974.270.911,00	0,00
521231	Belanja Barang Persediaan Penghargaan Dalam Bentuk Uang	603.000.000,00	603.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang Bruto	20.180.557.737,00	20.314.344.737,00	(133.787.000,00)
	Pengembalian Belanja Barang	(18.920.500,00)	(18.920.500,00)	0,00
	Jumlah Belanja Barang Netto	20.161.637.237,00	20.295.424.237,00	(133.787.000,00)

Selisih Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp133.787.000,00 antara

Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang		
Beban/Belanja Bahan (521211)		
201912450448070	Koreksi saldo atas belanja bahan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor pusat ANRI Jakarta	(28.152.000,00)
201912681464014	Koreksi saldo atas belanja bahan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor daerah BAST	(56.415.000,00)
Jumlah		(84.567.000,00)
Beban/Belanja Honor Output Kegiatan (521213)		
201912450448072	Koreksi saldo atas belanja honor output kegiatan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor pusat ANRI Jakarta	(30.630.000,00)
201912681464016	Koreksi saldo atas belanja honor output kegiatan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor daerah BAST	(18.590.000,00)
Jumlah		(49.220.000,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang antara LRA dengan LO		(133.787.000,00)

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Persediaan (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.035.387.513,00 atau 99,85 persen dari anggaran sebesar Rp4.041.413.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.001.766.983,00 atau 33,02 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.035.387.513,00	3.033.620.530,00	1.001.766.983,00	33,02
ANRI Jakarta (KP)	3.349.283.163,00	2.638.975.500,00	710.307.663,00	26,92
Balai Arsip Statis dan Tsunami (KD)	80.259.250,00	140.458.230,00	(60.198.980,00)	(42,86)
Pusat Jasa Kearsipan	524.032.600,00	214.855.000,00	309.177.600,00	143,90
Pusdiklat Kearsipan Bogor	81.812.500,00	39.331.800,00	42.480.700,00	108,01
Pngembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	4.035.387.513,00	3.033.620.530,00	1.001.766.983,00	33,02

Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan (netto) Tahun 2019 sebesar Rp4.035.387.513,00 sedangkan pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp5.226.674.295,00 terdapat selisih Rp1.191.286.782,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	4.035.387.513,00	-	4.035.387.513,00
593111	Beban Persediaan Konsumsi	0,00	4.272.562.790,00	(4.272.562.790,00)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	0,00	867.429.050,00	(867.429.050,00)
593149	Beban Persediaan Lainnya	0,00	86.682.455,00	(86.682.455,00)
Jumlah Belanja Barang Bruto		4.035.387.513,00	5.226.674.295,00	(1.191.286.782,00)
Pengembalian Belanja Barang		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		4.035.387.513,00	5.226.674.295,00	(1.191.286.782,00)

Selisih Belanja/Beban Barang Persediaan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya perbedaan pengakuan mengenai Belanja pada LRA dan Beban pada LO.

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.756.219.376,00 atau 97,28 persen dari anggaran sebesar Rp15.169.483.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp2.999.114.888,00 atau 16,89 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Langganan Listrik	7.143.397.898,00	6.797.917.989,00	345.479.909,00	5,08
ANRI Jakarta (KP)	6.864.461.889,00	6.518.941.189,00	345.520.700,00	5,30
BAST Aceh (KD)	278.936.009,00	278.976.800,00	-40.791,00	-0,01
Belanja Langganan Telepon	83.629.850,00	100.002.135,00	-16.372.285,00	-16,37
ANRI Jakarta (KP)	57.162.853,00	71.797.882,00	-14.635.029,00	-20,38
BAST Aceh (KD)	26.466.997,00	28.204.253,00	-1.737.256,00	-6,16
Belanja Langganan Air	84.427.710,00	123.330.140,00	-38.902.430,00	-31,54
ANRI Jakarta (KP)	81.518.140,00	120.538.640,00	-39.020.500,00	-32,37
BAST Aceh (KD)	2.909.570,00	2.791.500,00	118.070,00	4,23
Belanja Jasa Pos dan Giro	17.098.000,00	5.776.000,00	11.322.000,00	196,02
ANRI Jakarta (KP)	17.098.000,00	5.776.000,00	11.322.000,00	196,02
Belanja Konsultan	158.950.000,00	219.880.000,00	-60.930.000,00	-27,71
ANRI Jakarta (KP)	158.950.000,00	170.050.000,00	-11.100.000,00	-6,53
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	0,00	49.830.000,00	-49.830.000,00	-100,00
Belanja Sewa	1.547.560.400,00	1.059.094.400,00	488.466.000,00	46,12
ANRI Jakarta (KP)	1.380.740.400,00	928.594.400,00	452.146.000,00	48,69
BAST Aceh (KD)	127.820.000,00	96.000.000,00	31.820.000,00	33,15
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	39.000.000,00	34.500.000,00	4.500.000,00	13,04
Belanja Jasa Profesi	3.468.355.000,00	2.820.590.000,00	647.765.000,00	22,97
ANRI Jakarta (KP)	2.579.055.000,00	2.063.390.000,00	515.665.000,00	24,99
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	68.400.000,00	44.100.000,00	24.300.000,00	55,10
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	747.800.000,00	550.100.000,00	197.700.000,00	35,94
Dinas/Kantor (DK)	73.100.000,00	163.000.000,00	-89.900.000,00	-55,15
Belanja Jasa Lainnya	2.255.383.018,00	6.642.136.100,00	-4.386.753.082,00	-66,04
ANRI Jakarta (KP)	1.486.782.750,00	6.297.867.000,00	-4.811.084.250,00	-76,39
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	116.331.668,00	99.241.100,00	17.090.568,00	17,22
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	532.735.600,00	245.028.000,00	287.707.600,00	117,42
BAST Aceh (KD)	114.533.000,00	0,00	114.533.000,00	0,00
Dinas/Kantor (DK)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto	14.758.801.876,00	17.768.726.764,00	-2.948.994.888,00	-16,60
Pengembalian belanja Barang	-2.582.500,00	-13.392.500,00	10.810.000,00	-80,72
Jumlah Belanja Barang Netto	14.756.219.376,00	17.755.334.264,00	-2.999.114.888,00	-16,89

Realisasi Anggaran Belanja Jasa (netto) Tahun 2019 sebesar Rp14.756.219.376,00 sedangkan pada Laporan Operasional Tahun 2019

sebesar Rp14.948.741.403,00 terdapat selisih Rp192.522.027,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
522111	Belanja Langganan Listrik	7.143.397.898,00	7.329.520.148,00	(186.122.250,00)
522112	Belanja Langganan Telepon	83.629.850,00	83.409.127,00	220.723,00
522113	Belanja Langganan Air	84.427.710,00	79.148.210,00	5.279.500,00
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	17.098.000,00	17.098.000,00	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	158.950.000,00	158.950.000,00	0,00
522141	Belanja Sewa	1.547.560.400,00	1.547.560.400,00	0,00
522151	Belanja Jasa Profesi	3.468.355.000,00	3.480.255.000,00	(11.900.000,00)
522191	Belanja Jasa Lainnya	2.255.383.018,00	2.255.383.018,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto		14.758.801.876,00	14.951.323.903,00	(192.522.027,00)
Pengembalian belanja Barang		(2.582.500,00)	(2.582.500,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		14.756.219.376,00	14.948.741.403,00	(192.522.027,00)

Selisih Belanja Barang Jasa sebesar Rp192.522.027,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
201901681464002	Pembayaran beban listrik kantor daerah BAST Aceh beban bln Desember 2018	23.430.757,00
201901450448004	Pembayaran beban listrik Gd. Gajah Mada beban bulan Desember 2018	15.406.277,00
201901450448005	Pembayaran beban listrik Gd. Gajah Mada beban bulan Desember 2018	11.649.366,00
201901450448006	Pembayaran beban listrik rumah dinas beban bulan Desember 2018	6.243.456,00
201901450448010	Pembayaran beban listrik Kantor Pusat beban bln Desember 2018	502.326.730,00
201901450448013	Pembayaran beban listrik Pusdiklat Kearsipan Bogor beban bln Desember 2018	10.344.455,00
201912681464010	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban Desember 2019	(23.000.316,00)
201912450448050	Tagihan listrik Gd. ANRI bln Desember 2019	(680.628.563,00)
201912450448051	Tagihan listrik Rumah Dinas ANRI bln Desember 2019	(5.973.691,00)
201912450448052	Tagihan listrik Gd. Gajah Mada ANRI bln Desember 2019	(10.884.453,00)
201912450448053	Tagihan listrik Gd. Gajah Mada Keagungan bln Desember 2019	(24.102.553,00)
201912450448057	Tagihan listrik Pusdiklat Bogor bln Desember 2019	(10.933.715,00)
Jumlah		(186.122.250,00)
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
201901681464003	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor BAST Aceh beban bulan Desember 2018	2.263.331,00
201901450448007	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor ANRI Pusat beban bulan Desember 2018	2.881.136,00
201902450448016	Pembayaran beban telekomunikasi Gd. Warung Buncit bln Desember 2018	1.383.804,00
201912681464011	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban Desember 2019	(2.196.530,00)
201912450448054	Tagihan telekomunikasi ANRI bln Desember 2019	(2.760.639,00)
201912450448058	Tagihan telekomunikasi Pusdiklat ANRI Bogor bln Desember 2019	(208.879,00)
201912450448059	Tagihan telekomunikasi Gd. Warung Buncit ANRI bln Desember 2019	(1.141.500,00)
Jumlah		220.723,00
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
201902681464001	Pembayaran beban air Kantor BAST Aceh beban bln Desember 2018	204.800,00
201901450448008	Pembayaran beban air Gd. Gajah Mada beban bln Desember 2018	16.090.120,00
201901450448009	Pembayaran beban air Kantor Pusdiklat Kearsipan Bogor beban bln Desember 2018	1.161.100,00
201912681464012	Untuk menyesuaikan tagihan PDAM bulan Desember 2019	(230.400,00)
201912450448055	Tagihan air PAM Gd. Gajah Mada bln Desember 2019	(10.582.520,00)
201912450448056	Tagihan air PAM Pusdiklat Bogor bln Desember 2019	(1.363.600,00)
Jumlah		5.279.500,00
Beban/Belanja Profesi (522151)		
201912450448067	Koreksi saldo atas belanja jasa profesi	(11.900.000,00)
Jumlah		(11.900.000,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		(192.522.027,00)

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.987.353.132,00 atau 98,95 persen dari anggaran sebesar Rp10.093.291.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp531.944.566,00 atau 5,63 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.265.085.378,00	5.035.109.643,00	229.975.735,00	4,57
ANRI Jakarta (KP)	5.209.790.580,00	4.959.582.160,00	250.208.420,00	5,04
BAST Aceh (KD)	55.294.798,00	75.527.483,00	(20.232.685,00)	(26,79)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	381.612.700,00	345.740.431,00	35.872.269,00	10,38
ANRI Jakarta (KP)	370.886.400,00	337.240.450,00	33.645.950,00	9,98
BAST Aceh (KD)	10.726.300,00	8.499.981,00	2.226.319,00	26,19
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	255.841.800,00	171.385.900,00	84.455.900,00	49,28
ANRI Jakarta (KP)	255.841.800,00	171.385.900,00	84.455.900,00	49,28
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.461.287.704,00	1.565.719.312,00	(104.431.608,00)	(6,67)
ANRI Jakarta (KP)	1.350.529.610,00	1.408.401.078,00	(57.871.468,00)	(4,11)
BAST Aceh (KD)	109.623.594,00	157.318.234,00	(47.694.640,00)	(30,32)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	1.134.500,00	0,00	1.134.500,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	708.600.000,00	699.600.000,00	9.000.000,00	1,29
ANRI Jakarta (KP)	708.600.000,00	699.600.000,00	9.000.000,00	1,29
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.464.971.100,00	1.437.880.400,00	27.090.700,00	1,88
ANRI Jakarta (KP)	1.464.971.100,00	1.437.880.400,00	27.090.700,00	1,88
Belanja Pemeliharaan Lainnya	449.954.450,00	199.972.880,00	249.981.570,00	125,01
ANRI Jakarta (KP)	449.954.450,00	199.972.880,00	249.981.570,00	125,01
Jumlah Belanja Barang Bruto	9.987.353.132,00	9.455.408.566,00	531.944.566,00	5,63
Pengembalian belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	9.987.353.132,00	9.455.408.566,00	531.944.566,00	5,63

Realisasi Anggaran Belanja Barang Pemeliharaan (netto) Tahun 2019 sebesar Rp9.987.353.132,00 sedangkan pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp9.115.785.192,00 terdapat selisih Rp871.567.940,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Selisih (Rp)		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.265.085.378,00	5.075.408.088,00	189.677.290,00
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	381.612.700,00	0,00	381.612.700,00
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	255.841.800,00	255.841.800,00	0,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.461.287.704,00	1.461.287.704,00	0,00
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	708.600.000,00	0,00	708.600.000,00
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.464.971.100,00	1.464.971.100,00	0,00
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	449.954.450,00	449.954.450,00	0,00
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	404.612.050,00	(404.612.050,00)
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	0,00	3.710.000,00	(3.710.000,00)
	Jumlah Belanja Barang Bruto	9.987.353.132,00	9.115.785.192,00	871.567.940,00
	Pengembalian belanja Barang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang Netto	9.987.353.132,00	9.115.785.192,00	871.567.940,00

Selisih Belanja/Beban Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp871.567.940,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Tgl. DOK	Nomor Dok	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Pemeliharaan			
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)			
31/07/2019	201907450448043	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan ruang diatas Poliklinik ANRI sesuai SPM/SP2D Nomor 00236/191391301003752 Tanggal 27 Pebruari 2019	29.601.000,00
31/12/2019	201912450448073	Koreksi manual atas reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan ruang diatas Poliklinik ANRI sesuai SPM/SP2D Nomor 00236/191391301003752 Tanggal 27 Pebruari	11.550.000,00
31/12/2019	201912450448072	Koreksi manual atas reklasifikasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin atas transaksi pekerjaan penggantian alas	148.526.290,00
Jumlah			29.601.000,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Pemeliharaan antara LO dengan LRA			189.677.290,00

Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan ruang di atas Poliklinik ANRI merupakan tindak lanjut dari Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019.

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp381.612.700,00; Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp708.600.000,00; Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp404.612.050,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp3.710.000,00 akan dijelaskan selanjutnya pada CALK Neraca mengenai Persediaan.

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.471.529.167,00 atau 96,05 persen dari anggaran sebesar Rp40.053.975.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp12.909.410.997,00 atau 50,50 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Biasa	21.982.826.929,00	13.177.331.233,00	8.805.495.696,00	66,82
ANRI Jakarta (KP)	14.077.816.993,00	9.101.593.608,00	4.976.223.385,00	54,67
BAST Aceh (KD)	289.934.837,00	338.667.869,00	(48.733.032,00)	(14,39)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	277.162.106,00	132.577.000,00	144.585.106,00	109,06
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	439.696.302,00	173.033.400,00	266.662.902,00	154,11
Dinas/Kantor (DK)	6.898.216.691,00	3.431.459.356,00	3.466.757.335,00	101,03

Belanja Perjalanan Dinas Dalam	1.362.848.000,00	931.915.000,00	430.933.000,00	46,24
ANRI Jakarta (KP)	1.118.480.000,00	741.945.000,00	376.535.000,00	50,75
BAST Aceh (KD)	14.550.000,00	5.550.000,00	9.000.000,00	162,16
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	38.750.000,00	40.400.000,00	(1.650.000,00)	(4,08)
Dinas/Kantor (DK)	188.668.000,00	144.020.000,00	44.648.000,00	31,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.845.588.000,00	5.926.665.300,00	(81.077.300,00)	(1,37)
ANRI Jakarta (KP)	4.381.033.000,00	4.405.658.800,00	(24.625.800,00)	(0,56)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	186.040.000,00	56.310.000,00		
BAST Aceh (KD)		17.837.500,00		
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	176.400.000,00	197.950.000,00	(21.550.000,00)	(10,89)
Dinas/Kantor (DK)	1.102.115.000,00	1.248.909.000,00	(146.794.000,00)	(11,75)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.129.197.000,00	6.125.897.000,00	4.003.300.000,00	65,35
ANRI Jakarta (KP)	9.250.111.000,00	5.656.975.000,00	3.593.136.000,00	63,52
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	550.296.000,00	363.280.000,00	187.016.000,00	51,48
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	276.032.000,00	105.642.000,00	170.390.000,00	161,29
Dinas/Kantor (DK)	52.758.000,00	0,00	52.758.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto	39.320.459.929,00	26.161.808.533,00	13.158.651.396,00	50,30
Pengembalian belanja Barang	(848.930.762,00)	(599.690.363,00)	(249.240.399,00)	41,56
Jumlah Belanja Barang Netto	38.471.529.167,00	25.562.118.170,00	12.909.410.997,00	50,50

Realisasi Anggaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (netto) Tahun 2019 sebesar Rp38.471.529.167,00 dan pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp38.997.012.239,00 terdapat selisih sebesar Rp525.483.072,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	21.982.826.929,00	22.309.020.001,00	(326.193.072,00)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.362.848.000,00	1.421.498.000,00	(58.650.000,00)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.845.588.000,00	5.970.928.000,00	(125.340.000,00)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.129.197.000,00	10.144.497.000,00	(15.300.000,00)
	Jumlah Belanja Barang Bruto	39.320.459.929,00	39.845.943.001,00	(525.483.072,00)
	Pengembalian belanja Barang	(848.930.762,00)	(848.930.762,00)	0,00
	Jumlah Belanja Barang Netto	38.471.529.167,00	38.997.012.239,00	(525.483.072,00)

Selisih Belanja/Beban Barang Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp525.483.072,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Tgl. DOK	Nomor Dok	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
Beban/Belanja Perjalanan Biasa (524111)			
31/12/2019	201912450448064	Reklasifikas atas transaksi belanja modal perjadiin Agus Santoso SPM No. 01143 Tgl. 21/05/2019 dan SPM No. 02167 Tgl. 03/09/2019 sesuai Nota Dinas Inspektorat ANRI No. PW.01/13/2019 tgl. 31 Des 2019 tentang Tindak Lanjut Audit Pengelolaan BMN TA 2019	(8.148.800,00)
31/12/2019	201912450448068	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas biasa yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(121.725.000,00)
31/12/2019	201912681464015	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas biasa yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di KD BAST	(196.319.272,00)
Jumlah			(326.193.072,00)
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)			
31/12/2019	201912450448066	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(58.650.000,00)

31/12/2019	201912450448069	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(102.540.000,00)
31/12/2019	201912681464013	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor daerah BAST	(22.800.000,00)
Jumlah			(183.990.000,00)
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)			
31/12/2019	201912450448065	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(15.300.000,00)
Jumlah			(15.300.000,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara LO dengan LRA			(525.483.072,00)

B.4.6 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.143.615.897,00 atau 95,38 persen dari anggaran sebesar Rp3.296.052.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp614.605.298,00 atau 24,30 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.249.152.682,00	2.380.809.413,00	-131.656.731,00	-5,53
ANRI Jakarta (KP)	1.436.934.682,00	1.593.706.188,00	-156.771.506,00	-9,84
Pusat Jasa Kearsipan (KP)		116.787.000,00		
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	812.218.000,00	670.316.225,00	141.901.775,00	21,17
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.036.820.455,00	269.744.000,00	767.076.455,00	284,37
ANRI Jakarta (KP)	1.036.820.455,00	269.744.000,00	767.076.455,00	284,37
Jumlah Belanja Barang Bruto	3.285.973.137,00	2.650.553.413,00	635.419.724,00	23,97
Pengembalian belanja Barang	-142.357.240,00	-121.542.814,00	-20.814.426,00	17,13
Jumlah Belanja Barang Netto	3.143.615.897,00	2.529.010.599,00	614.605.298,00	24,30

Realisasi Anggaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Luar Negeri (netto) Tahun 2019 sebesar Rp3.143.615.897,00 dan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2019 sebesar Rp3.143.615.897,00. Tidak terdapat selisih antara LRA dan LO sesuai dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.249.152.682,00	2.249.152.682,00	0,00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.036.820.455,00	1.036.820.455,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto		3.285.973.137,00	3.285.973.137,00	0,00
Pengembalian belanja Barang		-142.357.240,00	-142.357.240,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		3.143.615.897,00	3.143.615.897,00	0,00

B.4.7 Belanja Barang untuk di serahkan Kepada Masyarakat

Realisasi Belanja Barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (netto) 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.317.610.000,00 atau 99,60 persen dari anggaran sebesar Rp4.335.000.000,00. Bila dibandingkan

dengan 31 Desember 2018 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp1.654.495.000,00 atau 62,13 persen dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	4,317,610,000.00	2,663,115,000.00	1,654,495,000.00	62.13
Jumlah Belanja Barang Bruto	4,317,610,000.00	2,663,115,000.00	1,654,495,000.00	62.13
Pengembalian belanja Barang	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Barang Netto	4,317,610,000.00	2,663,115,000.00	1,654,495,000.00	62.13

Realisasi Anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (netto) Tahun 2019 sebesar Rp4.317.610.000,00 dan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2019 sebesar Rp4.334.256.173,00. Penjelasan mengenai Belanja/Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat akan dijelaskan selanjutnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Belanja Modal

Rp101.360.796.097,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp101.360.796.097,00 atau 95,98 persen dari anggaran sebesar Rp105.606.903.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp79.455.919.692,00 atau 362,73 persen dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh adanya kenaikan anggaran dan kebutuhan belanja modal untuk menunjang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI dan Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.267.650.000,00	12.990.421.023,00	97,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.737.903.000,00	85.425.413.161,00	96,27
Belanja Modal Lainnya	3.601.350.000,00	3.301.647.480,00	91,68
Jumlah Belanja Bruto	105.606.903.000,00	101.717.481.664,00	96,32
Pengembalian Belanja		(356.685.567,00)	
Jumlah Belanja Netto	105.606.903.000,00	101.360.796.097,00	95,98

Perbandingan Realisasi Belanja Modal (netto) TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI BELANJA		NAIK / TURUN	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.990.421.023,00	5.032.633.755,00	7.957.787.268,00	158,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.425.413.161,00	16.115.208.150,00	69.310.205.011,00	430,09
Belanja Modal Lainnya	3.301.647.480,00	757.619.500,00	2.544.027.980,00	335,79
Jumlah Belanja Bruto	101.717.481.664,00	21.905.461.405,00	79.812.020.259,00	364,35
Pengembalian Belanja	-356.685.567,00	-585.000,00	-356.100.567,00	60.871,89
Jumlah Belanja Netto	101.360.796.097,00	21.904.876.405,00	79.455.919.692,00	362,73

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.990.421.023,00 atau 97,91 persen dari anggaran sebesar Rp13.267.650.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2018, realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.917.787.268,00 atau 157,33 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya karena kebutuhan untuk belanja modal peralatan dan mesin meningkat pada Kantor Pusat ANRI Jakarta, Pusdiklat Kearsipan Bogor, Pusat Jasa Kearsipan, dan BAST Aceh mengalami kenaikan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.950.421.023,00	5.032.633.755,00	7.917.787.268,00	157,33
ANRI Jakarta (KP)	7.868.046.383,00	3.340.124.060,00	4.527.922.323,00	135,56
BAST Aceh (KD)	2.827.804.760,00	209.943.145,00	2.617.861.615,00	1.246,94
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	2.224.569.880,00	1.482.566.550,00	742.003.330,00	50,05
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Bruto	12.990.421.023,00	5.032.633.755,00	7.917.787.268,00	157,33
Pengembalian Modal Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	12.990.421.023,00	5.032.633.755,00	7.917.787.268,00	157,33

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp85.068.727.594,00 atau 95,86 persen dari anggaran sebesar Rp88.737.903.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.114.623.150,00 terdapat kenaikan sebesar Rp68.756.790.444,00

atau 426,67 persen. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan TA 2019 & 2018

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.228.099.161,00	16.115.208.150,00	69.112.891.011,00	428,87
ANRI Jakarta (KP)	34.999.212.609,00	14.827.736.150,00	20.171.476.459,00	136,04
BASTi Aceh (KD)	50.228.886.552,00	1.287.472.000,00	48.941.414.552,00	3.801,36
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	197.314.000,00	0,00	68.756.790.444,00	0,00
ANRI Jakarta (KP)	197.314.000,00	0,00	197.314.000,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Bruto	85.425.413.161,00	16.115.208.150,00	69.112.891.011,00	428,87
Pengembalian Modal Barang	(356.685.567,00)	(585.000,00)	(356.100.567,00)	60.871,89
Jumlah Belanja Modal Netto	85.068.727.594,00	16.114.623.150,00	68.756.790.444,00	426,67

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.301.647.480,00 dari anggaran sebesar Rp3.601.350.000,00 atau 91,68 persen. Bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.563.887.980,00 atau 347,52 persen. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Lainnya	3.301.647.480,00	737.759.500,00	2.563.887.980,00	347,52
ANRI Jakarta (KP)	3.282.797.480,00	737.759.500,00	2.545.037.980,00	344,97
Pusdiklat Kearsipan Bogor	18.850.000,00	19.860.000,00		
Jumlah Belanja Modal (bruto)	3.301.647.480,00	737.759.500,00	2.563.887.980,00	347,52
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal (netto)	3.301.647.480,00	737.759.500,00	2.563.887.980,00	347,52

*Belanja Bantuan Sosial
Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Pada Arsip Nasional RI tidak terdapat belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp2.720.000,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.720.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 2018

KODE SATKER	NAMA SATKER	2019 (Rp)	2018 (Rp)
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	-
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	-
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-
087.01.070069	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	-	-
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	-
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	-
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	-
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	-
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	-
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	-
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	-
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	-
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	-
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	-
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	-
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	-
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	-
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	-
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	-
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	2.720.000,00	-
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	-
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	-
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	-
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan	-	-
087.01.418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	-	-
087.01.450448	Arsip Nasional RI Jakarta	-	-
087.01.681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	-	-
	Jumlah	2.720.000,00	-

Kas di Bendahara Pengeluaran pada satker Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo sebesar Rp2.720.000,00 telah

disetorkan ke rekening kas negara pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 08:23:01 waktu setempat dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN): 336E58N3DE1ST6HD dan nama wajib bayar BP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, yaitu LS Bendahara Pengeluaran yang belum didistribusikan kepada para pihak ketiga.

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak mencatat piutang yang berasal dari PNBP, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari

penerimaan perpajakan dan hibah. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBPN dan Piutang Lainnya.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Rp0,00*

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 30 Sep31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bagian
Lancar Piutang TP/TGR
Rp0,00*

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Persediaan
Rp1.804.956.408,00*

C.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.804.956.408,00 dan Rp2.268.275.397,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
Barang Konsumsi (117111)	1.250.425.270,00	1.663.495.020,00	(413.069.750,00)	(24,83)
ANRI Jakarta (KP)	813.000.880,00	1.400.708.800,00	(587.707.920,00)	(41,96)
BAST Aceh (KD)	79.648.790,00	106.584.920,00	(26.936.130,00)	(25,27)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	316.916.600,00	153.223.000,00	163.693.600,00	106,83
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	40.859.000,00	2.978.300,00	37.880.700,00	1.271,89
Barang untuk Pemeliharaan (117113)	55.137.840,00	87.994.090,00	(32.856.250,00)	(37,34)
ANRI Jakarta (KP)	51.811.340,00	83.188.840,00	(31.377.500,00)	(37,72)
BAST Aceh (KD)	3.326.500,00	4.805.250,00	(1.478.750,00)	(30,77)
Suku Cadang (117114)	0,00	536.323.554,00	(536.323.554,00)	(100,00)
ANRI Jakarta (KP)	0,00	83.188.840,00	(83.188.840,00)	(100,00)
Barang Persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan ke Masyarakat (117128)	469.091.175,00	453.134.714,00	15.956.461,00	3,52
ANRI Jakarta (KP)	469.091.175,00	453.134.714,00	15.956.461,00	3,52
Bahan Baku (117131)	676.000,00	15.878.050,00	(15.202.050,00)	(95,74)
ANRI Jakarta (KP)	490.000,00	15.458.950,00	(14.968.950,00)	(96,83)
BAST Aceh (KD)	186.000,00	419.100,00	(233.100,00)	(55,62)
Persediaan Lainnya (117199)	29.626.123,00	47.773.523,00	(18.147.400,00)	(37,99)
ANRI Jakarta (KP)	28.827.423,00	46.676.123,00	(17.848.700,00)	(38,24)
BAST Aceh (KD)	798.700,00	1.097.400,00	(298.700,00)	(27,22)
Jumlah Persediaan	1.804.956.408,00	2.268.275.397,00	(463.318.989,00)	(20,43)

(Keterangan: Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat merupakan buku-buku koleksi layanan arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp469.091.175,00)

Terdapat penurunan Persediaan sebesar Rp463.318.989,00 dengan rincian mutasi Persediaan sebagai berikut :

- a. Pembelian sebesar Rp9.443.210.213,00 berasal dari Belanja Barang Persediaan Konsumsi sebesar Rp4.035.387.513,00; Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp381.612.700,00; Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp708.600.000,00; dan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp4.317.610.000,00;
- b. Beban Persediaan sebesar Rp5.210.490.065,00 berasal dari Pemakaian Barang Konsumsi sebesar Rp4.269.430.190,00; Pemakaian Bahan Baku sebesar Rp867.429.050,00; Pemakaian

Persediaan Lainnya sebesar Rp86.439.455,00; Pengurangan Persediaan dikarenakan hasil opname fisik Persediaan Lainnya sebesar Rp223.000,00; Penambahan Persediaan dikarenakan hasil opname fisik Barang Konsumsi sebesar Rp12.541.630,00 dan Bahan Baku Rp490.000,00;

- c. Beban Pemeliharaan sebesar Rp408.322.050,00 berasal dari Pemakaian Bahan untuk Pemeliharaan Rp404.612.050,00 dan Pemakaian Suku Cadang sebesar Rp3.710.000,00;
- d. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp4.334.256.173,00 berasal dari Penyerahan/Dijual kepada Masyarakat sebesar Rp4.327.679.438,00 dan pengurangan Persediaan hasil opname fisik sebesar Rp6.576.735,00;
- e. Penyesuaian Nilai Persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir yaitu sebesar Rp48.657.386,00 yang berasal dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp32.136.610,00; Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp13.437.900,00; Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp422.634,00; Bahan Baku sebesar Rp824.600,00; dan Persediaan Lainnya sebesar Rp1.835.642,00.

Mutasi Persediaan Tahun 2019

Akun/Satker	Persediaan	Saldo Awal (Rp)	Pembelian (Rp)	Pemakaian (Rp)	Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat (Rp)	Opname Fisik (Rp)	Penyesuaian Nilai Persediaan (Rp)	Koreksi Persediaan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.663.495.020,00	3.819.057.200,00	(4.269.430.190,00)	-	12.541.630,00	32.136.610,00	(7.375.000,00)	1.250.425.270,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	1.400.708.800,00	3.169.182.550,00	(3.797.130.475,00)	-	12.541.630,00	27.698.375,00	-	813.000.880,00
681464	BAST Aceh	106.584.920,00	70.560.550,00	(97.907.815,00)	-	-	411.135,00	-	79.648.790,00
418934	Pusdiklat Kearsipan	2.978.300,00	81.812.500,00	(44.154.900,00)	-	-	223.100,00	-	40.859.000,00
418929	Pusat Jasa Kearsipan	153.223.000,00	497.501.600,00	(330.237.000,00)	-	-	3.804.000,00	(7.375.000,00)	316.916.600,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	87.994.090,00	353.061.200,00	(404.612.050,00)	-	5.256.700,00	13.437.900,00	-	55.137.840,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	83.188.840,00	317.281.200,00	(367.259.350,00)	-	5.256.700,00	13.343.950,00	-	51.811.340,00
681464	BAST Aceh	4.805.250,00	9.249.000,00	(10.821.700,00)	-	-	93.950,00	-	3.326.500,00
418929	Pusat Jasa Kearsipan	-	26.531.000,00	(26.531.000,00)	-	-	-	-	-
117114	Suku Cadang	-	3.710.000,00	(3.710.000,00)	-	-	-	-	-
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	-	3.710.000,00	(3.710.000,00)	-	-	-	-	-
117128	Barang persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	453.134.714,00	4.349.790.000,00	-	(4.327.679.438,00)	(6.576.735,00)	422.634,00	-	469.091.175,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	453.134.714,00	4.349.790.000,00	-	(4.327.679.438,00)	(6.576.735,00)	422.634,00	-	469.091.175,00
117131	Bahan Baku	15.878.050,00	850.912.400,00	(867.429.050,00)	-	490.000,00	824.600,00	-	676.000,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	15.458.950,00	841.620.400,00	(857.935.350,00)	-	490.000,00	856.000,00	-	490.000,00
681464	BAST Aceh	419.100,00	9.292.000,00	(9.493.700,00)	-	-	(31.400,00)	-	186.000,00
117199	Persediaan Lainnya	47.773.523,00	66.679.413,00	(86.439.455,00)	-	(223.000,00)	1.835.642,00	-	29.626.123,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	46.676.123,00	64.795.413,00	(84.239.555,00)	-	(223.000,00)	1.818.442,00	-	28.827.423,00
681464	BAST Aceh	1.097.400,00	1.884.000,00	(2.199.900,00)	-	-	17.200,00	-	798.700,00
	Jumlah	2.268.275.397,00	9.443.210.213,00	(5.631.620.745,00)	(4.327.679.438,00)	11.488.595,00	48.657.386,00	(7.375.000,00)	1.804.956.408,00

(Keterangan: Telah disepakati koreksi atas data Persediaan pada LK ANRI 2019)

Unaudited dengan menambahkan jurnal Persediaan pada Beban dengan rincian masing-masing : Barang Konsumsi sebesar Rp14.112.230,00, Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp5.256.700,00, Bahan Baku Rp490.000,00, dan Persediaan Lainnya Rp20.000,00)

Penjelasan opname fisik persediaan tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Opname Fisik bernilai minus pada Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat di Arsip Nasional RI Jakarta sebesar Rp6.576.735,00 diperoleh dari perhitungan hasil opname fisik (kurang) sebesar Rp29.880.507,00 dikurangi dengan hasil opname fisik (tambah) sebesar Rp23.303.772,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Opname Fisik Nomor: PL.02.03/52/2020 Tanggal 12 Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

JENIS TRANSAKSI : P01 HASIL OPNAME FISIK (KURANG)			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117128	BARANG LAINNYA UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT		
1010501008	Barang Persediaan	607	29.880.507
16	- Ambonsche Landsbeschrijving	2	87.934
19	- Bahasa Melayu sebagai Bahasa Persatuan	2	57.800
24	- Gerakan Separatis di Indonesia	3	81.000
26	- Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 839-1848	4	243.200
30	- Kalimantan di Masa Kolonial	1	24.133
33	- Konferensi Meja Bundar (KMB)	6	138.000
39	- Laporan-laporan tentang gerakan protes di Jawa pada Abad XX	9	454.797
42	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat 1921-1930	75	3.332.475
47	- Oeang Republik Indonesia (ORI)	2	46.000
49	- Otonomi Daerah hindia belanda 1903-1940	13	296.400
50	- PDRI (Pemerintah Darurat RI) dalam khasanah Kearsipan	2	81.666
51	- PDRI (pemerintah Darurat RI) dikaji ulang MSI	9	396.603
52	- Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial	5	143.165
53	- Pemilihan umum tahun 1955	6	138.000
54	- Pengungsian penduduk di Jawa tahun 1945-1949	5	165.000
55	- Perbudakan abad XVII-XIX di Hindia Belanda	2	41.000
56	- Gunung Krakatau Meletus 1883	2	32.000
57	- Perdagangan Candu 1930- Perang Kemerdekaan RI	6	144.000
60	- Perlawanan Tokoh Masyarakat Aceh terhadap Kolonial	36	721.188
63	- Sukses Pergantian Presiden	1	23.000
65	- Surat-surat perjanjian antara kesultanan Riau dengan VOC dan Pemerintah	388	22.012.404
71	- Masalah Banjir di Batavia	2	23.000
TOTAL		607	29.880.507

JENIS TRANSAKSI : P02 HASIL OPNAME FISIK (TAMBAH)

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117128	BARANG LAINNYA UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT		
1010501008	Barang Persediaan	513	23.303.772
17	- ANRI dalam Gerak Langkah 50 th Indonesia Merdeka	1	54.567
18	- Arsip dan Sejarah	1	20.967
20	- Biro Perjalanan Haji di Indonesia Masa Kolonial	15	676.995
21	- Buku Petunjuk Mengenai Data Arsip Tanaman Padi Era Kolonial	1	19.533
22	- Di Antara Hempasan dan Benturan Kenang-kenangan dr.Abdul Halim	2	51.400
23	- Di bawah pendudukan Jepang Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang	1	60.000
25	- Guide to the sources of asian history Indonesia	16	834.128
29	- Inventaris Arsip Perkebunan 1816-1900	12	243.204
31	- Kembalinya Irian Barat	19	532.627
32	- Khsanah Microfilm	8	223.464
34	- Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid IV (Pulau terdepan wilayah	2	122.000
36	- Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid II (Wilayah Laut Andaman,	3	189.999
37	- Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid I (Wilayah Laut Cina	4	192.532
38	- Laporan-laporan Desa (Desa Rapporten)	9	213.903
40	- Maluku Tengah di masa lampau gambaran sekilas lewat arsip abad XX	54	2.305.800
43	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat I 1931-1940	48	2.241.600
44	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat Tengah 1921-1930	75	3.534.975
45	- Memori Serah Jabatan Jawa Timur dan Tanah Kerajaan 1921-1930	42	1.996.386
46	- Menelusuri Jejak Ayahku wawancara dengan Harsono Tjokroaminoto	1	50.000
58	- Perjuangan dan Pengabdian mosaik kenangan Prof.dr Satrio (1916-1986)	1	47.033
59	- Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi (Kesaksian	24	587.208
61	- Reflection on tsunami an oral history	1	21.900
62	- Sarekat Islam Lokal	44	2.535.852
64	- Ternate: memory van overgave JH Tobias (1857) dan C.Bosscher (1859)	3	139.899
66	- Surat-surat perjanjian antara kesultanan Banjarmasin dengan VOC	116	5.881.200
67	- Surat-surat perjanjian antara kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah	2	126.600
72	- Laporan Politik 1837	8	400.000
TOTAL		513	23.303.772

- Opname Fisik bernilai minus pada Barang Persediaan Lainnya di Arsip Nasional RI Jakarta sebesar Rp223.000,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Opname Fisik Semester II Nomor: BA.07/BU/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 memiliki rincian sebagai berikut :

JENIS TRANSAKSI : P01 HASIL OPNAME FISIK (KURANG)			
KODE	URAIAN	KUANITAS	RUPIAH
115199	PERSEDIAAN LAINNYA		
1010401999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)	6	223.000
11	-Dextrose 40% 25 ml	5	60
51	- Plastik Klip Obat	1	183
	Koreksi Persediaan Lainnya		-20
TOTAL		6	223.000

- Koreksi Persediaan pada Barang Konsumsi di Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp7.375.000,00 disebabkan adanya penghapusan Barang Usang/Rusak Persediaan berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nomor: PL.02/03.b/2019 Tanggal 30 Desember 2019.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00*

C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang Rp0,00*

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang jangka panjang pada ANRI dikategorikan lancar dengan tarif 0,50 %. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp802.566.806.600,00

C.12 Tanah

Tanah yang dimiliki Arsip Nasional RI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp802.566.806.600,00 dan Rp216.312.132.396,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	216.312.132.396,00
Mutasi tambah:	637.380.078.204,00
Selisih Revaluasi Aset	636.184.075.204,00
Koreksi Revaluasi BMN	1.196.003.000,00
Mutasi kurang:	51.125.404.000,00
Koreksi Revaluasi BMN	51.125.404.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	802.566.806.600,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	802.566.806.600,00

Terdapat mutasi tambah Tanah sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Adapun rincian aset Arsip Nasional RI berupa tanah sebagai berikut :

NO.	Keterangan	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah di jalan Gajah Mada	9.340	418.163.400.000,00
2	Tanah di Jalan Ampera Raya	18.245	303.848.960.000,00
3	Tanah di Pusdiklat Kearsipan ANRI di	3.659	51.276.877.600,00
4	Tanah rumah negara golongan II di	979	14.806.072.000,00
5	Tanah jalan khusus kompleks rumah	793	12.310.597.000,00
6	Tanah di BAST di Banda Aceh	4.000	2.160.900.000,00
Total			802.566.806.600,00

- Mutasi tambah senilai Rp1.196.003.000,00 merupakan koreksi kesalahan input IP yang berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 3 dengan koreksi nilai wajar senilai Rp.2.479.068.440 No LHIP-822/REV/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019. dan Tanah Untuk Jalan Khusus Komplek NUP 1 dengan koreksi nilai wajar senilai Rp. 9.743.797.000 No LHIP-824/REV/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019.
- Mutasi kurang senilai Rp51.125.404.000,00 merupakan koreksi kesalahan input IP yang berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN tahun

2019 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 dengan koreksi nilai wajar senilai Rp. 230.868.960.000 Nomor: LHIP-819/REV/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019 dan Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan NUP 1 dengan koreksi nilai wajar senilai Rp. 9.055.122.000 Nomor: LHIP-824/REV/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019.

*Peralatan dan Mesin
Rp221.057.763.568,00*

C.13 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp221.057.763.568,00 dan Rp196.135.354.724,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018			196.135.354.724,00
Mutasi tambah:			25.763.368.669,00
Pembelian			12.970.567.913,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.970.567.913,00	
Pengembangan Nilai Aset			40.000.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
Transfer Masuk			4.033.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	4.033.000,00	
Reklasifikasi Masuk			12.748.767.756,00
132111	Peralatan dan Mesin	12.748.767.756,00	
Mutasi kurang:			840.959.825,00
Penghentian Aset dari Penggunaan			833.364.325,00
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	833.364.325,00	
Transfer Keluar			4.033.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	4.033.000,00	
Transaksi Normalisasi BMN			3.562.500,00
132111	Peralatan dan Mesin	3.562.500,00	
Saldo per 31 Desember 2019			221.057.763.568,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019			(182.723.430.638,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019			38.334.332.930,00

Mutasi Tambah sebesar Rp25.763.368.669,00 berasal dari :

- Pembelian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp12.970.567.913,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	ANRI	
		Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
3:01:03	Alat Bantu	1	893.529.780,00
3:02:05	Alat Angkutan Bermotor Udara	1	16.659.000,00
3:03:01	Alat Bengkel Bermesin	1	4.400.000,00
3:03:02	Alat Bengkel Tak Bermesin	3	5.990.000,00
3:05:01	Alat Kantor	251	3.194.881.155,00
3:05:02	Alat Rumah Tangga	252	2.339.026.160,00
3:06:01	Alat Studio	14	350.928.000,00
3:06:02	Alat Komunikasi	8	28.800.000,00

3:06:03	Peralatan Pemancar	8	260.500.000,00
3:08:01	Unit Alat Laboratorium	6	49.128.000,00
3:09:02	Persenjataan Non Senjata Api	0	0,00
3:09:04	Alat Khusus Kepolisian	1	21.559.000,00
3:10:01	Komputer Unit	136	1.892.838.360,00
3:10:02	Peralatan Komputer	93	2.776.561.458,00
3:11:02	Alat Eksplorasi Geofisika	1	35.300.000,00
3:15:04	Alat Kerja Penerbangan	2	1.075.412.000,00
3:17:01	Unit Peralatan Proses/Produksi	2	14.900.000,00
3:19:01	Peralatan Olahraga	3	10.155.000,00
Total		783	12.970.567.913,00

- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp40.000.000,00 merupakan pengadaan jasa konsultan pengawas pengadaan *lift* di Gedung Warung Buncit dengan NUP 1 milik Pusat Jasa Kearsipan sesuai kuitansi nomor 037/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan SPM nomor 00267/267/2019 tanggal 16 Desember 2019. Pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas dengan kode belanja 532111 dicatat sebagai pengembangan langsung karena SP2D pengadaan *lift* tersebut terbit pada bulan November sedangkan SP2D jasa konsultan pengawas terbit pada bulan Desember sehingga menurut cara pencatatan aplikasi SIMAK BMN kegiatan tersebut dicatat sebagai pengembangan aset;
- Transfer Masuk dari Satker Arsip Nasional RI Jakarta kepada Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) Aceh sebesar Rp4.033.00,00 berupa *Finger Print Time and Attendance Acces Control System* dengan kode barang 3060207005 NUP 14 berdasarkan BAST Nomor PL.02.01/28/2019 tanggal 18 Februari 2019;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp12.748.767.756,00 berupa peralatan dan mesin yang terdapat di Gedung Arsip Kepresidenan Jalan Gajah Mada Jakarta Barat dengan nilai rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
Barang Intrakomptable		506	12.748.767.756
3.05.01	Alat Kantor	111	4.295.008.461
3.05.02	Alat Rumah Tangga	284	4.283.497.355
3.06.01	Alat Studio	49	2.138.912.380
3.06.03	Peralatan Pemancar	3	159.975.200
3.07.01	Alat Kedokteran	3	108.858.200
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	4	53.350.000
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	11	282.810.000
3.10.01	Komputer Unit	34	1.402.932.300
3.10.02	Peralatan Komputer	4	6.923.860
3.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	3	16.500.000
Total		506	12.748.767.756

(Keterangan: Alat Eksplorasi Geofisika adalah Converter)

Reklasifikasi masuk tersebut merupakan hasil pemisahan aset dari bentukan KDP gedung Arsip Kepresidenan. Sifat dari Reklasifikasi Masuk ini pada pencatatan aplikasi SIMAK adalah Koreksi Nilai/Kuantitas bukan sebagai Reklasifikasi Keluar. Hal ini terjadi karena bentuk perpindahan aset hanya merupakan pemisahan sebagian bukan pemisahan secara keseluruhan (penghapusan) sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai Reklasifikasi Keluar sebagaimana PMK No.181/PMK.06/2016 yang mendefinisikan Reklasifikasi Keluar sebagai transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru. Rincian perhitungan pemisahan aset adalah sebagai berikut :

Nilai Gedung sebelum Pemisahan Aset/reklasifikasi		61.701.751.159
Koreksi Nilai Kuantitas (Total Reklasifikasi Masuk)	25.134.790.286	
Nilai Aset Gedung		36.566.960.873
Nilai Gedung Setelah Pemisahan Aset		
Nilai Penyelesaian KDP Gedung NUP 23		60.294.862.259
Nilai Pengembangan Aset Melalui KDP		1.406.888.900
1. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin.	12.748.767.756	
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	9.351.067.002	
3. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	3.034.955.528	
Nilai Akhir Aset Tetap Gedung		36.566.960.873

Mutasi Kurang sebesar Rp840.959.825,00 berasal dari :

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp833.364.325,00 merupakan perubahan kondisi peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan (rusak) dan daam proses lelang oleh Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Penghentian Penggunaan Operasional Pemerintah Nomor BA-03/BU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 berupa 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda empat dan Berita Acara Penghentian Aset dari Penggunaann Nomor BA-04/BU/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 berupa 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor roda dua dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	833.364.325,00
3020101001	Sedan	1	523.850.000,00
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	167.245.500,00
3020103002	Pick Up	1	81.712.500,00
3020104001	Sepeda Motor	7	60.556.325,00

- Transfer Keluar dari Satker Arsip Nasional RI Jakarta kepada Balai Arsip

Statis dan Tsunami (BAST) Aceh sebesar Rp4.033.00,00 berupa *Finger Print Time and Attendance Acces Control System* dengan kode barang 3060207005 NUP 14 berdasarkan BAST Nomor PL.02.01/28/2019 tanggal 18 Februari 2019;

- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp3.562.500,00 merupakan hasil dari normalisasi aset berupa alat pemanas air (water heater) NUP 2, rak besi NUP 700 dan printer NUP 485 berdasarkan Nota Dinas No. BA.03/BU/XII.12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan hasil konsultasi dengan KPKNL Jakarta V. Normalisasi dilakukan karena adanya aset BMN yang sudah dihapuskan namun masih tercatat sebagai aset aktif sehingga diperlukan normalisasi agar aset tersebut sesuai dengan kondisinya.

Gedung dan Bangunan
Rp364.584.089.636,00

C.14 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp364.584.089.636,00 dan Rp232.559.835.154,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	232.559.835.154,00
Mutasi tambah:	165.921.203.768,00
Selisih Revaluasi Aset	35.739.614.896,00
133111 Gedung dan Bangunan	35.739.614.896,00
Penyelesaian dengan KDP	111.164.476.172,00
133111 Gedung dan Bangunan	111.164.476.172,00
Pengembangan dengan Nilai Aset	424.113.000,00
133111 Gedung dan Bangunan	424.113.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	15.035.800,00
133111 Gedung dan Bangunan	15.035.800,00
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	758.629.000,00
133111 Gedung dan Bangunan	758.629.000,00
Pengembangan Aset Melalui KDP	1.406.888.900,00
133111 Gedung dan Bangunan	1.406.888.900,00
Koreksi Kesalahan Input IP	14.054.035.000,00
133111 Gedung dan Bangunan	14.054.035.000,00
Koreksi Nilai Barang Berlebih	2.358.411.000,00
133111 Gedung dan Bangunan	2.358.411.000,00
Mutasi kurang:	(33.896.949.286,00)
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas	(25.134.790.286,00)
Koreksi Kesalahan Input IP	(8.617.815.000,00)
Koreksi Transfer Keluar atas 224	(144.344.000,00)
Saldo per 31 Desember 2019	364.584.089.636,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(30.986.612.256,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	333.597.477.380,00

Mutasi Tambah sebesar Rp165.921.203.768,00 berasal dari :

- Penyelesaian dengan KDP sebesar Rp111.164.476.172,00 merupakan penyelesaian bangunan gedung kantor permanen NUP KDP 33 menjadi aset tetap berupa Gedung Arsip Kepresidenan di Jalan Gajah Mada Jakarta Barat NUP 23 tanggal perolehan 31 Desember 2019 dan tanggal pembukuan 31 Desember 2019 sebesar Rp60.294.862.259,00 dan penyelesaian bangunan gedung kantor permanen NUP KDP 2 menjadi aset tetap Gedung Depo Arsip di Jalan Inspeksi Kr.Aceh Nanggroe Aceh Darussalam NUP 2 Tanggal perolehan 04 Desember 2019 sebesar Rp50.869.613.913,00. Nilai tersebut merupakan nilai pasca koreksi BPK atas temuan perjalanan dinas yang tidak memiliki esensi/keterkaitan dengan pembentukan aset. Berikut ini adalah rincian perjalanan dinas dari kedua aset tersebut yang telah dilakukan *take out* dari transaksi KDP.

Nilai Awal Penyelesaian KDP (Unaudited)		111.827.497.444
A. Gedung Arsip Kepresidenan	60.663.759.259	
B. Gedung Depo Arsip BAST	51.163.738.185	
Hasil Koreksi BPK		(663.021.272)
A. Gedung Arsip Kepresidenan		
1 Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (1 SPM)	(15.300.000)	
2 Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (11 SPM)	(58.650.000)	
3 Koreksi saldo atas belanja jasa profesi yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (2 SPM)	(11.900.000)	
4 Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (7 SPM)	(121.725.000)	
5 Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (18 SPM)	(102.540.000)	
6 Koreksi saldo atas belanja bahan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (4 SPM)	(28.152.000)	
7 Koreksi saldo atas belanja Honor Output Kegiatan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (5 SPM)	(30.630.000)	
B. Gedung Depo Arsip BAST		
1 Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (15 SPM)	(196.319.272)	
2 Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (2 SPM)	(22.800.000)	
3 Koreksi saldo atas belanja bahan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (5 SPM)	(56.415.000)	
4 Koreksi saldo atas belanja Honor Output Kegiatan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan (3 SPM)	(18.590.000)	
Nilai Akhir Penyelesaian KDP (Audited)		111.164.476.172

- Pengembangan Nilai Aset yang merupakan kapitalisasi atas pekerjaan sebesar Rp424.113.000,00 dengan rincian :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
04.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	424.113.000,00
	Gedung Garasi <i>Pool</i> Parkir Permanen		29.601.000,00
	Selasar Gedung O		197.314.000,00
	Selasar Gedung G		197.198.000,00
Total		0	424.113.000,00

Pengembangan Nilai Aset merupakan kapitalisasi pekerjaan :

1. Gedung garasi/pool permanen dengan No.SP2D 191391301003752 tanggal 27 Februari 2019 senilai Rp29.601.000,00;
 2. Pembuatan laboratorium Gedung O lantai 1 NUP 11 dengan No.SP2D 191391303066750 tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp197.314.000,00;
 3. Pembuatan selasar Gedung G dengan NO.SP2D 191391302102200 tanggal 23 Desember 2019 senilai Rp197.198.000,00.
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp15.035.800,00 merupakan koreksi nilai KDP dari ANRI Jakarta ke BAST terkait pembangunan pagar permanen NUP 1 (telah menjadi aset definitif);
 - Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventaris sebesar Rp758.629.000,00 berasal dari Transaksi SIMAK BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Pagar Permanen NUP 3 dengan koreksi nilai wajar senilai Rp758.629.000,00 Nomor: LHIP-038/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019;
 - Pengembangan Aset melalui KDP sebesar Rp1.406.888.900,00 merupakan pengembangan terhadap gedung Arsip Kepresidenan di Jalan Gajah Mada Jakarta Barat yang merupakan nilai perolehan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai rincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	NUP KDP	KODE BELANJA	KETERANGAN	NO.SP2D	TGL SP2D	NILAI SP2D
1	2015	29	53312	Perolehan KDP Pra Perencana Gajah Mada	151391301043960	23/12/2015	34,320,000
2	2016	29	53312	JKPR Term II	161391302055055	01/12/2016	278,250,000
		29	53312	JKPR Term III	161391302064385	19/12/2016	278,250,000

		29	53312	JKPR Term IV	161391302067878	27/12/2016	278,250,000
3	2016	29	53312	Honor Pokja	161391302038757	04/10/2016	3,600,000
4	2016	29	53312	JKPR GM	161391302044702	26/10/2020	92,750,000
5	2017	29	53312	Perjadin Pokja GM	171391302040080	14/08/2017	7,119,900
6	2017	29	53312	UKL UPL GM	171391303044961	21/12/2017	49,995,000
7	2017	29	53312	Pengawas GM	171391302088684	27/12/2017	288,400,000
8	2017	29	53312	Perjadin Evaluasi	171391302040805	15/08/2017	13,650,000
9	2017	29	53312	Honor Pokja GM	171391302041758	21/08/2017	10,600,000
10	2017	29	53312	Honor Pokja JKP GM	171391302043091	24/08/2017	3,000,000
11	2017	29	53312	Rapat Fullboard	17139130103092	11/09/2017	18,720,000
12	2017	29	53312	Amdal GM	171391302087061	21/12/2017	49,984,000
Total							1,406,888,900

Pada pencatatan awal aset dicatat sebagai NUP 29, dikarenakan adanya missed perception antara operator SIMAK dengan unit kerja pembangunan gedung namun pada tahun 2019 aset tersebut sudah dijadikan sebagai penambah nilai Gedung Arsip Kepresidenan NUP 33 dengan metode pencatatan pengembangan aset melalui KDP. Rincian KDP ANRI tahun 2019 terlampir dalam sajian.

- Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp14.054.035.000,00 berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Gedung dan Bangunan antara lain :

Bangunan Gedung Kantor Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	3.574.028.825	398.830.000	LHIP-81/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17	18.225.151	2.226.904.000	LHIP-812/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.478.646.000	289.199.000	LHIP-815/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	3.125.166.000	1.955.252.000	LHIP-815/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	409.490.926	419.218.000	LHIP-818/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
6	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	118.280.824	62.542.000	LHIP-818/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
7	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	738.829.419	1.722.563.000	LHIP-820/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
8	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.969.342.946	2.161.174.000	LHIP-820/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
9	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	305.467.668	112.923.000	LHIP-820/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
10	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	13.793.723.032	1.101.749.000	LHIP-820/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				27.531.200.791	10.450.354.000		

Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	876.692.910	898.304.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				876.692.910	898.304.000		

Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2	-929.860.048	6.690.000	LHIP-817/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	10	88.479.430	92.018.000	LHIP-817/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
3	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	11	-137.281.045	5.428.000	LHIP-817/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
4	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12	-1.231.664.374	364.732.000	LHIP-817/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
5	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	-484.622.266	100.729.000	LHIP-822/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
6	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4	91.744.996	160.739.000	LHIP-822/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
7	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	7	1.034.117.322	419.115.000	LHIP-822/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
8	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	9	-40.640.656	2.575.000	LHIP-823/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
9	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	5	5.021.183	30.660.000	LHIP-824/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
10	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	8	186.795.076	181.843.000	LHIP-824/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				-1.417.910.382	1.364.529.000		

Gedung Pos Jaga Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	2	-3.790.975	585.000	LHIP-812/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	17.183.200	65.468.000	LHIP-815/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				13.392.225	66.053.000		

Gedung Garasi/Pool Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	-745.711.944	286.488.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				-745.711.944	286.488.000		

Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2	250.026.455	230.827.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				250.026.455	230.827.000		

Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	99.998.046	182.680.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2	112.183.682	179.037.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				212.181.728	361.717.000		

Pagar Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4040104001	Pagar Permanen	1	156.777.569	50.758.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				156.777.569	50.758.000		

- Koreksi Nilai Barang Berlebih sebesar Rp2.358.411.000,00 berasal dari transaksi SIMAK BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 antara lain :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian		Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Nilai Wajar	Koreksi Nilai Wajar	245	Nomor	Tanggal
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	256.549.000	101.259.000	101.259.000	LHIP-814/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	19	249.637.000	98.915.000	98.915.000	LHIP-814/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20	3.314.664.000	2.158.237.000	2.158.237.000	LHIP-814/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				3.820.850.000	2.358.411.000	2.358.411.000		

Mutasi Kurang sebesar Rp33.896.949.286,00 berasal dari :

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas sebesar Rp25.134.790.286,00 merupakan hasil pemisahan aset Gedung Arsip Kepresidenan dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 23 di Jalan Gajah Mada, hal ini dikarenakan dalam pembentukan gedung tersebut terdapat aset peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud yang menggunakan akun belanja yang sama 533111. (Daftar pemisahan aset terlampir);

Nilai Gedung Setelah Pemisahan Aset		
Nilai Penyelesaian KDP Gedung NUP 23		60.294.862.259
Nilai Pengembangan Aset Melalui KDP		1.406.888.900
1. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin.	12.748.767.756	
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	9.351.067.002	
3. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	3.034.955.528	
Nilai Akhir Aset Tetap Gedung		36.566.960.873

- Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp8.617.815.000,00 memiliki rincian sebagai berikut :

No.	Kode Barang	Jenis Transaksi	Nama Jenis Transaksi	Nilai Koreksi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(590.161.000,00)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(6.079.000,00)
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(3.630.385.000,00)
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(3.596.941.000,00)
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(204.000,00)
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(80.325.000,00)
7	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(599,933,000)
8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	225	Koreksi Kesalahan input IP	(104,737,000)
9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (WC Pusdiklat	225	Koreksi Kesalahan input IP	(9,050,000)
Nilai Total Koreksi				(8.617.815.000,00)

Koreksi Kesalahan Input IP berasal dari transaksi SIMAK BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Gedung dan Bangunan antara lain :

Bangunan Gedung Kantor Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	16.384.286.791	-3.596.941.000	LHIP-812/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13	-72.232.418	-204.000	LHIP-818/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15	-172.018.315	-80.325.000	LHIP-818/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	5.052.011.828	-590.161.000	LHIP-820/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	20.936.623.325	-6.079.000	LHIP-820/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
6	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	19.893.551.592	-3.630.385.000	LHIP-820/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				62.022.222.803	-7.904.095.000		

Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	3	43.566.479	-104.737.000	LHIP-822/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	6	14.417.122	-9.050.000	LHIP-822/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				57.983.601	-113.787.000		

Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	450.462.313	-494.010.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	3	78.357.512	-105.923.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				528.819.825	-599.933.000		

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp144.344.000,00 merupakan koreksi hasil penilaian kembali BMN, dimana terdapat kesalahan tanggal pencatatan dan sebelumnya kesalahan kodifikasi di aplikasi simak BMN sehingga hasil revaluasi termasuk barang tidak ditemukan Pagar Permanen NUP 2 (LHIP-825/REV/WKN.7/KNL.05/2019) diperbaiki di aplikasi siman menjadi barang berlebih berupa Pagar Permanen NUP 3 (LHIP-038/REV/WKN.7/KNL.05/2019).

Daftar Gedung dan Bangunan ANRI Tahun 2019

No.	Nama Gedung dan Bangunan	Alamat	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)
1	Gedung Utama Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,478,646,000
2	Gedung Depo Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,125,166,000
3	Gedung E	JL. Ampera Raya	Jakarta	11,804,508,000
4	Gedung A	JL. Ampera Raya	Jakarta	10,938,073,000
5	Gedung B	JL. Ampera Raya	Jakarta	6,512,921,000
6	Gedung D	JL. Ampera Raya	Jakarta	5,195,532,000
7	Gedung J	JL. Ampera Raya	Jakarta	380,780,000
8	Gedung F	JL. Ampera Raya	Jakarta	23,136,716,000
9	Gedung G	JL. Ampera Raya	Jakarta	44,949,647,000
10	Gedung C	JL. Ampera Raya	Jakarta	47,777,626,000
11	Gedung O	JL. Ampera Raya	Jakarta	39,515,175,750
12	Gedung I	JL. Ampera Raya	Jakarta	2,070,508,000
13	Selasar Penghubung Gd. O dan Gd. F	JL. Ampera Raya	Jakarta	48,360,000
14	Selasar Penghubung Pusdiklat ANRI	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	140,244,000
15	Gedung Inventaris	JL. Ampera Raya	Jakarta	1,453,711,000
16	Gedung P	JL. Ampera Raya	Jakarta	24,597,024,600
17	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	256,549,000
18	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	249,637,000
19	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,314,664,000
20	Gedung Buncit KPK	JL.Warung Buncit Raya	Jakarta	24,737,064,000
21	Gedung H	JL. Ampera Raya	Jakarta	1,562,853,000
22	Gedung Kelas Utama Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	527,113,000
23	Gedung Laboratorium Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	433,074,000
24	Kantor Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	425,822,000
25	Asrama 1 Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	1,295,545,000
26	Ground Reservoir Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	103,658,000
27	WC Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	45,249,000
28	Asrama 2 Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	1,716,036,000
29	Wisma Janus Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	516,188,000
30	Pos Jaga	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	6,955,000
31	Pos Jaga	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	96,398,000
32	Hydrant Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	17,108,000
33	Gedung Kantor Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	2,772,878,000
34	Pos Jaga	JL. Ampera Raya	Jakarta	97,412,000
35	Pos Jaga Rumah Negara	JL. Ampera Raya	Jakarta	6,575,000
36	Gedung Parkir/pool permanen	JL. Ampera Raya	Jakarta	418,613,000
37	Gapura Kanan	JL. Ampera Raya	Jakarta	215,704,000
38	Gapura Kiri	JL. Ampera Raya	Jakarta	212,978,000
39	Pagar Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	331,924,000
40	Rumah Dinas Kepala ANRI	JL. Ampera Raya	Jakarta	704,919,000
41	Rumah Dinas Deputi Pembinaan	JL. Ampera Raya	Jakarta	504,868,000
42	Rumah Dinas Deputi Konservasi	JL. Ampera Raya	Jakarta	484,553,500
43	Bangunan Genset Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	2,714,000
44	Bangunan Pos Jaga Darurat	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,202,000
45	Gedung Arsip Kepresidenan	JL. Gajah Mada	Jakarta	36,566,960,873
46	Pagar (koreksi Reval)	Jl. Gajah Mada	Jakarta	758,629,000
47	Gedung Depo Arsip BAST	Jl. Bakoi	Aceh	50,869,613,913
48	Gedung Kantor BAST	Jl. Teuku Umar	Aceh	9,192,984,000
49	Pagar Permanen Aceh	Jl. Teuku Umar	Aceh	1,016,926,000
Total				364,590,005,636

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp62.881.974.526,00

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp62.881.974.526,00 dan Rp11.741.372.797,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	11.741.372.797,00
Mutasi tambah:	52.347.358.000,00
Koreksi Kesalahan Input IP	52.092.945.000,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	50.723.369,00
Koreksi Kesalahan Input IP	135.729.000,00
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang Tidak Ditemukan	67.960.631,00
Mutasi kurang:	1.206.756.271,00
Selisih Revaluasi Aset	1.072.063.271,00
Koreksi Kesalahan Input IP	12.340.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	122.353.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	62.881.974.526,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(25.494.023.715,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	37.387.950.811,00

Mutasi tambah sebesar Rp52.347.358.000,00 berasal dari :

- Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp52.092.945.000,00 berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Jalan Khusus Kompleks antara lain :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi Simak BMN	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	225	Nomor	Tanggal
1	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	3	173.678.000	75.413.000	LHIP-811/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	1	15.711.036.000	15.688.373.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
3	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	2	36.353.813.000	36.241.487.000	LHIP-816/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
4	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	4	172.634.917	87.672.000	LHIP-821/REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				52.411.161.917	52.092.945.000		

- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar Rp50.723.369,00 berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Bak Sumur Artetis NUP 2 dengan Total Koreksi senilai Rp-71.629.631,00 Nomor: LHIP-813/REV/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019.
- Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp135.729.000,00 berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Bak Penyimpanan/Tower Air BakuNUP 1 dengan koreksi nilai wajar senilai Rp.151.081.000,00 Nomor: LHIP-811/REV/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019.
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan sebesar Rp67.960.631,00 berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN

tahun 2019 berupa Bak Sumur Artetis NUP 2 dengan Total Koreksi senilai Rp-71.629.631,00 Nomor: LHIP-813/REV/WKN.7/KNL.05/2019 Tanggal : 20 November 2019.

Mutasi kurang sebesar Rp1.206.756.271,00 berasal dari :

- Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp12.340.000,00 berasal dari Transaksi Simak BMN hasil revaluasi BMN tahun 2019 berupa Jalan Khusus Kompleks antara lain :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Hasil Penilaian	Transaksi	LHIP	
				Koreksi Nilai Wajar	Simak BMN	Nomor	Tanggal
1	5020704001	Bangunan Pompa Air Hujan	1	-150.874.400	-6.452.000	LHIP-811 /REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
2	5020502002	Sumur Artetis	1	2.156.000	-596.000	LHIP-812 /REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
3	5020502002	Sumur Artetis	3	-256.664.403	-5.292.000	LHIP-812 /REV/WKN.7/KNL.05/2019	20-Nov-19
JUMLAH				-405.382.803	-12.340.000		

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp122.353.000,00 berupa Sumur Artesis NUP 2 tindak lanjut mengenai barang yang tidak ditemukan berdasarkan Surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan Nomor S-59/PB.6/2020 tentang permintaan tanggapan dari temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2019.

Aset Tetap Lainnya
Rp26.865.394.160,00

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp26.865.394.160,00 dan Rp15.627.955.878,00. Terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp 15.627.955.878,00
Mutasi tambah:	Rp 11.237.438.282,00
Pembelian	Rp 752.971.280,00
135121 Aset Tetap Lainnya	Rp 752.971.280,00
Pengembangan	Rp 1.133.400.000,00
536111 Belanja Modal Lainnya	Rp 1.133.400.000,00
Reklasifikasi Masuk	Rp 9.351.067.002,00
536111 Belanja Modal Lainnya	Rp 9.351.067.002,00
Mutasi kurang:	Rp -
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2019	Rp 26.865.394.160,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp (60.483.100,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp 26.804.911.060,00

Mutasi Tambah sebesar Rp11.237.438.282,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian sebesar Rp752.971.280,00 merupakan perolehan yang berasal dari Belanja Modal Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	10	13,477,530.00
6.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	4	739,493,750.00
Total		14.00	752,971,280.00

Pembelian Aset Tetap Lain di antaranya : Rp.739.493.750

Video *Graphic* Materi Aturan Arsip Statis Rp. 88.000.000

Digitalisasi Buku *Antiquariat* Rp. 52.915.000

Alih Media Arsip Video BCN2 *inch* ke Digital Rp.573.595.000

Alih Media Arsip Kertas, Foto ke Digital Rp. 24.983.750

Referensi (buku): Rp.13.477.530

Managing Electronic Record 4th Edition Rp. 1.433.835

Planning&Implementing Electronic Record Management Rp. 2.091.150

Managing Electronic Records, Robert Smallwood Rp. 2.155.545

Digital Memory And The Archive Rp. 442.146

The Digital Archives Handbook Rp. 1.146.831

Archives In The Digital Age Rp. 1.308.023

Total Information Risk Management Rp. 937.574

The Theoryand Practice Of Change Management Rp. 1.462.426

Digital Eco System Rp. 1.658.047

Effective Approaches For Managing Rp. 841.953

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP
Merupakan perolehan yang berasal dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.133.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	362,520,000.00
6.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1	770,880,000.00
Total		2.00	1,133,400,000.00

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terbagi ke dalam 2 NUP yaitu NSPK Arsitektur Pemerintah Kodefikasi Referensi 6010101002 NUP 1038 sebesar Rp362.520.000,00 dan Alih Media Arsip Kertas/Foto Kodefikasi CD/DVD 6010201003 NUP 291 sebesar Rp770.880.000,00.

- Reklasifikasi Masuk

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp9.351.067.002,00 berupa Aset Tetap Lainnya yang terdapat di Gedung Arsip Kepresidenan Jalan Gajah Mada Jakarta Barat berasal dari hasil koreksi KDP Gedung Arsip Kepresidenan.

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
6.01.01	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	18	7.812.062.502,00
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	1	33.000.000,00
6.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	14	1.506.004.500,00
Total		33,00	9.351.067.002,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp28.583.355.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp 28.583.355.350,00
Mutasi tambah:	Rp 85.136.445.522,00
Perolehan KDP	Rp 530.448.000,00
Alih Media Arsip ke Digital	Rp 385.440.000,00
NSPK Sistem Pemerintahan	Rp 145.008.000,00
Pengembangan KDP	Rp 84.605.997.522,00
Alih Media Arsip ke Digital	Rp 385.440.000,00
NSPK Sistem Pemerintahan	Rp 217.512.000,00
Gedung Arsip Presiden	Rp 34.420.903.609,00
Gedung Depo Arsip BAST	Rp 49.582.141.913,00
Mutasi kurang:	Rp 113.719.800.872,00
Penghentian/Penghapusan KDP	Rp 15.035.800,00
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Definitif	Rp 113.704.765.072,00
Alih Media Arsip ke Digital	Rp 770.880.000,00
NSPK Sistem Pemerintahan	Rp 362.520.000,00
Gedung Arsip Presiden	Rp 61.701.751.159,00
Gedung Depo Arsip BAST	Rp 50.869.613.913,00
Saldo per 31 Desember 2019	Rp -
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp -

Mutasi Tambah sebesar Rp85.136.445.522,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Perolehan/Penambahan KDP yang berasal dari Alih Media Arsip ke Digital sebesar Rp385.440.000,00 dan NSPK Sistem Pemerintahan sebesar Rp145.008.000,00
- Pengembangan KDP berupa Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas pengerjaan Gedung Arsip Kepresidenan di Gedung Arsip Gajah Mada sebesar Rp34.420.903.609,00 dan Gedung Depo Arsip Aceh di Balai Arsip Statis dan Tsunami sebesar Rp49.582.141.913,00, sedangkan Belanja Modal Lainnya merupakan alih media arsip kertas, foto dan video ke digital sebesar Rp385.440.000,00 dan NSPK Sistem Pemerintahan sebesar Rp217.512.000,00.

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		PENAMBAHAN
450448	ARSIP NASIONAL RI JAKARTA	35.023.855.609,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.420.903.609,00
536111	Belanja Modal Lainnya	602.952.000,00
681464	BAST ACEH	49.582.141.913,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.582.141.913,00
Total		84.605.997.522,00

Mutasi Kurang sebesar Rp113.719.800.872,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penghentian/Penghapusan KDP sebesar Rp15.035.800,00 yang berasal dari biaya yang terbentuk dari perjalanan dinas ke Aceh dalam rangka Konstruksi Pagar di Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh pada tahun 2015 yang pekerjaannya telah selesai pada tahun 2016 sehingga dilakukan penghapusan dari KDP ANRI Jakarta dan akan di input sebagai koreksi nilai di Balai Arsip dan Tsunami Aceh sesuai dengan Nota Dinas No. PL.02.02/19.C/2019.

- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi sebesar Rp113.704.765.072,00 memiliki rincian sebagai berikut:

Gedung Arsip Gajah Mada (2015 s.d. 2019)	Rp61.701.751.159,00
Gedung Depo Arsip BAST	Rp50.869.613.913,00
Alih Media Arsip Digital	Rp 770.880.000,00
NSPK Sistem Pemerintahan	Rp 362.520.000,00

- KDP yang telah menjadi aset definitif yaitu Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		PENGURANGAN
450448	ARSIP NASIONAL RI JAKARTA	62.835.151.159,00
136111	Penyelesaian KDP Gedung Gajah Mada	61.701.751.159,00
136111	CD/DVD/VCD/LO Alih Media Arsip Kertas, Foto Dan Video Ke Digital	770.880.000,00
136111	NSPK Sistem Pemerintahan	362.520.000,00
450448	ARSIP NASIONAL RI JAKARTA	50.869.613.913,00
136111	Penyelesaian KDP	50.869.613.913,00
Total		113.704.765.072,00

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

Rp239.264.549.709,00

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp239.264.549.709,00 dan sebesar Rp234.088.461.227,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	221.057.763.568,00	182.723.430.638,00	38.334.332.930,00
2	Gedung dan Bangunan	364.584.089.636,00	30.986.612.256,00	333.597.477.380,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.004.327.526,00	25.494.023.715,00	37.510.303.811,00
	Jalan dan Jembatan	52.918.334.000,00	20.313.147.363,00	32.605.186.637,00
	Irigasi	280.490.000,00	14.492.290,00	265.997.710,00
	Jaringan	9.805.503.526,00	5.166.384.062,00	4.639.119.464,00
4	Aset Tetap Lainnya	26.865.394.160,00	60.483.100,00	26.804.911.060,00
Total		675.511.574.890,00	239.264.549.709,00	436.247.025.181,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2019 terdapat penambahan penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp12.204.294.165,00; Gedung dan Bangunan senilai Rp8.681.041.246,00; dan Jalan, Jembatan, Irigasi dan jaringan senilai Rp20.247.346.108,00; Penambahan Penyusutan dari Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp41.132.681.519,00 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Awal (Rp)	Penyusutan Tahun 2019 (Rp)	Koreksi Nilai (Rp)	Penghentian Aset dari Penggunaan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Akhir (Rp)
1	Peralatan & Mesin	170.519.136.473,00	12.850.709.903,00	(646.415.738)	-	182.723.430.638,00
2	Gedung & Bangunan	22.305.571.010,00	12.919.262.666,00	(4.238.221.420)	-	30.986.612.256,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.246.677.607,00	8.346.035.765	11.901.310.343	-	25.494.023.715,00
	Jalan & Jembatan	280.460.048,00	8.133.599.956,00	11.899.087.359	-	20.313.147.363,00
	Irigasi	2.702.409,00	9.566.897,00	2.222.984	-	14.492.290,00
	Jaringan	4.963.515.150,00	202.868.912,00	-	-	5.166.384.062,00
4	Aset Tetap Lainnya	60.483.100,00	-	-	-	60.483.100,00
Jumlah		198.131.868.190,00	34.116.008.334,00	7.016.673.185,00	-	239.264.549.709,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp182.723.430.638,00 memiliki nilai rincian :

No	Kelompok Barang	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Barang Intrakomptable		170.519.136.473	12.850.709.903	(646.415.738)	182.723.430.638
3.01.03	Alat Bantu	7.421.759.102	67.447.127	-	7.489.206.229
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	13.986.548.953	955.250.417	(646.275.038)	14.295.524.332
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	88.011.326	6.037.500	-	94.048.826
3.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	-	416.475	-	416.475
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	24.208.307	1.621.426	-	25.829.733
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	129.607.164	27.563.723	-	157.170.887
3.03.03	Alat Ukur	462.977.750	61.098.100	-	524.075.850
3.04.01	Alat Pengolahan	20.112.780	4.725.114	-	24.837.894
3.05.01	Alat Kantor	47.470.852.110	1.566.914.839	-	49.037.766.949
3.05.02	Alat Rumah Tangga	29.568.510.277	1.350.112.497	-	30.918.622.774
3.06.01	Alat Studio	19.424.562.930	796.502.809	(703.200)	20.220.362.539
3.06.02	Alat Komunikasi	650.767.760	36.008.700	-	686.776.460
3.06.03	Peralatan Pemancar	5.913.783.447	124.959.020	-	6.038.742.467
3.07.01	Alat Kedokteran	161.091.781	39.881.520	-	200.973.301
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	2.193.347.014	158.541.169	-	2.351.888.183
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30.647.494	4.937.668	-	35.585.162
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	6.812.662.622	649.143.994	-	7.461.806.616
3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	31.760.854	9.836.860	-	41.597.714
3.08.07	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	449.120.200	45.508.910	-	494.629.110
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	5.212.200	15.333.300	-	20.545.500
3.09.01	Senjata Api	1.444.800.000	-	-	1.444.800.000
3.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	11.420.000	2.700.000	-	14.120.000
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	282.130.463	39.329.675	-	321.460.138
3.10.01	Komputer Unit	12.183.127.191	1.752.453.386	-	13.935.580.577
3.10.02	Peralatan Komputer	20.972.154.190	4.942.864.231	(3.562.500)	25.911.455.921
3.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	4.365.000	840.000	-	5.205.000
3.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	-	3.415.000	4.125.000	7.540.000
3.15.01	Alat Deteksi	29.268.000	3.252.000	-	32.520.000
3.15.02	Alat Pelindung	15.180.000	6.072.000	-	21.252.000
3.15.03	Alat SAR	13.000.000	1.000.000	-	14.000.000
3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	396.396.018	125.852.787	-	522.248.805
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	208.985.063	39.045.283	-	248.030.346
3.19.01	Peralatan Olahraga	112.766.477	12.044.373	-	124.810.850
Total		170.519.136.473	12.850.709.903	(646.415.738)	182.723.430.638

- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.986.612.256,00 memiliki nilai rincian :

No	Kelompok Barang	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Barang Intrakomptable		22.305.571.010	12.919.262.666	(4.238.221.420)	30.986.612.256
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.886.835.131	12.682.135.790	(4.191.905.775)	30.377.065.146
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	325.807.342	178.351.632	(58.279.894)	445.879.080
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	92.928.537	58.775.244	11.964.249	163.668.030
Total		22.305.571.010	12.919.262.666	(4.238.221.420)	30.986.612.256

- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp25.494.023.715,00 memiliki nilai rincian :

No	Kelompok Barang	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Barang Intrakomtable		280.460.048	8.133.599.956	11.899.087.359	25.494.023.715
5.01.01	Jalan	280.460.048	8.133.599.956	11.899.087.359	20.313.147.363
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	1.447.731	4.062.203	(4.779.379)	730.555
5.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	876.054	5.431.500	7.271.196	13.578.750
5.02.07	Bangunan Air Kotor	378.624	73.194	(268.833)	182.985
5.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	222.856.173	17.170.768	-	240.026.941
5.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	469.612.000	72.248.000	-	541.860.000
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	1.126.132.254	17.197.053	-	1.143.329.307
5.03.09	Instalasi Pengaman	25.728.250	2.437.500	-	28.165.750
5.03.10	Instalasi Lain	2.287.748.984	-	-	2.287.748.984
5.04.02	Jaringan Listrik	603.932.785	66.292.678	-	670.225.463
5.04.02	Jaringan Telepon	227.504.704	27.522.913	-	255.027.617
Total		280.460.048	8.133.599.956	11.899.087.359	25.494.023.715

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp60.483.100,00 memiliki nilai rincian :

No	Uraian	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	AK Penyusutan Periode ini	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Aset Tetap Lainnya		60.483.100	-	-	60.483.100
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	60.483.100	-	-	60.483.100
Total		60.483.100	-	-	60.483.100

Aset Tak Berwujud
Rp15.970.656.383,00

C.19 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp15.970.656.363,00 dan Rp11.520.424.655,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software Komputer	15.970.656.383,00
2	ATB Lainnya	0,00
Jumlah Nilai Perolehan per 30 September 2019		15.970.656.383,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp 11.520.424.655,00
Mutasi tambah:	Rp 4.515.197.728,00
Pembelian	Rp 1.187.048.200,00
136111 Software	Rp 1.187.048.200,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 228.228.000,00
136111 Software	Rp 228.228.000,00
Reklasifikasi Masuk	Rp 3.099.921.528,00
136111 Software	Rp 3.034.955.528,00
136111 Software	Rp 64.966.000,00
Mutasi kurang:	Rp 64.966.000,00
Normalisasi ATB	Rp 64.966.000,00
Koreksi Pencatatan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2019	Rp 15.970.656.383,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp (10.150.466.033,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp 5.820.190.350,00

Mutasi Tambah senilai Rp4.515.197.728,00 berasal dari :

- Pembelian *Software* Komputer seharga Rp1.187.048.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
08.01.01	Software	133	1.187.048.200,00
1	Microsoft Exchange Standard	45	65.565.000,00
2	MIC. WIN 10 Profesional	21	67.410.000,00
3	MIC WIN SVR CAL 2019 GOV	5	2.875.000,00
4	MIC WIN SVR STD CORE 2019	16	27.520.000,00
5	MICR. EXCHANGE SERVER ENTERPRS 2019	1	62.053.200,00
6	CAL FOR EXCHANGE SERVER ENT 2019	45	40.500.000,00
7	APLIKASI PENGUMPULAN DATA	1	49.038.000,00
8	SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	1	115.000.000,00
9	MICROSOFT WIN SVR	16	27.520.000,00
10	APLIKASI WEBSITE KELEMBAGAAN	1	94.204.000,00
11	WIKI PUSAT SIKN JIKN	1	44.500.000,00
12	TUTORIAL APLIKASI SIKN	1	48.500.000,00
13	CLOUD COMPUTING SIKN JIKN	1	49.000.000,00
14	APLIKASI SIKD VERSI MOBILE	1	98.494.000,00
15	IMPLEMENTASI SSO, AD, EXCHANGE	1	92.125.000,00
16	APLIKASI PAMERAN VIRTUAL	1	49.000.000,00
17	SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	3	60.000.000,00
18	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY	10	10.400.000,00
19	MIC WINDOWS 10 PRO	30	95.634.000,00
20	APLIKASI SDM MODUL I	1	20.372.000,00
21	APLIKASI SDM MODUL II	1	48.488.000,00
22	PORTAL ANRI	1	18.850.000,00
Total		133	1.187.048.200,00

- Pengembangan Nilai Aset seharga Rp228.228.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
08.01.01	Software	3	228.228.000,00
1	Aplikasi SIKD	1	98.604.000,00
2	SIAP	1	49.016.000,00
3	Aplikasi E-Depot	1	80.608.000,00
Total		3	228.228.000,00

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.034.955.528,00 berupa *software*

yang terdapat di Gedung Arsip Kepresidenan Jalan Gajah Mada Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Jenis Barang	Nama Barang	Tahun Anggaran	Harga Satuan	Total Harga	NUP
8010101001	Software Komputer	Sistem Otomatisasi	2019	1.375.000.000	Rp1.375.000.000	968
8010101001	Software Komputer	Sistem Otomatisasi	2019	495.000.000	Rp990.000.000	969-970
8010101001	Software Komputer	Sistem Otomatisasi	2019	496.018.028	Rp496.018.028	970
8010101001	Software Komputer	Sistem Otomatisasi	2019	173.937.500	Rp173.937.500	971
JUMLAH					Rp3.034.955.528	

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp64.966.000,00 berupa *software* yang terdapat di BAST merk RECIS NUP 3 dan Portal ANRI NUP 4 dilakukan karena SIMAK pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak dapat mengakomodasi amortisasi kedua *software* tersebut. Perubahan NUP merupakan salah satu cara agar ATB tersebut memiliki kesesuaian antara nilai buku dan penyusutan pada tahun 2019 akibat adanya NUP yang “tidak normal” dengan indikasi tidak adanya amortisasi, sehingga harus dilakukan proses normalisasi agar aset tersebut memiliki nilai yang valid berkaitan dengan amortisasinya.

Mutasi Kurang senilai Rp64.966.000,00 berasal dari :

- Normalisasi Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *software* yang terdapat di BAST merk RECIS NUP 1 dan Portal ANRI NUP 2. Normalisasi dilakukan dalam rangka menyesuaikan nilai amortisasi SAIBA dengan e-Rekon BAST sehingga terbentuk jurnal BMN.

Aset Lain-Lain

Rp5.719.311.911,00

C.20 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp5.719.311.911,00 dan Rp7.254.929.769,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan. Adapun mutasi aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		Rp 7.254.929.769,00
Mutasi tambah:		Rp 959.279.825,00
Reklasifikasi		Rp 955.717.325,00
132111	Peralatan dan Mesin	Rp 955.717.325,00
Normalisasi Aset Tetap		Rp 3.562.500,00
132111	Peralatan dan Mesin	Rp 3.562.500,00
Mutasi kurang:		Rp 2.494.897.683,00
Penghapusan		Rp 2.494.897.683,00
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp 2.494.897.683,00
Saldo per 31 Desember 2019		Rp 5.719.311.911,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019		Rp (5.484.705.339,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2019		Rp 234.606.572,00

Mutasi Tambah senilai Rp959.279.825,00 berasal dari :

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp833.364.325,00 berupa penghentian aset dari penggunaan berdasarkan Berita Acara Penghentian Penggunaan Operasional Pemerintah Nomor BA-03/BU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 berupa 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda empat, Nomor BA-04/BU/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 berupa 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor roda dua, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	833.364.325,00
Total		11	833.364.325,00

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp122.353.000,00 berupa penghentian aset dari penggunaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah berdasarkan Berita Acara Penghentian Aset dari Penggunaan Nomor BA-08/BU/IV/2019 tanggal 27 April 2020 berupa sumur artesis NUP 2.

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1	122.353.000,00
Total		1	122.353.000,00

- Normalisasi Aset Tetap sebesar Rp3.562.500,00 merupakan hasil dari normalisasi aset berupa alat pemanas air (water heater) NUP 2, rak besi NUP 700 dan printer NUP 485 berdasarkan Nota Dinas No.BA.03/BU/XII.12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan hasil konsultasi dengan KPKNL Jakarta V, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
03.10.02	Peralatan Komputer	1	3.562.500,00
Total		1	3.562.500,00

Mutasi Kurang senilai Rp2.494.897.683,00 berasal dari :

- Penghapusan BMN berupa 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor dengan tindak lanjut penjualan berdasarkan SK Penghapusan BMN Nomor 279 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan 2 (dua) unit *microbus* berdasarkan SK Penghapusan BMN Nomor 106A Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019. Penghapusan BMN memiliki rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8,00	571.209.000,00
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3,00	2.963.982,00
3.05.01	Alat Kantor	115	158.637.625,00
3.05.02	Alat Rumah Tangga	211	277.552.399,00
3.06.01	Alat Studio	1	7.032.000,00
3.06.02	Alat Komunikasi	1	1.990.579,00
3.10.01	Komputer Unit	80	1.331.083.830,00
3.10.02	Peralatan Komputer	13	47.892.699,00
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	490	96.535.569,00
Total		914	2.494.897.683,00

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp15.704.744.645,00

C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15.704.744.645,00 dan Rp16.182.419.882,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
A Aset Tak Berwujud				
1	Software Komputer	15.970.656.383,00	(10.150.466.033,00)	5.820.190.350,00
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		15.970.656.383,00	(10.150.466.033,00)	5.820.190.350,00
B Aset Lain-lain				
Jumlah		5.719.311.911,00	(5.554.278.612,00)	165.033.299,00
Total		21.689.968.294,00	(15.704.744.645,00)	5.985.223.649,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud selama Tahun 2019 sebesar Rp10.150.466.033,00 terdapat penambahan yang berasal dari Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud Sebesar Rp1.427.540.743,00 dan

pengurangan yang berasal dari koreksi sebesar Rp370.169.942,00 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Software		9.093.095.232	1.427.540.743	(370.169.942)	10.150.466.033
8.01.01	Aset Tak Berwujud	9.093.095.232	1.427.540.743	(370.169.942)	10.150.466.033
Total		9.093.095.232	1.427.540.743	(370.169.942)	10.150.466.033

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp5.554.278.662,00 berasal dari :

No	Uraian	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	AKP Periode ini	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Aset Lain-Lain		7.124.928.900	112.961.620	(1.683.611.908)	5.554.278.612
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	571.209.000	74.835.715	75.066.038	721.110.753,00
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.963.982	-	(2.963.982)	-
3.05.01	Alat Kantor	543.686.605	-	(158.637.625)	385.048.980,00
3.05.02	Alat Rumah Tangga	332.311.129	-	(277.552.399)	54.758.730,00
3.06.01	Alat Studio	632.977.200	1.054.800	(7.032.000)	627.000.000,00
3.06.02	Alat Komunikasi	1.990.579	-	(1.990.579)	-
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	2.079.516.875	33.301.125	-	2.112.818.000,00
3.10.01	Komputer Unit	1.331.083.830	-	(1.331.083.830)	-
3.10.02	Peralatan Komputer	1.629.189.700	-	(45.220.824)	1.583.968.876,00
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	3.769.980	65.803.293	69.573.273,00
Total		7.124.928.900	112.961.620	(1.683.611.908)	5.554.278.612

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya selama Tahun 2019 terdapat mutasi penambahan beban penyusutan (amortisasi) *Software* senilai Rp1.434.861.933,00, beban aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp112.961.620,00, Pengehentian Aset dari Penggunaan Rp65.803.293,00. Koreksi Pencatatan Amortisasi *Software* Rp377.491.192,00 dan Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lain-lain Rp1.618.008.515,00. Mutasi perubahan penyusutan yaitu sebagai berikut:

No	Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan Awal (Rp)	Penyusutan Tahun 2019 (Rp)	Penghentian Aset Dari Penggunaan (Rp)	Penghapusan BMN Yang Dihentikan (Rp)	Koreksi Pencatatan	Akumulasi Penyusutan Akhir (Rp)
1	Software Komputer	9.093.095.232,00	1.434.861.933,00	-	-	(377.491.192,00)	10.150.466.033,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	-	-	-	-
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7.124.928.900,00	112.961.620,00	(65.803.293,00)	-	(1.618.008.515,00)	5.554.078.712,00
Jumlah		16.218.024.132,00	1.547.823.613,00	(65.803.293,00)	-	(1.995.499.707,00)	15.704.544.745,00

*Utang kepada Pihak
Rp781.858.417,00*

C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp781.858.417,00 dan Rp2.458.992.441,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga Arsip Nasional RI terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar dan belanja barang yang masih harus dibayar.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
ANRI Jakarta		
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	7.851.058,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	748.580.113,00
Balai Arsip Statis dan Tsunami		
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	25.427.246,00
Jumlah		781.858.417,00

*Pendapatan Diterima di
Muka Rp0,00*

C.23 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

*Uang Muka dari KPPN
Rp2.720.000,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp2.720.000,00 dan Rp0,00. Merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran. Uang Muka Persediaan tersebut berasal dari satker Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, dimana uang persediaan tersebut telah disetor di tahun 2020 sesuai surat setoran pengembalian dengan nomor NTPN 336E58N3DE1ST6HD Tanggal 20/01/2020 Berikut rincian Uang

Muka dari KPPN pada TA 2019 dan TA 2018 :

KODE SATKER	NAMA SATKER	2019 (Rp)	2018 (Rp)
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	0,00	-
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	0,00	-
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,00	-
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	0,00	-
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	0,00	-
087.01.070069	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	0,00	-
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	0,00	-
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	0,00	-
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	0,00	-
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	0,00	-
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	0,00	-
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	0,00	-
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	0,00	-
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	0,00	-
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	0,00	-
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	0,00	-
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	0,00	-
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	0,00	-
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	0,00	-
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	0,00	-
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	0,00	-
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00	-
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,00	-
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	0,00	-
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	0,00	-
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	0,00	-
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	0,00	-
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,00	-
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	2.720.000,00	-
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	0,00	-
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	0,00	-
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	0,00	-
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	0,00	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan	0,00	-
087.01.418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	0,00	-
087.01.450448	Arsip Nasional RI Jakarta	0,00	-
087.01.681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	0,00	-
Jumlah		2.720.000,00	-

Utang Jangka Pendek

Lainnya Rp0,00

Ekuitas

Rp1.245.699.800.421,00

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.26 Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.245.699.800.421,00 dan Rp469.273.762.570,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp13.366.513.594,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.366.513.594,00 dan Rp11.385.593.550,00. Pendapatan tersebut terdiri atas :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Akun

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan	1.694.258.000,00	1.778.884.000,00	(4,76)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	15.615.000,00	14.380.000,00	8,59
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	1.412.243.000,00	1.406.904.000,00	0,38
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	266.400.000,00	357.600.000,00	(25,50)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	1.868.797.000,00	1.881.372.800,00	(0,67)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.868.797.000,00	1.881.372.800,00	(0,67)
Pendapatan Jasa Lainnya	9.534.055.200,00	7.661.138.350,00	24,45
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	9.534.055.200,00	7.661.138.350,00	24,45
Pendapatan Iuran/Denda	269.307.604,00	64.198.400,00	319,49
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	269.307.604,00	64.198.400,00	319,49
Pendapatan Lain-Lain	95.790,00	0,00	0,00
Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	
Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	95.790,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	13.366.513.594,00	11.385.593.550,00	17,40
Jumlah Pendapatan Operasional	13.366.513.594,00	11.385.593.550,00	17,40

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Satuan Kerja	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Pusat Jasa Kearsipan	9.095.172.700,00	7.322.192.050,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor	2.135.197.000,00	2.238.972.800,00
Arsip Nasional RI Jakarta	2.071.519.473,00	1.824.275.700,00
Balai Arsip Statis dan Tsunami	64.624.421,00	153.000,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13.366.513.594,00	11.385.593.550,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya pada ANRI Jakarta sebesar Rp15.615.000;
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.412.243.000,00 berasal dari Satker ANRI Jakarta;

3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp266.400.000,00 pada satker Pusdiklat Kearsipan Bogor;
4. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp1.868.797.000,00 yang berasal dari satker Pusdiklat Kearsipan Bogor;
5. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi sebesar Rp9.534.055.200,00 berasal dari pembenahan, penyimpanan dan pembuatan sistem kearsipan yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp431.031.500,00; satker BAST Aceh sebesar Rp7.851.000,00 dan satker Pusat Jasa Kearsipan Rp9.095.172.700,00;
6. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp269.307.604,00 berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp212.534.183,00 dan satker BAST Aceh sebesar Rp56.773.421,00;
7. Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp95.790 berasal dari satker ANRI Jakarta.

Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2019 dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional 2019 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	15.615.000,00	15.615.000,00	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	94.999.999,00	(94.999.999,00)
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung & Bangunan	1.412.243.000,00	1.412.243.000,00	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	266.400.000,00	266.400.000,00	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.868.797.000,00	1.868.797.000,00	-
Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi	9.534.055.200,00	9.534.055.200,00	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	269.307.604,00	269.307.604,00	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	95.790,00	95.790,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	140.255.542,00	(140.255.542,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	200.619.057,00	(200.619.057,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0,00	611.700,00	(611.700,00)
Jumlah Pendapatan PNBK Lainnya	13.366.513.594,00	13.802.999.892,00	(436.486.298,00)

Terdapat Perbedaan Realisasi Pendapatan menurut Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi Pendapatan menurut Laporan Operasional sebesar Rp13.366.513.594,00 sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp13.802.999.892,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp436.486.298,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Selisih (Rp)
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya pada Satker ANRI Jakarta	94.999.999,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (2018) pada Satker ANRI Jakarta	140.255.542,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (2018) pada Satker ANRI Jakarta	200.619.057,00
Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS pada Satker ANRI Jakarta	611.700,00
Total	436.486.298,00

Perbedaan Realisasi Pendapatan menurut Laporan Operasional dengan menurut Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi sumber pendapatan dan ekonomi atau fungsi/program. Pendapatan Lain-Lain pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan klasifikasi pendapatan di luar fungsi dan program institusi dan bukan merupakan klasifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional.

Beban Pegawai

Rp98.235.109.047,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp98.235.109.047,00 dan Rp85.876.547.475,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp12.358.561.572,00 atau 14,39 persen.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	47.245.157.293,00	42.562.710.830,00	4.682.446.463,00	11,00
Beban Gaji Pokok PNS	29.604.039.640,00	26.106.739.980,00	3.497.299.660,00	13,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	461.934,00	354.923,00	107.011,00	30,15
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-43.486,00	-3.039,00	-40.447,00	1.330,93
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.989.604.784,00	1.850.125.100,00	139.479.684,00	7,54
Beban Tunj. Anak PNS	528.987.428,00	496.840.234,00	32.147.194,00	6,47
Beban Tunj. Struktural PNS	2.210.860.000,00	2.155.580.000,00	55.280.000,00	2,56
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.850.509.000,00	2.932.502.000,00	-81.993.000,00	-2,80
Pengembalian Beban Fungsional PNS	0,00	-555.000,00	555.000,00	-100,00
Beban Tunj. PPh PNS	333.334.913,00	279.075.592,00	54.259.321,00	19,44
Beban Tunj. Beras PNS	1.359.613.080,00	1.289.945.040,00	69.668.040,00	5,40
Beban Uang Makan PNS	4.248.272.000,00	3.847.526.000,00	400.746.000,00	10,42
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.533.788.000,00	3.143.800.000,00	389.988.000,00	12,40
Beban Tunjangan Umum PNS	589.245.000,00	460.780.000,00	128.465.000,00	27,88
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-3.515.000,00	0,00	-3.515.000,00	0,00
Beban Lembur	113.381.000,00	133.848.000,00	-20.467.000,00	-15,29
Beban Uang Lembur	113.381.000,00	133.848.000,00	-20.467.000,00	-15,29
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	50.876.570.754,00	43.179.988.645,00	7.696.582.109,00	17,82
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	50.876.570.754,00	43.264.599.085,00	7.611.971.669,00	17,59
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0,00	-84.610.440,00	84.610.440,00	-100,00
Jumlah Beban Pegawai	98.235.109.047,00	85.876.547.475,00	12.358.561.572,00	14,39

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai hanya berada pada ANRI Jakarta yang terdiri dari :

1. Beban Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp47.245.157.293,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp4.682.446.463,00 atau 11 persen dibanding 31 Desember 2018;
2. Beban Lembur sebesar Rp113.381.000,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp20.467.000,00 atau 15,29 persen dibandingkan 31 Desember 2018;
3. Beban Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito sebesar Rp50.876.570.754,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp7.696.582.109,00 atau 17,82 persen dibandingkan 31 Desember 2018.
4. Pengembalian Beban/Belanja Pegawai sebesar Rp3.558.486 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp81.609.993,00 atau 95,82 persen dibandingkan 31 Desember 2018.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (netto) Tahun 2019 sebesar Rp100.092.865.098,00 sedangkan Beban Pegawai (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp98.235.109.047,00 terdapat selisih Rp1.857.756.051,00 atau dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	47.245.157.293,00	47.245.569.817,00	(412.524,00)
Beban Gaji Pokok PNS	29.604.039.640,00	29.604.416.740,00	(377.100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	461.934,00	461.934,00	0,00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(43.486,00)	(43.486,00)	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.989.604.784,00	1.989.621.494,00	(16.710,00)
Beban Tunj. Anak PNS	528.987.428,00	528.987.428,00	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	2.210.860.000,00	2.210.860.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.850.509.000,00	2.850.509.000,00	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	333.334.913,00	333.353.627,00	(18.714,00)
Beban Tunj. Beras PNS	1.359.613.080,00	1.359.613.080,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	4.248.272.000,00	4.248.272.000,00	0,00
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.533.788.000,00	3.533.788.000,00	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	589.245.000,00	589.245.000,00	0,00
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(3.515.000,00)	(3.515.000,00)	0,00
Beban Lembur	113.381.000,00	113.381.000,00	0,00
Beban Uang Lembur	113.381.000,00	113.381.000,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	50.876.570.754,00	52.733.914.281,00	(1.857.343.527,00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	50.876.570.754,00	52.733.914.281,00	(1.857.343.527,00)
Jumlah Beban Pegawai	98.235.109.047,00	100.092.865.098,00	(1.857.756.051,00)

Selisih Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PNS antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS		
Beban Gaji Pokok PNS		
201901450448001	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	377.100,00
Jumlah		377.100,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS		
201901450448002	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	16.710,00
Jumlah		16.710,00
Beban PPh PNS		
201901450448003	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	18.714,00
Jumlah		18.714,00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA		412.524,00

Selisih Belanja/Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Tunjangan Khusus		
201901450448011	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan Nov dan Des 2018	1,814,815,061.00
201901450448012	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI (7 org) bulan Mei s.d Desember 2018	50,379,524.00
201912450448063	Tunjangan kinerja pegawai ANRI yang masih harus dibayar sebanyak (3 org) bulan September 2019	(7,851,058.00)
Jumlah		1,857,343,527.00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA		1,857,343,527.00

Beban Persediaan
Rp5.210.490.065,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.210.490.065,00 dan Rp2.989.890.272,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.220.599.793,00 atau 74,27 persen. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018 berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
Beban Persediaan Konsumsi	4.256.888.560,00	2.171.486.470,00	2.085.402.090,00	96,04
Beban Persediaan Bahan Baku	866.939.050,00	744.658.938,00	122.280.112,00	16,42
Beban Persediaan Lainnya	86.662.455,00	73.744.864,00	12.917.591,00	17,52
Jumlah Beban Persediaan	5.210.490.065,00	2.989.890.272,00	2.220.599.793,00	74,27

Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Satuan Kerja	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Arsip Nasional RI Jakarta	4.726.496.750,00	2.767.621.262,00	70,78
Balai Arsip Statis dan Tsunami	109.601.415,00	110.715.510,00	-1,01
Pusat Jasa Kearsipan	330.237.000,00	75.162.000,00	339,37
Pusdiklat Kearsipan	44.154.900,00	36.391.500,00	21,33
Jumlah Beban Persediaan	5.210.490.065,00	2.989.890.272,00	74,27

*Beban Barang dan Jasa
Rp48.446.714.781,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp48.446.714.781,00 dan Rp40.802.730.838,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp7.498.296.943,00 atau 18,38 persen. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Beban Barang	33.358.043.978,00	22.921.822.292,00	10.436.221.686,00	45,53
Beban Keperluan Perkantoran	9.629.596.896,00	3.306.134.279,00	6.323.462.617,00	191,26
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(3.979.780,00)	0,00	(3.979.780,00)	0,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	742.984.000,00	714.173.850,00	28.810.150,00	4,03
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	(10.932.096,00)	10.932.096,00	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	126.107.425,00	84.533.135,00	41.574.290,00	49,18
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.049.290.000,00	1.497.685.000,00	551.605.000,00	36,83
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(2.230.000,00)	(2.525.000,00)	295.000,00	(11,68)
Beban Barang Operasional Lainnya	520.851.200,00	759.805.000,00	(238.953.800,00)	(31,45)
Beban Bahan	11.202.648.826,00	9.526.641.624,00	1.676.007.202,00	17,59
Beban Honor Output Kegiatan	6.534.425.000,00	5.073.737.000,00	1.460.688.000,00	28,79
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(18.920.500,00)	(20.047.500,00)	1.127.000,00	(5,62)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.974.270.911,00	1.992.617.000,00	(18.346.089,00)	(0,92)
Beban Barang Persediaan Penghargaan dalam bentuk uang	603.000.000,00	0,00	603.000.000,00	0,00
Beban Jasa	14.948.741.403,00	17.813.181.366,00	(2.864.439.963,00)	(16,08)
Beban Langganan Listrik	7.329.520.148,00	6.845.644.457,00	483.875.691,00	7,07
Beban Langganan Telepon	83.409.127,00	98.261.269,00	(14.852.142,00)	(15,11)
Beban Langganan Air	79.148.210,00	135.191.640,00	(56.043.430,00)	(41,45)
Beban Jasa Pos dan Giro	17.098.000,00	5.776.000,00	11.322.000,00	196,02
Beban Jasa Konsultan	158.950.000,00	219.880.000,00	(60.930.000,00)	(27,71)
Beban Sewa	1.547.560.400,00	1.059.094.400,00	488.466.000,00	46,12

Beban Jasa Profesi	3.480.255.000,00	2.820.590.000,00	659.665.000,00	23,39
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(2.582.500,00)	(13.392.500,00)	10.810.000,00	(80,72)
Beban Jasa Lainnya	2.255.383.018,00	6.642.136.100,00	(4.386.753.082,00)	(66,04)
Beban Aset Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin	139.929.400,00	67.727.180,00	72.202.220,00	106,61
Beban Aset Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin	139.929.400,00	67.727.180,00	72.202.220,00	106,61
Jumlah Beban Barang dan Jasa	48.446.714.781,00	40.802.730.838,00	7.643.983.943,00	18,73

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan jasa terdiri dari :

1. Beban Barang sebesar Rp33.358.043.978,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp10.436.221.686,00 atau 45,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Beban Jasa sebesar Rp14.948.741.403,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp2.864.439.963,00 atau 16,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Beban Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp139.929.400,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp72.202.220,00 atau 106,61 persen dari TA sebelumnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	151.540.000,00	79.295.000,00	91,11
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	152.745.000,00	142.384.100,00	7,28
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	59.935.000,00	44.640.000,00	34,26
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	180.136.000,00	126.671.000,00	42,21
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	113.842.050,00	86.073.550,00	32,26
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	191.830.000,00	114.679.000,00	67,28
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	125.404.000,00	87.716.000,00	42,97
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	105.182.000,00	64.711.000,00	62,54
Kantor Arsip Provinsi Jambi	71.919.000,00	46.835.500,00	53,56
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	115.393.587,00	82.026.000,00	40,68
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	84.570.000,00	61.663.000,00	37,15
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	95.490.700,00	66.466.000,00	43,67
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	98.182.000,00	33.569.000,00	192,48
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	97.589.000,00	56.282.000,00	73,39
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	134.576.600,00	35.495.500,00	279,14
Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	100.344.750,00	52.328.000,00	91,76
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	73.471.000,00	39.980.000,00	83,77

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	124.789.000,00	72.975.000,00	71,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	78.286.000,00	51.966.000,00	50,65
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	83.940.000,00	36.666.000,00	128,93
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	77.183.000,00	40.985.000,00	88,32
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	75.140.000,00	51.602.000,00	45,61
Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	120.141.900,00	70.888.000,00	69,48
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	159.832.000,00	99.118.200,00	61,25
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	73.962.000,00	36.660.000,00	101,75
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	91.060.000,00	54.422.000,00	67,32
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	60.070.000,00	39.089.000,00	53,67
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	63.971.000,00	33.788.000,00	89,33
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	66.048.000,00	36.947.500,00	78,76
Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	65.670.000,00	38.309.500,00	71,42
Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	52.424.000,00	57.690.000,00	(9,13)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	56.523.000,00	31.566.000,00	79,06
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	48.405.400,00	20.774.000,00	133,01
Pusat Jasa Kearsipan	4.440.308.167,00	3.599.393.147,00	23,36
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	3.202.255.068,00	2.677.363.500,00	19,60
Arsip Nasional RI Jakarta	36.113.133.785,00	31.447.400.026,00	14,84
Balai Arsip Statis dan Tsunami	1.441.421.774,00	1.084.313.315,00	32,93
Jumlah Beban Barang dan Jasa	48.446.714.781,00	40.802.730.838,00	18,73

Beban Barang dan Jasa (netto) Tahun 2019 sebesar Rp48.446.714.781,00 sedangkan Belanja Barang dan Jasa (netto) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp47.980.476.354,00 terdapat selisih sebesar Rp466.238.427,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN/BELANJA	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban/Belanja Barang	33.358.043.978,00	33.224.256.978,00	133.787.000,00
Beban/Belanja Keperluan Perkantoran	9.629.596.896,00	9.629.596.896,00	0,00
Pengembalian Beban/Belanja Keperluan Perkantoran	(3.979.780,00)	(3.979.780,00)	0,00
Beban/Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	742.984.000,00	742.984.000,00	0,00
Beban/Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	126.107.425,00	126.107.425,00	0,00
Beban/Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.049.290.000,00	2.049.290.000,00	0,00
Pengembalian Beban/Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	(2.230.000,00)	(2.230.000,00)	0,00
Beban/Belanja Barang Operasional Lainnya	520.851.200,00	520.851.200,00	0,00
Beban/Belanja Bahan	11.202.648.826,00	11.118.081.826,00	84.567.000,00
Beban/Belanja Honor Output Kegiatan	6.534.425.000,00	6.485.205.000,00	49.220.000,00
Pengembalian Beban/Belanja Honor Output Kegiatan	(18.920.500,00)	(18.920.500,00)	0,00
Beban/Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.974.270.911,00	1.974.270.911,00	0,00
Beban/Belanja Barang Persediaan Penghargaan Dalam bentuk Uang	603.000.000,00	603.000.000,00	0,00
Beban/Belanja Jasa	14.948.741.403,00	14.756.219.376,00	192.522.027,00
Beban/Belanja Langganan Listrik	7.329.520.148,00	7.143.397.898,00	186.122.250,00
Beban/Belanja Langganan Telepon	83.409.127,00	83.629.850,00	(220.723,00)
Beban/Belanja Langganan Air	79.148.210,00	84.427.710,00	(5.279.500,00)
Beban/Belanja Pos dan Giro	17.098.000,00	17.098.000,00	0,00
Beban/Belanja Konsultan	158.950.000,00	158.950.000,00	0,00
Beban/Belanja Sewa	1.547.560.400,00	1.547.560.400,00	0,00
Beban/Belanja Jasa Profesi	3.480.255.000,00	3.468.355.000,00	11.900.000,00

Pengembalian Beban/Belanja Jasa Profesi	(2.582.500,00)	(2.582.500,00)	0,00
Beban/Belanja Jasa Lainnya	2.255.383.018,00	2.255.383.018,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtable	139.929.400,00	0,00	139.929.400,00
Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin	139.929.400,00	0,00	139.929.400,00
Jumlah Beban/Barang dan Jasa	48.446.714.781,00	47.980.476.354,00	466.238.427,00

Selisih Belanja Barang Jasa antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang		
Beban/Belanja Bahan (521211)		
201912450448070	Koreksi saldo atas belanja bahan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor pusat ANRI Jakarta	(28.152.000,00)
201912681464014	Koreksi saldo atas belanja bahan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor daerah BAST	(56.415.000,00)
Jumlah		(84.567.000,00)
Beban/Belanja Honor Output Kegiatan (521213)		
201912450448072	Koreksi saldo atas belanja honor output kegiatan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor pusat ANRI Jakarta	(30.630.000,00)
201912681464016	Koreksi saldo atas belanja honor output kegiatan yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan kantor daerah BAST	(18.590.000,00)
Jumlah		(49.220.000,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang antara LRA dengan LO		(133.787.000,00)

Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
201901681464002	Pembayaran beban listrik kantor daerah BAST Aceh beban bln Desember 2018	23.430.757,00
201901450448004	Pembayaran beban listrik Gd. Gajah Mada beban bulan Desember 2018	15.406.277,00
201901450448005	Pembayaran beban listrik Gd. Gajah Mada beban bulan Desember 2018	11.649.366,00
201901450448006	Pembayaran beban listrik rumah dinas beban bulan Desember 2018	6.243.456,00
201901450448010	Pembayaran beban listrik Kantor Pusat beban bln Desember 2018	502.326.730,00
201901450448013	Pembayaran beban listrik Pusdiklat Kearsipan Bogor beban bln Desember 2018	10.344.455,00
201912681464010	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban Desember 2019	(23.000.316,00)
201912450448050	Tagihan listrik Gd. ANRI bln Desember 2019	(680.628.563,00)
201912450448051	Tagihan listrik Rumah Dinas ANRI bln Desember 2019	(5.973.691,00)
201912450448052	Tagihan listrik Gd. Gajah Mada ANRI bln Desember 2019	(10.884.453,00)
201912450448053	Tagihan listrik Gd. Gajah Mada Keagungan bln Desember 2019	(24.102.553,00)
201912450448057	Tagihan listrik Pusdiklat Bogor bln Desember 2019	(10.933.715,00)
Jumlah		(186.122.250,00)
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
201901681464003	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor BAST Aceh beban bulan Desember 2018	2.263.331,00
201901450448007	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor ANRI Pusat beban bulan Desember 2018	2.881.136,00
201902450448016	Pembayaran beban telekomunikasi Gd. Warung Buncit bln Desember 2018	1.383.804,00
201912681464011	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban Desember 2019	(2.196.530,00)
201912450448054	Tagihan telekomunikasi ANRI bln Desember 2019	(2.760.639,00)
201912450448058	Tagihan telekomunikasi Pusdiklat ANRI Bogor bln Desember 2019	(208.879,00)
201912450448059	Tagihan telekomunikasi Gd. Warung Buncit ANRI bln Desember 2019	(1.141.500,00)
Jumlah		220.723,00
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
201902681464001	Pembayaran beban air Kantor BAST Aceh beban bln Desember 2018	204.800,00
201901450448008	Pembayaran beban air Gd. Gajah Mada beban bln Desember 2018	16.090.120,00
201901450448009	Pembayaran beban air Kantor Pusdiklat Kearsipan Bogor beban bln Desember 2018	1.161.100,00
201912681464012	Untuk menyesuaikan tagihan PDAM bulan Desember 2019	(230.400,00)
201912450448055	Tagihan air PAM Gd. Gajah Mada bln Desember 2019	(10.582.520,00)
201912450448056	Tagihan air PAM Pusdiklat Bogor bln Desember 2019	(1.363.600,00)
Jumlah		5.279.500,00
Beban/Belanja Profesi (522151)		
201912450448067	Koreksi saldo atas belanja jasa profesi	(11.900.000,00)
Jumlah		(11.900.000,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		(192.522.027,00)

Beban Pemeliharaan
Rp9.110.528.492,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.110.528.492,00 dan Rp8.260.737.266,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp849.791.226,00 atau 10,29 persen. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 Berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.075.408.088,00	4.689.610.643,00	385.797.445,00	8,23
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	255.841.800,00	171.385.900,00	84.455.900,00	49,28
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.461.287.704,00	1.565.719.312,00	-104.431.608,00	-6,67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.464.971.100,00	1.421.380.400,00	43.590.700,00	3,07
Beban Pemeliharaan Lainnya	449.954.450,00	199.972.880,00	249.981.570,00	125,01
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	399.355.350,00	210.468.131,00	188.887.219,00	89,75
Beban Persediaan Suku Cadang	3.710.000,00	2.200.000,00	1.510.000,00	68,64
Jumlah Beban Persediaan	9.110.528.492,00	8.260.737.266,00	849.791.226,00	10,29

Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Satuan Kerja	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Arsip Nasional RI Jakarta	8.907.122.900,00	8.021.266.568,00	11,04
Balai Arsip Statis dan Tsunami	175.740.092,00	239.470.698,00	-26,61
Pusat Jasa Kearsipan	27.665.500,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	9.110.528.492,00	8.260.737.266,00	10,29

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Pemeliharaan Lainnya, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan dan Beban Persediaan Suku Cadang.

Beban Pemeliharaan (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp9.110.528.492,00 sedangkan Belanja Pemeliharaan (netto) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp9.987.353.132,00 terdapat selisih sebesar Rp876.824.640,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN/BELANJA	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.075.408.088,00	5.265.085.378,00	-189.677.290,00
Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	255.841.800,00	255.841.800,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.461.287.704,00	1.461.287.704,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.464.971.100,00	1.464.971.100,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan Lainnya	449.954.450,00	449.954.450,00	0,00
Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	381.612.700,00	-381.612.700,00
Belanja Persediaan pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	708.600.000,00	-708.600.000,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	399.355.350,00	0,00	399.355.350,00
Beban Persediaan Suku Cadang	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
Jumlah Belanja/Beban Pemeliharaan	9.110.528.492,00	9.987.353.132,00	-876.824.640,00

Selisih Belanja/Beban Barang Pemeliharaan sebesar Rp876.824.640,00 antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran merupakan selisih Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp189.677.290,00, disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Tgl. DOK	Nomor Dok	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Pemeliharaan			
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)			
31/07/2019	201907450448043	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan ruang diatas Poliklinik ANRI sesuai SPM/SP2D Nomor 00236/191391301003752 Tanggal 27 Pebruari 2019	29.601.000,00
31/12/2019	201912450448073	Koreksi manual atas reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan ruang diatas Poliklinik ANRI sesuai SPM/SP2D Nomor 00236/191391301003752 Tanggal 27 Pebruari	11.550.000,00
31/12/2019	201912450448072	Koreksi manual atas reklasifikasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin atas transaksi pekerjaan penggantian alas	148.526.290,00
Jumlah			189.677.290,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Pemeliharaan antara LO dengan LRA			189.677.290,00

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp381.612.700,00; Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp708.600.000,00; Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp399.355.350,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp3.710.000,00 telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp42.140.628.136,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp41.140.628.136,00 dan Rp28.091.128.769,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp14.049.499.367,00 atau 50,01 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 Berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.997.012.239,00	25.562.118.170,00	13.434.894.069,00	52,56
Beban Perjalanan Biasa	22.309.020.001,00	13.177.331.233,00	9.131.688.768,00	69,30
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(783.275.762,00)	(514.051.863,00)	(269.223.899,00)	52,37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.421.498.000,00	931.915.000,00	489.583.000,00	52,54
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(3.000.000,00)	(9.150.000,00)	6.150.000,00	(67,21)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.970.928.000,00	5.926.665.300,00	44.262.700,00	0,75
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(26.915.000,00)	(16.480.500,00)	(10.434.500,00)	63,31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.144.497.000,00	6.125.897.000,00	4.018.600.000,00	65,60
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(35.740.000,00)	(60.008.000,00)	24.268.000,00	(40,44)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.143.615.897,00	2.529.010.599,00	614.605.298,00	24,30
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.249.152.682,00	2.380.809.413,00	(131.656.731,00)	(5,53)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(132.587.440,00)	(117.888.126,00)	(14.699.314,00)	12,47
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.036.820.455,00	269.744.000,00	767.076.455,00	284,37
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya -Luar Negeri	(9.769.800,00)	(3.654.688,00)	(6.115.112,00)	167,32
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	42.140.628.136,00	28.091.128.769,00	14.049.499.367,00	50,01

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	276.402.000,00	269.224.000,00	2,67
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	401.462.300,00	316.825.650,00	26,71
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	83.070.180,00	42.127.100,00	97,19
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	584.730.000,00	386.221.000,00	51,40
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	322.294.600,00	224.554.902,00	43,53
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara	366.448.600,00	339.000.700,00	8,10
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	246.388.354,00	167.043.000,00	47,50
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	185.128.000,00	100.358.928,00	84,47
Kantor Arsip Provinsi Jambi	202.445.800,00	100.175.000,00	102,09
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	229.749.500,00	147.162.800,00	56,12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	192.281.900,00	145.078.900,00	32,54
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	241.950.053,00	121.354.400,00	99,37
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	287.335.000,00	159.413.300,00	80,25
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	194.900.600,00	119.794.530,00	62,70
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	202.000.240,00	88.998.668,00	126,97
Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	200.745.700,00	154.364.200,00	30,05
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	251.505.600,00	109.770.000,00	129,12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	350.285.400,00	244.042.600,00	43,53
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	277.119.006,00	175.366.216,00	58,02
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	269.218.300,00	114.964.000,00	134,18
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	192.608.978,00	81.132.000,00	137,40
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	193.100.224,00	86.244.000,00	123,90
Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	350.528.300,00	229.108.700,00	53,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	644.749.800,00	298.534.000,00	115,97
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	181.358.000,00	101.051.225,00	79,47
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	230.983.300,00	78.208.000,00	195,34
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	111.340.200,00	61.150.000,00	82,08
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	112.633.300,00	54.823.000,00	105,45
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	122.881.000,00	45.391.400,00	170,71
Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	99.476.489,00	57.418.465,00	73,25
Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	352.000.800,00	112.998.500,00	211,51
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	116.926.506,00	47.140.000,00	148,04
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	125.998.067,00	40.582.000,00	210,48
Pusat Jasa Kearsipan	764.399.715,00	417.838.907,00	82,94
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	1.902.820.362,00	1.384.590.165,00	37,43
Arsip Nasional RI Jakarta	30.752.859.045,00	21.112.211.544,00	45,66
Balai Arsip Statis dan Tsunami	520.502.917,00	356.866.969,00	45,85
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	42.140.628.136,00	28.091.128.769,00	50,01

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas :

1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp38.997.012.239,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp13.434.894.069,00 atau 52,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp3.143.615.897,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp614.605.298,00 atau 24,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya;

Beban Perjalanan Dinas (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp42.140.628.136,00 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas (netto) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp41.615.145.064,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp525.483.072,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN/ BELANJA	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.997.012.239,00	38.471.529.167,00	525.483.072,00
Beban Perjalanan Biasa	22.309.020.001,00	21.982.826.929,00	326.193.072,00
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(783.275.762,00)	(783.275.762,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.421.498.000,00	1.362.848.000,00	58.650.000,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.970.928.000,00	5.845.588.000,00	125.340.000,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(26.915.000,00)	(26.915.000,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.144.497.000,00	10.129.197.000,00	15.300.000,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(35.740.000,00)	(35.740.000,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.143.615.897,00	3.143.615.897,00	0,00
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.249.152.682,00	2.249.152.682,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(132.587.440,00)	(132.587.440,00)	0,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.036.820.455,00	1.036.820.455,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya -Luar Negeri	(9.769.800,00)	(9.769.800,00)	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	42.140.628.136,00	41.615.145.064,00	525.483.072,00

Selisih Belanja/Beban Barang Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp525.483.072,00 antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Tgl. DOK	Nomor Dok	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
Beban/Belanja Perjalanan Biasa (524111)			
31/12/2019	201912450448064	Reklasifikas atas transaksi belanja modal perjadiin Agus Santoso SPM No. 01143 Tgl. 21/05/2019 dan SPM No. 02167 Tgl. 03/09/2019 sesuai Nota Dinas Inspektorat ANRI No. PW.01/13/2019 tgl. 31 Des 2019 tentang Tindak Lanjut Audit Pengelolaan BMN TA 2019	(8.148.800,00)
31/12/2019	201912450448068	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas biasa yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(121.725.000,00)
31/12/2019	201912681464015	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas biasa yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di KD BAST	(196.319.272,00)
Jumlah			(326.193.072,00)

Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)			
31/12/2019	201912450448066	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(58.650.000,00)
31/12/2019	201912450448069	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(102.540.000,00)
31/12/2019	201912681464013	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor daerah BAST	(22.800.000,00)
Jumlah			(183.990.000,00)
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)			
31/12/2019	201912450448065	Koreksi saldo atas belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan di kantor pusat ANRI Jakarta	(15.300.000,00)
Jumlah			(15.300.000,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara LO dengan LRA			(525.483.072,00)

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp4.334.256.173,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.334.256.173,00 dan Rp2.629.172.965,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada satker ANRI Jakarta merupakan buku-buku koleksi layanan arsip dan paket pengembangan aplikasi SIKD pada satker ANRI Jakarta.

Uraian	Beban		Kenaikan/Penurunan	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Barang Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	4.327.679.438,00	2.629.172.965,00	1.698.506.473,00	64,60
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	6.576.735,00	0,00	6.576.735,00	0,00
Jumlah Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.334.256.173,00	2.629.172.965,00	1.705.083.208,00	64,85

Realisasi Anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (netto) Tahun 2019 sebesar Rp4.317.610.000,00 dan Beban Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (netto) Tahun 2019 pada Laporan Operasional sebesar Rp4.327.679.438,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.069.438. Penjelasan mengenai Belanja/Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Beban Bantuan Sosial

Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan

Amortisasi

Rp35.663.831.947,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp35.663.831.947,00 dan Rp26.774.472.769,00, jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan senilai Rp8.889.359.178,00 atau 33,20 persen. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan Berdasarkan Satuan Kerja

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Satuan Kerja	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Arsip Nasional RI Jakarta	33.661.996.579,00	23.284.169.112,00	44,57
Balai Arsip Statis dan Tsunami	1.372.389.330,00	627.606.951,00	118,67
Pusdiklat Kearsipan Bogor	11.071.250,00	2.482.500,00	345,97
Pusat Jasa Kearsipan	618.374.788,00	328.116.993,00	88,46
Konsolidasi Arsip Nasional RI	0,00	2.532.097.213,00	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.663.831.947,00	26.774.472.769,00	33,20

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

Berdasarkan Akun

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN	
			(Rp)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.850.709.903,00	12.426.907.972,00	423.801.931,00	3,41
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.919.262.666,00	13.446.268.394,00	(527.005.728,00)	(3,92)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	8.346.035.765,00	376.998.629,00	7.969.037.136,00	2.113,81
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.133.599.956,00	135.943.854,00	7.997.656.102,00	5.883,06
Beban Penyusutan Irigasi	9.566.897,00	12.194.242,00	(2.627.345,00)	(21,55)
Beban Penyusutan Jaringan	202.868.912,00	228.860.533,00	(25.991.621,00)	(11,36)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	112.961.620,00	67.657.050,00	45.304.570,00	66,96
Jumlah Penyusutan	34.228.969.954,00	26.317.832.045,00	7.911.137.909,00	30,06
Beban Amortisasi Software	1.434.861.993,00	456.640.724,00	978.221.269,00	214,22
Jumlah Amortisasi	1.434.861.993,00	456.640.724,00	978.221.269,00	214,22
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.663.831.947,00	26.774.472.769,00	8.889.359.178,00	33,20

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp366.398.781,00*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah surplus kegiatan non operasional untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar surplus Rp366.398.781,00 dan defisit Rp24.359.919.114,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 101,50 persen. Rincian dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018*

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	94.999.999,00	8.000.000,00	1.087,50
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	94.999.999,00	8.000.000,00	1.087,50
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	111.369.903,00	26.894.174,00	314,10
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	111.369.903,00	26.894.174,00	314,10
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-16.369.904,00	-18.894.174,00	-13,36
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	412.360.234,00	276.345.764,00	49,22
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	382.906.109,00	273.192.179,00	40,16
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	17.379.525,00	1.025.580,00	1.594,60
Pusat Jasa Kearsipan	11.851.500,00	1.380.005,00	758,80
Pusdiklat Kearsipan Bogor	223.100,00	748.000,00	-70,17
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29.591.549,00	24.617.370.704,00	-99,88
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	21.572.909,00	24.616.690.904,00	-99,91
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	643.640,00	679.800,00	-5,32
Pusat Jasa Kearsipan	7.375.000,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	382.768.685,00	-24.341.024.940,00	-101,57
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	366.398.781,00	-24.359.919.114,00	-101,50

D.11 .1 Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar defisit Rp16.369.904,00 dan defisit Rp18.894.174,00. Jumlah pada 31 Desember

2019 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp94.999.999,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp111.369.903,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari satker ANRI Jakarta atas Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp94.999.999,00;
- 2) Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari satker ANRI Jakarta atas Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp111.369.903,00.

D.11.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar surplus Rp382.768.685,00 dan defisit Rp24.341.024.940,00. Jumlah pada 31 Desember 2019 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp412.360.234,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp29.591.549,00.

D.11.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp412.360.234,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir yaitu sebesar Rp70.873.935,00 yang berasal dari ANRI Jakarta sebesar Rp65.712.310,00; dari Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar Rp1.134.525,00; dari Pusdiklat Kearsipan Bogor sebesar Rp223.100,00 dan Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp3.804.000,00;
- 2) Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp611.700,00 yang berasal dari PT. Taspen bulan Oktober 2019 pada Satker ANRI Jakarta;
- 3) Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar

Rp140.255.542,00 berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp115.963.042,00, satker BAST Aceh sebesar Rp16.245.000,00 satker Pusat Jasa Kearsipan Rp8.047.500,00;

- 4) Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp200.619.057,00 berasal dari satker ANRI Jakarta.

D.11.2.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp29.591.549,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir yaitu sebesar Rp22.216.549,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp21.572.909,00 dan satker BAST Aceh sebesar Rp643.640,00.
- 2) Kerugian Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp7.375.000,00 yang berasal dari satker Pusat Jasa Kearsipan.

Pos Luar Biasa Rp0,00

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp469.273.762.570,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp469.273.762.570,00 dan Rp444.260.237.964,00.

Surplus (Defisit) LO

Rp229.408.646.266,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp229.408.646.266,00 dan Rp208.399.005.918,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp25.519.398.478,00

E.4.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi yang terjadi. Koreksi tambah atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp25.519.398.478,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp724.611.109.018,00

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp724.611.109.018,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
(Rp39.898.698.245,00)

E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp39.898.698.245,00) dan Rp30.600.039.727,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp16.241.500,00

E.4.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.241.500,00 dan defisit Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp295.586.633.366,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp295.586.633.366,00 dan Rp202.812.490.797,00. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antara BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas lain	309.389.633.258,00	189.857.701.021,00
Diterima Dari Entitas Lain	(13.802.999.892,00)	(11.663.284.224,00)
Transfer Masuk	3.226.400,00	25.589.907.494,00
Transfer Keluar	(3.226.400,00)	(971.833.494,00)
Jumlah	295.586.633.366,00	202.812.490.797,00

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp13.802.999.892,00 sedangkan DKEL sebesar Rp309.389.633.258,00.

KODE SATKER	NAMA SATKER	DDEL	DKEL
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	427.942.000,00
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	554.207.300,00
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	143.005.180,00
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	764.866.000,00
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	436.136.650,00
087.01.070069	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	-	558.278.600,00
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	371.792.354,00
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	290.310.000,00
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	274.364.800,00
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	345.143.087,00
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	276.851.900,00
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	337.440.753,00
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	385.517.000,00
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	292.489.600,00
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	336.576.840,00
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	301.090.450,00
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	324.976.600,00
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	475.074.400,00
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	355.405.006,00
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	353.158.300,00
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	269.791.978,00
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	268.240.224,00
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	470.670.200,00
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	804.581.800,00
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	255.320.000,00
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	322.043.300,00
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	171.410.200,00
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	176.604.300,00
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	188.929.000,00
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	165.146.489,00
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	404.424.800,00
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	173.449.506,00
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	174.403.467,00
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan	9.103.220.200,00	7.994.444.862,00
087.01.418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	2.135.197.000,00	5.235.737.930,00
087.01.450448	Arsip Nasional RI Jakarta	2.483.713.271,00	230.083.961.434,00
087.01.681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	80.869.421,00	54.625.846.948,00
	Jumlah	13.802.999.892,00	309.389.633.258,00

E.5.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset antar entitas, baik antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan maupun antar entitas akuntansi pada entitas pelaporan yang berbeda. Terdapat Transfer Keluar sebesar Rp3.226.400,00 dan

Transfer Masuk sebesar Rp3.226.400,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Transaksi	Kuanitas	Entitas Keluar	Entitas Masuk	Tranfer Masuk	Transfer Keluar
1	Finger Print Time and Attendance Acces Control System	1 unit	Satker ANRI Jakarta	Satke BAST Aceh	4.033.000,00	4.033.000,00
	(Penyusutan)				(806.600,00)	(806.600,00)
Jumlah					3.226.400,00	3.226.400,00

Kenaikan/Penurunan

Ekuitas

Rp776.426.037.851,00

Ekuitas Akhir

Rp1.245.699.800.421,00

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp776.426.037.851,00 dan Rp25.013.524.606,00.

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp1.245.699.800.421,00 dan Rp469.273.762.570,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Satker ANRI Jakarta melakukan jurnal akrual beban listrik untuk pemakaian bulan Desember menggunakan dasar tagihan yang terbit di bulan Januari 2020, sehingga angka biaya menjadi akurat karena tidak menggunakan estimasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu pelaporan sepanjang belum terbit LK *Audited*. Berikut daftar tagihan listrik pemakaian bulan Desember satker ANRI Jakarta :

No.	Tanggal Jurnal	Uraian	IDPelanggan	Tgl. Invoice	Nominal (Rp)
ANRI Jakarta					
1	31/12/2019	Tagihan listrik Gd. ANRI bln Desember 2019	543100226856, 543800172044	02/01/2020	680.628.563,00
2	31/12/2019	Tagihan listrik Rumah Dinas ANRI bln Desember 2019	543104288535, 543100272725, 543100544670	02/01/2020	5.973.691,00
3	31/12/2019	Tagihan listrik Gd. GAJAH MADA ANRI bln Desember 2019	542100101176	02/01/2020	10.884.453,00
4	31/12/2019	Tagihan listrik Gd. GAJAH MADA KEAGUNGAN bln Desember 2019	542103415633	06/01/2020	24.102.553,00
5	31/12/2019	Tagihan listrik Pusdiklat Bogor bln Desember 2019	538310070881	03/01/2020	10.933.715,00
Jumlah					732.522.975,00

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama periode berjalan terkait Pendapatan tidak terdapat perubahan estimasi, sementara terkait dengan belanja telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan belanja serta mempercepat pencapaian kinerja ANRI Tahun Anggaran 2019. Revisi Anggaran karena perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengalami beberapa kali revisi, berikut kronologi revisi DIPA ANRI TA. 2019 :

- Revisi DIPA I dilaksanakan bulan Juni, revisi pergeseran akun

belanja sejenis pada kegiatan operasional dan pemuktahiran data di KANWIL PERBENDAHARAAN. Hasil revisi ditetapkan DIPA PETIKAN TA. 2019 NOMOR : SP DIPA-087.01.1.450448/2019 DS:3354-8414-6196-1334 Revisi ke-01 Tanggal : 28 Mei 2019.

- Revisi DIPA II dilaksanakan bulan Juli, revisi buka blokir, merupakan kewenangan DJA Kemenkeu RI. Hasil revisi ditetapkan DIPA PETIKAN ANRI TA. 2019 NOMOR : SP DIPA-087.01.1.450448/2019 DS:0357-1351-3239-8070 Revisi ke-02 Tanggal : 31 Juli 2019.
- Revisi DIPA III dilaksanakan bulan September, revisi disebabkan pergeseran anggaran antar keluaran (output) antar kegiatan untuk pemenuhan kekurangan Gaji merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Hasil revisi ditetapkan DIPA PETIKAN ANRI TA. 2019 NOMOR : SP DIPA- 087.01.1.450448/2019 DS:0001-2344-0525-3004 Revisi ke-03 Tanggal 06 September 2019.
- Revisi DIPA IV dilaksanakan bulan November, revisi pemanfaatan sisa lelang yang menyebabkan pergeseran anggaran antar keluaran (output) antar kegiatan untuk pengadaan peralatan dan mesin. Revisi Kewenangan DJA Kemenkeu RI. Hasil revisi ditetapkan DIPA NOMOR : SP DIPA-087.01.1.450448/2019 DS:5223-7553-2827-0001 Revisi ke-04 Tanggal : 11 November 2019.
- Revisi DIPA V dilaksanakan bulan November, revisi Pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu) satker yang sama, dalam 1 (satu) wilayah Kanwil DJPBN dan Pergeseran anggaran antar akun belanja dalam komponen belanja pegawai operasional dan komponen belanja barang operasional dalam keluaran (output) layanan perkantoran dalam satker yang sama untuk kegiatan Pameran Arsip

Refleksi 15 Tsunami Samudera Hindia di Banda Aceh merupakan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu RI. Hasil revisi ditetapkan DIPA NOMOR : SP DIPA-087.01.1.450448/2019 DS:0000-0667-3073-9370 Revisi ke-05 Tanggal : 25 November 2019.

- Revisi DIPA VI dilaksanakan bulan Desember, pemuktahiran Revisi POK di Kanwil Perbendaharaan. Hasil revisi ditetapkan DIPA NOMOR : SP DIPA- 087.01.1.450448/2019 DS:0000-0667-3073-9370 Revisi ke-06 Tanggal : 26 Desember 2019.

F.2.2 Khasanah Arsip

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Khasanah Arsip Statis Arsip Nasional RI Jakarta Nomor KN.03.00/45/2019, bahwa Data Khasanah Arsip Statis kantor ANRI Jakarta (Pusat) adalah arsip yang diserahkan oleh Direktorat Akuisisi dengan Data Khasanah Arsip Statis pada Direktorat Preservasi Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

DATA KHAZANAH ARSIP STATIS ANRI

Khasanah Arsip Statis ANRI Jakarta (Pusat)

No	Arsip	Satuan	Saldo Awl	Mutasi	Saldo Akhir
1	Kertas	Meter	30.065,60	229,20	30.294,80
2	Poster	Lembar	336,00	0,00	336,00
3	Kartografi/Peta	Lembar	128.594,00	1.022,00	129.616,00
4	Foto	Lembar	3.460.828,00	800,00	3.461.628,00
5	Film	Reel	59.002,00	33,00	59.035,00
6	Mikrofilm	Roll	14.463,00	39,00	14.502,00
7	Mikrofische	Fische	14.262,00	0,00	14.262,00
8	Rekaman Suara	Kaset	45.445,00	6.091,00	51.536,00
9	Reel to Reel Sound	Reel	946,00	0,00	946,00
10	Video	Kaset	25.347,00	361,00	25.708,00
11	Optical Disc	Keping	16.152,00	184,00	16.336,00
12	Piringan Hitam	Keping	101,00	0,00	101,00
13	Flashdisk	Buah	1	0,00	1,00
14	Arsip Elektronik	Terabyte	350	0,00	350,00

Khasanah Arsip BRR pada Balai Arsip Statis Aceh

Per 31 Desember 2019

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Masuk	Keluar	
Arsip Kertas	8,868,2 Meter Linier	0,2 Meter Linier	-	8.868,4 Meter Linier
Arsip Kearsitekturan	495 Meter Linier	-	-	495 Meter Linier
Arsip Peta	5.536 Lembar	-	-	5.536 Lembar
Arsip CD/DVD/VCD	1.226 Keping	-	-	1.226 Keping
Arsip Kaset	52 Kaset	-	-	52 Kaset
Arsip Foto	1.979 Lembar	-	-	1.979 Lembar
Arsip Disket	43 Keping	-	-	43 Keping

- Terdapat penambahan volume arsip untuk arsip kertas sebesar 0,2 Meter Linier dari ARSIP LAN (Puslatbang KHAN);
- Tidak terdapat penambahan arsip kearsitekturan, arsip peta, arsip CV/DVD/VCD, arsip kaset, arsip disket.

F.2.3 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Terdapat Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor PL.02.01/28/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah dilakukan serah terima BMN hasil pengadaan Satker Arsip Nasional RI Jakarta (450448) Tahun Anggaran 2019 berupa Alat Mesin Absensi kepada Balai Arsip Statis Tsunami (BAST) Aceh dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Aset/Barang	Merk/Type/Ukuran	Tahun Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi	Asal Dropping
1	Finger Print Time and Attendance Kode Aset 3060207005	-	2019	1 Unit	Rp 4.033.000,00	Rp 4.033.000,00	Baik	Arsip Nasional RI Jakarta
Total						Rp 4.033.000,00		

F.2.4 Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2018 Yang Disetorkan ke Kas Negara Pada Tahun Anggaran 2019

Terdapat pengembalian belanja TA 2018 yang disetorkan ke kas negara pada TA 2019 sebagai akibat tidak tepatnya pelaksana kegiatan dalam menghitung rincian anggaran biaya. Berikut rincian pengembalian belanja TA 2018 yang disetorkan pada TA 2019 :

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
Pusat Jasa Kearsipan					
1	09/04/2019	Pengembalian Honor Pengelola SAI 2018 a.n M. Imam M, Amieka H., Ali Sugeng, Kismandi, M. M. Akbar, Pati Sunjaya, Shita Rouli H., M Fahrin, dan Erma S.	E16720E3H7FNNTSO	425912	8.047.500,00
Jumlah					8.047.500,00

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
Balai Arsip Statis dan Tsunami					
1	15/01/2019	Pengembalian honor tim website BAST bulan Maret-November	593E30PB61M0JUPO	425912	16.245.000,00
Jumlah					16.245.000,00

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
ANRI Jakarta					
1	01/03/2019	Pengembalian kelebihan tiket perjadin an. Tony A(5 org) ke Kaltim tgl. 4-7 Sep 18	BF8BC45J14E9ABJP	425912	2.679.500,00
2	01/04/2019	Pengembalian kelebihan Perjadin ke LN an. Evi Indayani tgl.10-12 Desember 2018 ke Kairo, Mesir	829C36LSLUGG41C9	425912	1.827.000,00
3	01/08/2019	Pengembalian honor Tim Kajian Map Grang Design an. Sari Hasanah bln Okt 18	119BC1PN0VJ0VUE9	425912	475.000,00
4	01/08/2019	Pengembalian honor Tim Kajian Road Map Grand Design an. Sari Hasanah bln Nop sd Des 2018	C392B1PLL19GOVE9	425912	950.000,00
5	01/09/2019	Pengembalian perjalanan dinas a,n Imam Gunarto dkk (6 org) tgl 3-6 Juli 2018 ke Padang	6CEB84MP5F8M2I6P	425912	249.400,00
6	01/10/2019	Pengembalian kelebihan akomodasi perjadin Adi Gesi (2 org) ke Bogor tgl 7-8 Mei 2018	5FB0388V02JN1IV8	425912	401.855,00
7	01/10/2019	Pengembalian kelebihan perjadin Adi Gesit (2 org) ke Solo tgl 19-21 Des 2018	E329B8AA5TPVIUV8	425912	1.408.600,00
8	24/04/2019	Pengembalian honor panitia a.n Abdul Anas kegiatan rakor pembentukan simpul percontohan tgl 12-13 April 2018	31C226PSE5CNHLEP	425912	300.000,00
9	24/04/2019	Pengembalian translok a.n Tiyas Cahyani kegiatan survei implementasi E-Arsip dengan SIKD tgl 26/2/2018	FEAF682CPSKVUJO9	425912	300.000,00
10	24/04/2019	Pengembalian perjalanan dinas a.n Maya dkk (3 org) tgl 7-10 Oktober 2018 ke Jawa Timur	7DD6935QUBCBFP1P	425912	72.000,00
11	24/04/2019	Pengembalian perjalanan dinas a.n Sahraeni dkk (3 org) tgl 27-29 Maret 2018 ke Kendari	90D9E64R989RP87O	425912	15.000,00
12	24/04/2019	Pengembalian perjalanan dinas a.n M. Taufik dkk (4 org) tgl 28 Juli-3 Agustus 2018 ke Serbia	BD3BC3VUGANVKJA8	425912	14.048.620,00
13	24/04/2019	Kekurangan pengembalian dan atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri	629044PDUQI9FADO	425912	981.631,00
14	24/04/2019	Pembayaran honorarium operasional satuan kerja pengelola sistem akuntansi instansi (SAI) yang tarifnya tidak sesuai dengan SBM tahun 2018	6B2F44JIMTS56JUDO	425912	10.687.500,00
15	24/04/2019	Kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan Gedung Warung Buncit berupa paket penggantian kaca	70CB34L17OCT0FDO	425912	65.539.236,00
16	24/04/2019	Pengembalian kelebihan Perjadin ke Luar Negeri ke Malaysia tahun 2018	1A6A010GG9BLMMC8	425912	6.700.000,00
17	24/04/2019	Pengembalian honor Tim Pelks. Kegiatan di ANRI Th. 2018 berdasar SK KA ANRI yg melebihi Batas Maksimal	7448211HI6U33HC8	425912	4.342.500,00
18	24/04/2019	Pengembalian kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas ke Rusia TA 2018	21DA82PM45LK44GO	425912	687.200,00
19	24/04/2019	Pengembalian kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas ke Vietnam	A212B6NP192NL7GO	425912	4.298.000,00
Jumlah					115.963.042,00

F.2.5 Take Out Revaluasi BMN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018 namun sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-58/PB/2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang

Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, serta Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-7/KN/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2019 (*Unaudited*), maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 baru akan disajikan dalam LKKL ANRI Tahun 2019. Hasil Penilaian kembali BMN disajikan setelah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

No.	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut BMN	Selisih
1	Tanah	802.566.806.600,00	802.566.806.600,00	-
2	Gedung dan Bangunan	364.584.089.636,00	364.584.089.636,00	-
3	Jalan dan Jembatan	52.918.334.000,00	52.918.334.000,00	-
4	Irigasi	280.490.000,00	280.490.000,00	-
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(30.986.612.256,00)	(30.986.612.256,00)	-
6	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(20.206.223.195,00)	(20.206.223.195,00)	-
7	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(84.065.563,00)	(84.065.563,00)	-
	Jumlah	1.169.072.819.222,00	1.169.072.819.222,00	-

F.2.6 Nilai Aset Tetap Hasil Koreksi BPK

No.	Jenis Aset	Nilai Aset Tetap Sebelum Koreksi	Koreksi BPK		Nilai Aset Tetap Setelah Koreksi
			Debit	Kredit	
1	Tanah	802.566.806.600	-	-	802.566.806.600
2	Peralatan dan Mesin	220.897.687.278,00	160.076.290,00	-	221.057.763.568
3	Gedung dan Bangunan	366.028.381.545,00	-	1.444.291.909,00	364.584.089.636
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.928.914.526,00	75.413.000,00	122.353.000,00	62.881.974.526
5	Aset Tetap Lainnya	26.865.394.160,00	-	-	26.865.394.160
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(182.702.297.009,00)	-	21.133.629,00	(182.723.430.638)
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(31.294.727.055,00)	308.114.799,00	-	(30.986.612.256)
7	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(25.530.953.654,00)	74.280.834,00	37.350.895,00	(25.494.023.715)
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(60.483.100,00)	-	-	(60.483.100)
	Jumlah	1.239.698.723.291,00	617.884.923,00	1.625.129.433,00	1.238.691.478.781,00

Terdapat penurunan nilai Aset Tetap sebesar Rp1.007.244.510,00 sebagai bentuk koreksi atas hasil audit yang dilakukan oleh BPK dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp160.076.290,00 berasal dari hasil koreksi manual atas reklasifikasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin atas transaksi pekerjaan penggantian alas lantai ruang diklat di pusdiklat sesuai SPK No. PL.03.00/868.05/2019

tgl. 4/10/2019. SPM/SP2D Nomor 02748/191391301058712 Tanggal 28 Oktober 2019 senilai Rp148.526.290,00 dan hasil koreksi manual atas reklasifikasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi aset peralatan dan mesin atas transaksi belanja barang perbaikan ruang di atas Poliklinik ANRI sesuai kuitansi no.139-01 tgl. 19/2/2019. SPM/SP2D Nomor 00236/191391301003752 Tanggal 27 Februari 2019 berupa pemasangan alas lantai senilai Rp11.550.000,00;

- b. Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.444.291.909,00 berasal dari :

No.	Uraian	Nilai
1	Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota yang dibebankan pada belanja modal gedung dan bangunan SPM no. 0037	15.300.000,00
2	Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dibebankan pada belanja modal Gedung dan Bangunan (11 SPM)	58.650.000,00
3	Koreksi saldo atas belanja Jasa Profesi yang dibebankan pada belanja modal Gedung dan Bangunan (SPM 1026 dan 2369)	11.900.000,00
4	Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dibebankan pada belanja modal Gedung dan Bangunan (22 SPM)	318.044.272,00
5	Koreksi saldo atas belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota yang dibebankan pada belanja modal Gedung dan Bangunan (20 SPM)	125.340.000,00
6	Koreksi saldo atas belanja Bahan yang dibebankan pada belanja modal Gedung dan Bangunan (9 SPM)	84.567.000,00
7	Koreksi saldo atas belanja Honor Output Kegiatan yang dibebankan pada belanja modal Gedung dan Bangunan (8 SPM)	49.220.000,00
8	Koreksi perubahan nilai/kuantitas	687.684.637,00
9	Koreksi Transfer Keluar atas 224	93.586.000,00
Jumlah		1.444.291.909,00

- c. Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp75.413.000,00 berasal dari koreksi manual atas Transfer Keluar Jalan dan Jembatan hasil revaluasi berupa Jalan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan NUP 3 berdasarkan LHIP 811;
- d. Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp122.353.000,00 berasal dari Penghentian aset dari penggunaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah berdasarkan Berita Acara Penghentian Aset dari Penggunaan Nomor BA-08/BU/IV/2019 Tanggal 27 April 2020 berupa sumur artesis NUP 2;
- e. Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.133.629,00 berasal dari koreksi alat rumah tangga kode barang 3.05.02;
- f. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp308.114.799,00 berasal dari koreksi bangunan gedung tempat kerja dengan kode barang 4.01.01 senilai

Rp13.507.059,00 dan koreksi tugu/tanda batas dengan kode barang 4.04.01 senilai Rp294.607.740,00;

- g. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp74.280.834,00 berasal dari koreksi manual atas Transfer Keluar Jalan dan Jembatan hasil revaluasi berupa jalan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan NUP 3 berdasarkan LHIP 811, dan penambahan Rp37.350.895,00 Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan yang penambahan masa manfaat double Hasil Revaluasi Berupa Jalan Khusus Komplek NUP 3 Berdasarkan LHIP 811

F.2.7 Jaminan Pemeliharaan

- a. Berdasarkan Bank Garansi Nomor MBG774026736419N Tanggal 03 Desember 2019, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak melalui Kantor Branch Jakarta Cibis Nine beralamat Jl. Raya TB. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560 (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 KUHP dengan menjamin PT. Link Net Tbk beralamat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama, Arsip Nasional Republik Indonesia beralamat Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi") untuk membayar setinggi-tingginya Rp64.000.000,00 dengan ketentuan :
1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan BAPP Nomor : PL.01.04/01.12/BAPP/2019 Tanggal 16 Desember 2019 untuk Pengadaan Jasa Langganan Internet Service Provider di Lingkungan ANRI Tahun 2019, maka Bank membayar kepada

Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;

2. Bank Garansi berlaku sejak tanggal 04 Desember 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019.
- b. Berdasarkan Bank Garansi Nomor 03390117190000093 Tanggal 09 Desember 2019, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di B dalam hal ini bertindak melalui Kantor Branch Jakarta Pasar Minggu beralamat Jl. Raya Ragunan No. 39-A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 (untuk selanjutnya disebut "Penjamin") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 KUHP dengan menjamin PT. Munako Niaga Pratama beralamat di Office 8 Level 18-A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Kebayoran Baru Jakarta 12190 (untuk selanjutnya disebut "Yang Dijamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama, Arsip Nasional Republik Indonesia beralamat Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Jaminan") untuk membayar setinggi-tingginya Rp52.305.000,00 dengan ketentuan :
1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan BAPP Nomor : PL.01/21.27/2019 Tanggal 16 Desember 2019 untuk Penyediaan Penambah Daya Tahan Tubuh di Kantor Arsip Nasional RI Tahun Anggaran 2019, maka Bank membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;

2. Bank Garansi berlaku sejak tanggal 02 Desember 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019.
- c. Berdasarkan Bank Garansi Nomor MBG666087042419N Tanggal 12 Desember 2019, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Bandung beralamat Jl. Asia Afrika No. 118-120 2nd Floor, Bandung 40261 (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 KUHP dengan menjamin PT. Nia Yulided Bersaudara (KSO) beralamat Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52 Bandung (untuk selanjutnya disebut "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Balai Arsip Statis dan Tsunami, Arsip Nasional RI beralamat Jl. T. Nyak Arief No. 122 Banda Aceh 23126 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi") untuk membayar setinggi-tingginya Rp2.445.062.114,00 dengan ketentuan :
1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan BAST Nomor : PL.01.02/51.16/2019 Tanggal 4 Desember 2019 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Depot Arsip Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, maka Bank membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut selambat-lambatnya 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
 2. Bank Garansi berlaku sejak tanggal 04 Desember 2019 dan berakhir pada 30 Juli 2020.
- d. Berdasarkan Bank Garansi Nomor PM0078000519 Tanggal 25 Oktober 2019, PT. Bank Bjb, berkedudukan di Majalaya beralamat Jl. Raya Tengah Ruko Sentra Niaga Permata No. 3-4 Majalaya,

Kabupaten Bandung (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 KUHP dengan menjamin PT Trimanunggal Karyatama beralamat Jl. Mekar Agung No. 67 Rt 003 Rw 006 Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung (untuk selanjutnya disebut "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Kedepatian Bidang Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia beralamat Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi") untuk membayar setinggi-tingginya Rp2.445.062.114,00 dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan BAST Nomor : PL.01.02/15.21/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Interior Gedung Arsip Kepresidenan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, maka Bank membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Bank Garansi berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2019 dan berakhir pada 07 April 2020.

F.2.8 Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TPA Tahun 2019 Tanggal 16 Juli 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menetapkan Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. M. Taufik, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala ANRI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan

ditetapkannya pejabat definitif Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

F.2.9 Pergantian Pejabat Tinggi Madya

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pelantikan dari/dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, terhitung 13 Maret 2020 yaitu :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Imam Gunarto, M.Hum	19630728 199203 1 001	Sekretaris Utama
2	Drs. Sumrahadi, MIMS	19611009 198703 1 001	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
3	Dr. Andi Kasman, SE., MM	19650830 199303 1 001	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

F.2.10 Rincian KDP Arsip Nasional Tahun 2019

NO	TGL SP2D	NO SP2D	KODE BELANJA	NILAI KDP	KETERANGAN	NILAI SPM	SELISIH (PENGEMBALIAN BELANJA)	JUMLAH KDP
Arsip Nasional Republik Indonesia								
1	24/01/2019	191391302000380	533111	4.900.000	Uang saku RDK Persiapan tender pengawas interior	4.900.000		4.900.000
2	24/01/2019	191391302000386	533111	4.200.000	Translok aanwijzing tender pelaksanaan pembangunan interior	4.200.000		4.200.000
3	30/01/2019	191391303000388	533111	6.000.000	Rapat fulliday aanwijzing pembangunan interior	6.000.000		6.000.000
4	31/01/2019	191391302000872	533111	5.350.000	Uang saku RDK persiapan tender pembangunan interior	5.350.000		5.350.000
5	31/01/2019	191391302000873	533111	15.300.000	Translok persiapan tender pembangunan interior	15.300.000		15.300.000
6	31/01/2019	191391303000406	533111	14.760.000	Rapat fullboard persiapan tender pembangunan interior	14.760.000		14.760.000
7	01/02/2019	191391302001128	533111	18.186.000	Perjadin pembuktian kualifikasi konstruksi pembangunan interior	18.186.000		18.186.000
8	01/02/2019	191391302001130	533111	4.250.000	Uang saku RDK	4.250.000		4.250.000
9	07/02/2019	191391302001883	533111	2.250.000	Rakor persiapan uji kualifikasi konstruksi pembangunan interior	2.250.000		2.250.000
10	19/02/2019	191391302004017	533111	10.200.000	Transport penyusunan kontrak tender pembangunan interior	10.200.000		10.200.000
11	21/02/2019	191391302004530	533111	2.880.000	Honor tim pokja	2.880.000		2.880.000
12	25/02/2019	191391302005045	533111	2.750.000	Uang saku RDK lelang ulang konsultan pengawas pembangunan interior	2.750.000		2.750.000
13	04/03/2019	191391302006584	533111	8.400.000	Rapat Fullboard penyusunan tender pembangunan interior	8.400.000		8.400.000
14	04/03/2019	191391303002722	533111	6.460.000	Konsumsi rapat pembangunan interior	6.460.000		6.460.000
15	08/03/2019	191391302007881	533111	1.650.000	Translok persiapan pra pelaksanaan, serah terima dan penjelasan konsultan pengawas pembangunan interior	1.650.000		1.650.000
16	11/03/2019	191391302008258	533111	3.750.000	Uang saku RDK kordinasi pelaksanaan pembangunan interior	3.750.000		3.750.000
17	22/03/2019	191391303005435	533111	5.214.601.050	Uang muka pekerjaan pembangunan interior	5.214.601.050		5.214.601.050
18	05/04/2019	191391302014265	533111	9.800.000	Honor tim pokja	9.800.000		9.800.000
19	10/04/2019	191391302015351	533111	116.248.000	Uang Muka konsultan pengawas pekerjaan pembangunan interior	116.248.000		116.248.000
20	11/04/2019	191391302015805	533111	48.619.000	Perjadin kunjungan workshop pembangunan arsip kepresidenan	48.619.000	210.000	48.409.000
21	11/04/2019	191391302015814	533111	2.700.000	Translok presentasi dengan vendor	2.700.000		2.700.000
22	30/04/2019	191391303011406	533111	7.387.351.487	Pembayaran termin I pembangunan interior	7.387.351.487		7.387.351.487
23	14/05/2019	191391302023738	533111	8.500.000	Honor narasumber presentasi	8.500.000		8.500.000
24	14/05/2019	191391302023748	533111	1.950.000	Translok rapat mingguan dan presentasi bersama	1.950.000		1.950.000
25	16/05/2019	191391303014713	533111	10.064.000	Konsumsi rapat	10.064.000		10.064.000
26	24/05/2019	191391302027669	533111	4.900.000	Uang saku RDK penyusunan konten lanjutan pembangunan interior	4.900.000		4.900.000
27	28/05/2019	191391302028359	533111	5.550.000	Uang saku RDK penyusunan konten pembangunan interior	5.550.000		5.550.000
28	28/05/2019	191391302028429	533111	116.248.000	Termin I pengawas pekerjaan interior	116.248.000		116.248.000
29	10/06/2019	191391302030027	533111	4.400.000	Uang saku RDK penyusunan konten lanjutan pembangunan interior	4.400.000		4.400.000
30	19/06/2019	191391303020437	533111	7.387.351.488	Pembayaran Termin II pembangunan interior	7.387.351.488		7.387.351.488
31	01/07/2019	191391302034131 SPM 01374	533111	116.248.000	PEMBAYARAN PENGAWAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN INTERIOR ARSIP KEPRESIDENAN TERMIN 2	116.248.000		116.248.000
32	05/07/2019	191391303023315 SPM 01418	533111	5.508.000	KONSUMSI RAPAT	5.508.000		5.508.000
33	19/07/2019	191391302039910 SPM 01676	533111	1.950.000	TRANSLOK	1.950.000		1.950.000
34	07/08/2019	191391303029818 TGL 07/08/2019	533111	7.387.351.487	TERMIN III PEMBANGUNAN INTERIOR GEDUNG ARSIP KEPRESIDENAN	7.387.351.487		7.387.351.487
35	08/08/2019	191391302045068 TGL 08/08/2019	533111	116.248.000	PENGAWAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN INTERIOR	116.248.000		116.248.000
36	14/08/2019	191391302046798 Tgl 14/08/2019	533111	41.940.000		41.940.000		41.940.000
37	15/08/2019	191391302047258 TGL 15/08/2019	533111	6.050.000	UANG SAKU RDK konten grafis interior	6.050.000		6.050.000
38	21/08/2019	191391302048591 TGL 21/08/2019	533111	2.400.000	UANG SAKU RDK konten grafis interior	2.400.000		2.400.000
39	27/08/2019	191391302050074 TGL 27/08/2019	533111	7.600.000	HONOR MONITORING PEMBANGUNAN INTERIOR	7.600.000		7.600.000
40	02/09/2019	SP2D NO 191391302051562 TGL 02/09/2019	533111	9.050.000	UANG SAKU RDK konten grafis interior	9.050.000		9.050.000
41	05/09/2019	SP2D NO 191391302052812 TGL 05/09/2019	533111	14.550.000	TRANSLOK KE GEDUNG ANRI GAJAH MADA	14.550.000		14.550.000
42	12/09/2019	SP2D NO 191391302055003	533111	3.000.000	TRANSLOK cek fisik bangunan dan interior	3.000.000		3.000.000
43	18/09/2019	SP2D NO 191391303039388 TGL 18/09/2019	533111	6.120.000	KONSUMSI RAPAT pembangunan gedung arsip kepresidenan	6.120.000		6.120.000

44	20/09/2019	SP2D NO 191391302057505 TGL 20/09/2019	533111	8.850.000	UANG SAKU RDK evaluasi pembangunan interior	8.850.000		8.850.000
45	23/09/2019	SP2D NO 191391302057813 TGL 23/09/2019	533111	3.400.000	HONOR NARASUMBER rapat finalisasi pembangunan interior	3.400.000		3.400.000
46	26/09/2019	SP2D NO 191391302058640	533111	3.546.000	PERIADIN dalam rangka arahan rapat evaluasi pembangunan interior	3.546.000	186000	3.360.000
47	08/10/2019	SP2D NO 191391302062886	533111	6.000.000	Translok rapat pembangunan interior	6.000.000	0	6.000.000
48	14/10/2019	SP2D NO 191391302064948	533111	2.380.000	konsumsi RDK pembangunan gedung arsip kepresidenan	2.380.000	0	2.380.000
49	14/10/2019	SP2D NO 191391302065272	533111	4.600.000	RDK evaluasi lanjutan pembangunan interior	4.600.000	0	4.600.000
50	18/10/2019	SP2D NO 191391302067432	533111	9.000.000	Translok	9.000.000	150.000	8.850.000
51	01/11/2019	SP2D NO 191391302072000	533111	116.248.000	Termin IV pengawas pekerjaan pembangunan interior	116.248.000	0	116.248.000
52	01/11/2019	SP2D NO 191391302050326	533111	6.463.008.097	Termin IV pembangunan interior	6.463.008.097	0	6.463.008.097
53	18/11/2019	SP2D NO 191391302078447	533111	5.550.000	Translok pendampingan BPK cek fisik dan monitoring pembangunan arsip presiden	5.550.000	0	5.550.000
54	02/12/2019	SP2D NO 191391302083311	533111	9.830.000	Translok pelatihan perawatan patung lilin	9.830.000	0	9.830.000
55	16/12/2019	SP2D NO 191391302096328	533111	7.250.000	Honor tim panitia penerima hasil pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan	7.250.000	0	7.250.000
56	16/12/2019	SP2D NO 191391302096331	533111	3.100.000	Honor tim panitia penerima hasil pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan	3.100.000	0	3.100.000
Total KDP				34.790.346.609		34.790.346.609	546.000	34.789.800.609
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh								
1	27/02/2019	1,90011E+14	533111	9.086.562	Perjalanan Dinas Mengikuti Rapat Lelang di Jakarta	9.086.562		9.086.562
2	27/03/2019	1,90011E+14	533111	20.203.419	Perjalanan Dinas Melaksanakan Ulang Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Tender Pekerjaan Konsultan Pengawas	20.203.419		20.203.419
3	27/03/2019	1,90011E+14	533111	12.180.000	Perjalanan Dinas Melaksanakan Ulang Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Tender Pekerjaan Konstruksi di Jakarta dan Bandung	12.180.000		12.180.000
4	27/03/2019	1,90011E+14	533111	13.385.200	Perjalanan Dinas Melaksanakan Ulang Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Tender Pekerjaan konstruksi di Banda Aceh	13.385.200		13.385.200
5	27/03/2019	1,90011E+14	533111	13.553.837	Perjalanan Dinas Mengikuti Rapat Persiapan Lelang Pembangunan Gedung di Jakarta	13.553.837		13.553.837
6	27/03/2019	1,90011E+14	533111	8.280.000	Perjalanan Dinas Melaksanakan Konsinyering Persiapan Lelang di Jakarta	8.280.000		8.280.000
7	01/04/2019	1,90011E+14	533111	35.564.120	Perjalanan Dinas Menghadiri dan Melaksanakan Acara Peletakan Batu Pertama	35.564.120		35.564.120
8	09/04/2019	1,90011E+14	533111	16.800.000	Rapat Fullboard Konsinyering Persiapan Lelang			
				400.000	Honor Pembawa Acara Peletakan Batu Pertama	17.640.000		17.640.000
				400.000	Honor Pembaca Do'a Peletakan Batu Pertama			
				40.000	Pembelian Spidol Peletakan Batu Pertama			
9	18/04/2019	1,90011E+14	533111	7.335.186.342	Uang Muka Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi 15 %	7.335.186.342		7.335.186.342
10	29/04/2019	1,90011E+14	533111	206.690.000	Uang Muka 20 %Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas	206.690.000		206.690.000
11	28/05/2019	1,90011E+14	533111	9.800.000	Honorarium Kelompok Kerja Kegiatan Lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung			
				3.640.000	Honorarium Kelompok Kerja Kegiatan Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung	13.440.000		13.440.000
12	28/06/2019	1,90011E+14	533111	8.171.000	Pembelian ATK	8.171.000		8.171.000
13	24/07/2019	1,90011E+14	533111	248.028.000	Pembayaran Termin I Pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas	248.028.000		248.028.000
14	24/07/2019	1,90011E+14	533111	1.980.000	Perjalanan dinas dalam rangka Melakukan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.980.000		1.980.000
15	29/07/2019	1,90011E+14	533111	12.469.816.781	Pembayaran Termin I Pelaksanaan paket pekerjaan Konstruksi	12.469.816.781		12.469.816.781
16	10/10/2019	1,90011E+14	533111	14.548.119.578	Pembayaran Termin II Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi	14.548.119.578		14.548.119.578
17	14/10/2019	1,90011E+14	533111	289.366.000	Pembayaran Termin II Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas	289.366.000		289.366.000
18	14/10/2019	1,90011E+14	533111	6.000.000	Paket Meeting Halfday Dalam Kota untuk Rapat Koordinasi Kegiatan Refleksi Arsip Tsunami sebagai Memory of The World UNESCO di Hotel Hermes			
24.902.910				Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan Kunjungan Kerja dan Mendampingi Plt. Kepala ANRI dalam rangka Peninjauan Penyelesaian Pembangunan	30.902.910		30.902.910	
20	11/11/2019	1,90011E+14	533111	7.999.000	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melakukan Konfirmasi dan Diskusi Terkait Bertanggungjawab Pembangunan	7.999.000		7.999.000
21	05/12/2019	1,90011E+14	533111	13.579.000	Belanja Modal	13.579.000		13.579.000
22	16/12/2019	1,90011E+14	533111	6.352.224	Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK RI	6.352.224		6.352.224
23	16/12/2019	1,90011E+14	533111	4.350.000	Biaya Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	4.350.000		4.350.000
24	16/12/2019	1,90011E+14	533111	9.676.000	Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Tugas dalam Rangka Pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK dan Pembinaan APBN	9.676.000		9.676.000
25	16/12/2019	1,90011E+14	533111	8.786.600	Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan Diskusi Hasil Terkait Hasil Temuan Sementara atas Pertanggungjawaban Depot Arsip	8.786.600		8.786.600
26	16/12/2019	1,90011E+14	533111	9.164.600	Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Cek Fisik Pembangunan Gedung	9.164.600	70.000	9.094.600
27	16/12/2019	1,90013E+13	533111	15.274.800	Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Cek Fisik Pembangunan Gedung	15.274.800		15.274.800
28	17/12/2019	1,90011E+14	533111	25.595.000	Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor	25.595.000		25.595.000
29	18/12/2019	1,90011E+14	533111	289.366.000	Pembayaran Termin III Lunas (100%) atas Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas	289.366.000		289.366.000
30	18/12/2019	1,90011E+14	533111	14.548.119.579	Pembayaran Termin III Lunas (100%) atas Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi	14.548.119.579	352.550.367	14.195.569.212
31	31/12/2019	1,90012E+14	533111	9.030.000	Belanja Modal	9.030.000		9.030.000
Total KDP				50.228.886.552		50.228.886.552	352.620.367	49.876.266.185
Total keseluruhan				85.019.233.161		85.019.233.161	353.166.367	84.666.066.794

F.2.11 Keterangan Tambahan Aset Tak Berwujud

a. Saldo Tidak normal Software Komputer BAST

Nilai tersebut muncul dikarenakan adanya selisih penyusutan amortisasi transaksional (S03) dari NUP 1 sebesar -4.999.500 dan

NUP 2 sebesar 3.121.250 (kedua aset tersebut tidak mendapat amortisasi sejak tahun awal perolehannya). Kemudian dilakukan normalisasi atas aset NUP 1 dan NUP 2 yang berakibat selisih beban amortisasi sebesar 1.878.500 tidak lagi tercatat di dalam SIMAK pada tahun 2019. Agar diperoleh nilai yang baru maka SIMAK memproses reklasifikasi masuk NUP 3 dan NUP 4 dengan jumlah beban penyusutan yang baru. Nilai sebesar beban amortisasi 1.878.500 masih muncul dikarenakan NUP 1 belum dilakukan penghapusan dari aplikasi SIMAK pada tahun 2019.

Tgl Buku	Kode Barang	No. Aset	Uraian	Jenis Transaksi	Uraian Transaksi	Nilai	Satker
23/12/2016	8010101001	1	Software Komputer	S03	Penyusutan/Amortisasi Transaksional	(4,999,500)	Balai Arsip Tsunami Aceh
23/12/2016	8010101001	2	Software Komputer	S03	Penyusutan/Amortisasi Transaksional	3,121,250	Balai Arsip Tsunami Aceh
Selisih beban penyusutan						(1,878,250)	

b. Jurnal Penyesuaian Amortisasi pada BAST

Pada bulan Juli tahun 2019 Satker Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh melakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA sebesar Rp.16.241.500 yang digunakan untuk menyesuaikan nilai rekonsiliasi amortisasi asset tak berwujud yang pada saat itu tidak mendapat amortisasi. Hal ini dilakukan oleh operator SAIBA BAST atas rekomendasi dari KPPN Banda Aceh agar nilai amortisasi antara SIMAK dan SAIBA seimbang. Namun pada akhirnya e-Rekon BMN menganggap hal ini sebagai nilai tidak yang dapat dijelaskan karena tidak terdapat jurnal tersebut pada aplikasi SIMAK BAST. Operator SAIBA sudah mensimulasi untuk menghapus jurnal tersebut namun berakibat data asset tak berwujud menjadi tidak seimbang kembali. Oleh karena itu diputuskan untuk tidak menghapus jurnal tersebut. Sedangkan nilai amortisasi dilakukan dengan metode Normalisasi dan Reklasifikasi Masuk pada aplikasi SIMAK BMN. Jurnal tersebut adalah:

<u>169315</u>	Akumulasi Amortisasi Software	Rp.16.241.500
<u>391121</u>	Ekuitas Transaksi Lainnya	Rp.16.241.500

F.2.12 Rincian Gedung dan Bangunan ANRI Tahun 2019

No.	Nama Gedung dan Bangunan	Alamat	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)
1	Gedung Utama Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,478,646,000.00
2	Gedung Depo Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,125,166,000.00
3	Gedung E	JL. Ampera Raya	Jakarta	11,804,508,000.00
4	Gedung A	JL. Ampera Raya	Jakarta	10,938,073,000.00
5	Gedung B	JL. Ampera Raya	Jakarta	6,512,921,000.00
6	Gedung D	JL. Ampera Raya	Jakarta	5,195,532,000.00
7	Gedung J	JL. Ampera Raya	Jakarta	380,780,000.00
8	Gedung F	JL. Ampera Raya	Jakarta	23,136,716,000.00
9	Gedung G	JL. Ampera Raya	Jakarta	44,949,647,000.00
10	Gedung C	JL. Ampera Raya	Jakarta	47,777,626,000.00
11	Gedung O	JL. Ampera Raya	Jakarta	39,515,175,750.00
12	Gedung I	JL. Ampera Raya	Jakarta	2,070,508,000.00
13	Selasar Penghubung Gd. O dan Gd. F	JL. Ampera Raya	Jakarta	48,360,000.00
14	Selasar Penghubung Pusdiklat ANRI	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	140,244,000.00
15	Gedung Inventaris	JL. Ampera Raya	Jakarta	1,453,711,000.00
16	Gedung P	JL. Ampera Raya	Jakarta	24,597,024,600.00
17	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	256,549,000.00
18	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	249,637,000.00
19	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,314,664,000.00
20	Gedung Buncit KPK	JL.Warung Buncit Raya	Jakarta	24,737,064,000.00
21	Gedung H	JL. Ampera Raya	Jakarta	1,562,853,000.00
22	Gedung Kelas Utama Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	527,113,000.00
23	Gedung Laboratorium Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	433,074,000.00
24	Kantor Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	425,822,000.00
25	Asrama 1 Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	1,295,545,000.00
26	Ground Reservoir Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	103,658,000.00
27	WC Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	45,249,000.00
28	Asrama 2 Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	1,716,036,000.00
29	Wisma Janus Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	516,188,000.00
30	Pos Jaga	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	6,955,000.00
31	Pos Jaga	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	96,398,000.00
32	Hydrant Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	17,108,000.00
33	Gedung Kantor Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	2,772,878,000.00
34	Pos Jaga	JL. Ampera Raya	Jakarta	97,412,000.00
35	Pos Jaga Rumah Negara	JL. Ampera Raya	Jakarta	6,575,000.00
36	Gedung Parkir/pool permanen	JL. Ampera Raya	Jakarta	418,613,000.00
37	Gapura Kanan	JL. Ampera Raya	Jakarta	215,704,000.00
38	Gapura Kiri	JL. Ampera Raya	Jakarta	212,978,000.00
39	Pagar Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	331,924,000
40	Rumah Dinas Kepala ANRI	JL. Ampera Raya	Jakarta	704,919,000.00
41	Rumah Dinas Deputi Pembinaan	JL. Ampera Raya	Jakarta	504,868,000.00
42	Rumah Dinas Deputi Konservasi	JL. Ampera Raya	Jakarta	484,553,500.00
43	Bangunan Genset Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	2,714,000.00
44	Bangunan Pos Jaga Darurat	JL. Gajah Mada	Jakarta	3,202,000.00
45	Gedung Arsip Kepresidenan	Jl. Gajah Mada	Jakarta	36,566,960,873
46	Pagar (koreksi Reval)	Jl. Gajah Mada	Jakarta	758,629,000
47	Gedung Depo Arsip BAST	Jl. Bakoi	Aceh	50,869,613,913
48	Gedung Kantor BAST	Jl.Teuku Umar	Aceh	9,192,984,000
49	Pagar Permanen Aceh	Jl.Teuku Umar	Aceh	1,016,926,000
Total				364,590,005,636

Saldo Gedung dan Bangunan ANRI pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 49 unit atau senilai Rp. 364.590.005.636 (laporan intrakomptable sebesar 47 unit atau senilai Rp. 364.584.089.636 dan laporan ekstrakomptable sebesar 2 unit atau senilai Rp 5.916.000).

i.

LAPORAN KEUANGAN UTAMA

i.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 01/05/20 1:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	12,157,936,000	13,802,999,892	(1,645,063,892)	114	13,475,086,000	11,663,284,224	1,811,801,776	87
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	12,157,936,000	13,802,999,892	(1,645,063,892)	114	13,475,086,000	11,663,284,224	1,811,801,776	87
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	100,299,579,000	100,092,865,098	206,713,902	100	84,287,121,000	84,018,523,695	268,597,305	100
	BELANJA BARANG	112,176,482,000	107,935,972,063	4,240,509,937	96	89,055,692,000	83,934,300,921	5,121,391,079	94
	BELANJA MODAL	105,606,903,000	101,360,796,097	4,246,106,903	96	22,171,202,000	21,904,876,405	266,325,595	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	318,082,964,000	309,389,633,258	8,693,330,742	97	195,514,015,000	189,857,701,021	5,656,313,979	97
C	PEMBIAYAAN				0				0

i.2

NERACA

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 30/04/2020 2:47 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,720,000	0	2,720,000	0.00
Persediaan	1,804,956,408	2,268,275,397	(463,318,989)	(20.43)
JUMLAH ASET LANCAR	1,807,676,408	2,268,275,397	(460,598,989)	(20.31)
ASET TETAP				
Tanah	802,566,806,600	216,312,132,396	586,254,674,204	271.02
Peralatan dan Mesin	221,057,763,568	196,135,354,724	24,922,408,844	12.71
Gedung dan Bangunan	364,584,089,636	232,559,835,154	132,024,254,482	56.77
Jalan, Irigasi dan Jaringan	62,881,974,526	11,741,372,797	51,140,601,729	435.56
Aset Tetap Lainnya	26,865,394,160	15,627,955,878	11,237,438,282	71.91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	28,583,355,350	(28,583,355,350)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(239,264,549,709)	(234,088,461,227)	(5,176,088,482)	2.21
JUMLAH ASET TETAP	1,238,691,478,781	466,871,545,072	771,819,933,709	165.32
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	15,970,656,383	11,520,424,655	4,450,231,728	38.63
Aset Lain-lain	5,719,311,911	7,254,929,769	(1,535,617,858)	(21.17)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(15,704,744,645)	(16,182,419,882)	477,675,237	(2.95)
JUMLAH ASET LAINNYA	5,985,223,649	2,592,934,542	3,392,289,107	130.83
JUMLAH ASET	1,246,484,378,838	471,732,755,011	774,751,623,827	164.24
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	781,858,417	2,458,992,441	(1,677,134,024)	(68.20)
Uang Muka dari KPPN	2,720,000	0	2,720,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	784,578,417	2,458,992,441	(1,674,414,024)	(68.09)
JUMLAH KEWAJIBAN	784,578,417	2,458,992,441	(1,674,414,024)	(68.09)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,245,699,800,421	469,273,762,570	776,426,037,851	165.45
JUMLAH EKUITAS	1,245,699,800,421	469,273,762,570	776,426,037,851	165.45
JUMLAH EKUITAS	1,245,699,800,421	469,273,762,570	776,426,037,851	165.45
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,246,484,378,838	471,732,755,011	774,751,623,827	164.24

i.3

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 01/05/20 1:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,366,513,594	11,385,593,550	1,980,920,044	17.398
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13,366,513,594	11,385,593,550	1,980,920,044	17.398
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	13,366,513,594	11,385,593,550	1,980,920,044	17.398
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	98,235,109,047	85,876,547,475	12,358,561,572	14.391
Beban Persediaan	5,210,490,065	2,989,890,272	2,220,599,793	74.27
Beban Barang dan Jasa	48,446,714,781	40,802,730,838	7,643,983,943	18.734
Beban Pemeliharaan	9,110,528,492	8,260,737,266	849,791,226	10.287
Beban Perjalanan Dinas	42,140,628,136	28,091,128,769	14,049,499,367	50.014
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4,334,256,173	2,629,172,965	1,705,083,208	64.852
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 01/05/20 1:55 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	35,663,831,947	26,774,472,769	8,889,359,178	33.201
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	243,141,558,641	195,424,680,354	47,716,878,287	24.417
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(229,775,045,047)	(184,039,086,804)	(45,735,958,243)	24.851
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(16,369,904)	(18,894,174)	2,524,270	(13.36)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	94,999,999	8,000,000	86,999,999	1,087.5
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	111,369,903	26,894,174	84,475,729	314.104
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	382,768,685	(24,341,024,940)	24,723,793,625	(101.573)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	412,360,234	276,345,764	136,014,470	49.219
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,591,549	24,617,370,704	(24,587,779,155)	(99.88)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	366,398,781	(24,359,919,114)	24,726,317,895	(101.504)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(229,408,646,266)	(208,399,005,918)	(21,009,640,348)	10.081
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(229,408,646,266)	(208,399,005,918)	(21,009,640,348)	10.081

i.4

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 30/04/20 2:47 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	469,273,762,570	444,260,237,964	25,013,524,606	5.63
SURPLUS/DEFISIT-LO	(229,408,646,266)	(208,399,005,918)	(21,009,640,348)	10.081
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	710,248,050,751	30,600,039,727	679,648,011,024	2,221.0 69
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	25,519,398,478	0	25,519,398,478	
SELISIH REVALUASI ASET	724,611,109,018	0	724,611,109,018	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(39,898,698,245)	30,600,039,727	(70,498,737,972)	(230.38 8)
LAIN-LAIN	16,241,500	0	16,241,500	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	295,586,633,366	202,812,490,797	92,774,142,569	45.744
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	776,426,037,851	25,013,524,606	751,412,513,245	3,004.0 25
EKUITAS AKHIR	1,245,699,800,421	469,273,762,570	776,426,037,851	165.453

ii

LAPORAN KEUANGAN TAMBAHAN

**NOTA KESEPAKATAN FINAL REVALUASI BARANG MILIK NEGARA
LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL RI (BA 087) TAHUN 2019
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019 (AUDITED)**

Nomor : NKF Revaluasi-087/68/KN.2/2020

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **29** April 2020, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak terkait Revaluasi BMN secara Online** pada tanggal 27 April untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka terkait Revaluasi BMN yang disajikan dalam **Laporan Keuangan Arsip Nasional RI (BA 087) Tahun 2019** untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2019 (Audited)**.

Berdasarkan pembahasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan maka disepakati bahwa terkait revaluasi Barang Milik Negara pada BA 087. Terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil revaluasi yang akan ditindaklanjuti pada perbaikan atas LKKL Audited 2019 yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, **sehingga Lampiran NKF dan LKKL Audited yang telah disampaikan tersebut perlu diperbaiki**. Perbaikan Lampiran NKF dan LKKL Audited Tahun 2019 (*softcopy dan hardcopy*) akan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan **paling lambat tanggal 7 Mei 2020**.


PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Arsip Nasional RI
(BA 087)



Ali Sugeng
Ali Sugeng

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febriano Singawiria

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Vicky Hermawan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran : 087

Uraian Bagian Anggaran : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2-5+6	10 = 3-7+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	13.802.999.892	-	13.802.999.892	-	-	-	-	13.802.999.892	-	13.802.999.892
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari KND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425. Pendapatan PNBP Lainnya	13.802.999.892	-	13.802.999.892	-	-	-	-	13.802.999.892	-	13.802.999.892
424. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	13.802.999.892	-	13.802.999.892	-	-	-	-	13.802.999.892	-	13.802.999.892

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+6-7	11 = 4+8-9	12 = 10-9
51	Belanja Pegawai	100.096.423.584	3.558.486	100.092.865.098	-	-	-	-	100.096.423.584	3.558.486	100.092.865.098
52	Belanja Barang dan Jasa	108.954.972.845	1.019.000.782	107.935.972.063	-	-	-	-	108.954.972.845	1.019.000.782	107.935.972.063
53	Belanja Modal	101.717.481.664	356.685.567	101.360.796.097	-	-	-	-	101.717.481.664	356.685.567	101.360.796.097
54	Belanja Pembayaran Kewajiban Ut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA	310.768.878.093	1.379.244.835	309.389.633.258	-	-	-	-	310.768.878.093	1.379.244.835	309.389.633.258



KEMENTERIAN/LEMBAGA

Ali Sugeng

KEMENTERIAN KEUANGAN

Denny Febriano Singawirira

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Vicky Hermawan

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : 68/KN.2/2020
Tanggal : 29 April 2020

URAIAN	Unaudited	Koreksi Revaluasi Setelah Penyampaian Laporan Unaudited		Koreksi Audited		Audited	Koreksi terkait Revaluasi untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Tim BPK LKPP		Audited Perbaikan
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		Debet	Kredit	
KEGIATAN OPERASIONAL									
PENDAPATAN OPERASIONAL									
PENDAPATAN PERPAJAKAN									
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK									
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13.366.513.594	-	-	-	-	13.366.513.594	-	-	13.366.513.594
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13.366.513.594	-	-	-	-	13.366.513.594	-	-	13.366.513.594
PENDAPATAN HIBAH									
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN PENYESUAIAN									
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	13.366.513.594	-	-	-	-	13.366.513.594	-	-	13.366.513.594
BEBAN OPERASIONAL									
Beban Pegawai	98.235.109.047	-	-	-	-	98.235.109.047	-	-	98.235.109.047
Beban Persediaan	5.225.112.295	-	14.622.230	-	-	5.210.490.065	-	-	5.210.490.065
Beban Barang dan Jasa	48.301.027.781	145.687.000	-	-	-	48.446.714.781	-	-	48.446.714.781
Beban Pemeliharaan	9.275.861.482	-	165.332.990	-	-	9.110.528.492	-	-	9.110.528.492
Beban Perjalanan Dinas	41.623.293.864	517.334.272	-	-	-	42.140.628.136	-	-	42.140.628.136
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.334.256.173	-	-	-	-	4.334.256.173	-	-	4.334.256.173
Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.917.721.652	-	296.659.371	-	-	35.621.062.281	42.769.666	-	35.663.831.947
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	242.912.382.294	663.021.272	476.614.591	-	-	243.098.788.975	42.769.666	-	243.141.558.641
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(229.545.868.700)	(663.021.272)	(476.614.591)	-	-	(229.732.275.381)	(42.769.666)	-	(229.775.045.047)
KEGIATAN NON OPERASIONAL									
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR									
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	94.999.999	-	-	-	-	94.999.999	-	-	94.999.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	111.369.903	-	-	-	-	111.369.903	-	-	111.369.903
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(16.369.904)	-	-	-	-	(16.369.904)	-	-	(16.369.904)

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG									
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA									
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	412.360.234	-	-	-	-	412.360.234	-	-	412.360.234
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	29.591.549	-	-	-	-	29.591.549	-	-	29.591.549
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	382.768.685	-	-	-	-	382.768.685	-	-	382.768.685
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	366.398.781	-	-	-	-	366.398.781	-	-	366.398.781
POS LUAR BIASA									
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(229.179.469.919)	(663.021.272)	(476.614.591)	-	-	(229.365.876.600)	(42.769.666)	-	(229.408.646.266)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

Ali Sugeng

KEMENTERIAN KEUANGAN

Denny Febriano Singawiria

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Vicky Hemawan

K/L : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BA : 087

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI	UNAUDITED KORREVAL	KOREKSI		AUDITED	Koreksi terkait Revaluasi untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Tim BPK LKPP		AUDITED PERBAIKAN
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
ASET									
ASET LANCAR									
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.720.000	-	2.720.000			2.720.000			2.720.000
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-			-			-
Kas Lainnya dan Setara kas	-	-	-			-			-
Kas pada BLU	-	-	-			-			-
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-			-			-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-	-			-			-
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-	-			-			-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-			-			-
Piutang Perpajakan	-	-	-			-			-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-	-	-			-			-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-			-			-
Piutang Bukan Pajak	-	-	-			-			-
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-	-	-			-			-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-			-			-
Bagian Lancar TPA	-	-	-			-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-	-	-			-			-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-			-			-
Bagian Lancar TP/TGR	-	-	-			-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-	-	-			-			-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	-			-			-
Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-			-			-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-			-			-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-			-			-
Persediaan	1.785.077.478	-	1.785.077.478	19.878.930		1.804.956.408			1.804.956.408
Jumlah Aset Lancar	1.787.797.478	-	1.787.797.478	19.878.930	-	1.807.676.408			1.807.676.408
INVESTASI JANGKA PANJANG									
Investasi Permanen BLU	-	-	-			-			-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-	-	0	0	-	0	0	-
ASET TETAP									
Tanah	802.566.806.600	-	802.566.806.600			802.566.806.600			802.566.806.600
Peralatan dan Mesin	220.897.687.278	-	220.897.687.278	160.076.290		221.057.763.568			221.057.763.568
Gedung dan Bangunan	366.028.381.545	-	366.028.381.545		1.444.291.909	364.584.089.636			364.584.089.636
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.928.914.526	-	62.928.914.526	75.413.000		63.004.327.526	122.353.000		62.881.974.526
Aset Tetap Lainnya	26.865.394.160	-	26.865.394.160			26.865.394.160			26.865.394.160
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-			-			-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(182.702.297.009)	-	(182.702.297.009)		21.133.629	(182.723.430.638)			(182.723.430.638)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(31.294.727.055)	-	(31.294.727.055)	308.114.799		(30.986.612.256)			(30.986.612.256)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(25.530.953.654)	-	(25.530.953.654)	74.280.834		(25.456.672.820)	37.350.895		(25.494.023.715)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(60.483.100)	-	(60.483.100)			(60.483.100)			(60.483.100)
Jumlah Aset Tetap	1.239.698.723.291	-	1.239.698.723.291	617.884.923	1.465.425.538	1.238.851.182.676	0	159.703.895	1.238.691.478.781

PIUTANG JANGKA PANJANG									
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-			-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-	-	-			-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	0	0	-	0	0	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-			-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-	-	-			-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-	0	0	-	0	0	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-			-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka P	-	-	-			-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	0	0	-	0	0	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA									
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-			-			-
Aset Konsepsi Jasa	-	-	-			-			-
Aset Tak Berwujud	15.970.656.383	-	15.970.656.383			15.970.656.383			15.970.656.383
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	-	-	-			-			-
Dana Penjaminan	-	-	-			-			-
Dana Keblaian BLU	-	-	-			-			-
Aset Lain-lain	5.596.958.911	-	5.596.958.911			5.596.958.911	122.353.000		5.719.311.911
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ke3	-	-	-			-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(5.484.705.339)	-	(5.484.705.339)			(5.484.705.339)		69.573.273	(5.554.278.612)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.150.466.033)	-	(10.150.466.033)			(10.150.466.033)			(10.150.466.033)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	-	-	-			-			-
Jumlah Aset Lainnya	5.932.443.922	-	5.932.443.922	-	-	5.932.443.922	122.353.000	69.573.273	5.985.223.649
JUMLAH ASET	1.247.418.964.691	-	1.247.418.964.691	637.763.853	1.465.425.538	1.246.591.303.006	122.353.000	229.277.168	1.246.484.378.838
KEWAJIBAN									
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK									
Utang kepada Pihak Ketiga	781.858.417	-	781.858.417			781.858.417			781.858.417
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-			-			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-			-			-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-			-			-
Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-			-			-
Uang Muka dari KPPN	2.720.000	-	2.720.000			2.720.000	0	0	2.720.000
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-			-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	784.578.417	-	784.578.417	-	-	784.578.417	-	-	784.578.417
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG									
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-			-			-
Kewajiban Konsepsi Jasa	-	-	-			-			-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	-	-			-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	784.578.417	-	784.578.417	-	-	784.578.417	-	-	784.578.417
EKUITAS	1.246.634.386.274	-	1.246.634.386.274	-	(827.661.685)	1.245.806.724.589	-	(106.924.168)	1.245.699.800.421
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.247.418.964.691	-	1.247.418.964.691	-	(827.661.685)	1.246.591.303.006	-	(106.924.168)	1.246.484.378.838

Jakarta, April 2020

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

TIM AUDITOR BPK

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DJPBN SELAKU PENYUSUN LKPP

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DJKN SELAKU PENYUSUN LBMN



Ali Sugeng

Vicky Hermawan

Denny Febriano Singawiria

Bambang Sulistyono

K/L : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BA : 087

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI	UNAUDITED KORREVAL	KOREKSI AUDITED		AUDITED	Koreksi terkait Revaluasi untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Tim BPK LKPP		AUDITED PERBAIKAN
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	469.273.762.570	-	469.273.762.570			469.273.762.570			469.273.762.570
SURPLUS/DEFISIT LO	(229.179.469.919)	-	(229.179.469.919)		(186.406.684)	(229.365.876.600)		(42.769.666)	(229.408.646.266)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS									
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-			-			-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-			-			-
Selisih Revaluasi Aset	710.821.377.735	-	710.821.377.735			710.821.377.735	13.789.731.283		724.611.109.018
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(25.235.175.753)	-	(25.235.175.753)		(809.636.707)	(26.044.812.460)	(13.853.885.785)		(39.898.698.245)
Koreksi Atas Reklasifikasi	25.510.034.728	-	25.510.034.728		9.363.750	25.519.398.478			25.519.398.478
Koreksi Lain-lain	16.241.500	-	16.241.500			16.241.500			16.241.500
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	711.112.478.210	-	711.112.478.210	-	(800.272.957)	710.312.205.253	-	(64.154.502)	710.248.050.751
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	295.427.615.413	-	295.427.615.413	-	159.017.953	295.586.633.366	-	-	295.586.633.366
Ditagikan ke Entitas Lain	309.389.633.258	-	309.389.633.258	-		309.389.633.258			309.389.633.258
Diterima dari Entitas Lain	(13.802.999.892)	-	(13.802.999.892)			(13.802.999.892)			(13.802.999.892)
Transfer Keluar	(162.244.353)	-	(162.244.353)		159.017.953	(3.226.400)			(3.226.400)
Transfer Masuk	3.226.400	-	3.226.400			3.226.400			3.226.400
Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-			-			-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	-	-			-			-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-	-			-			-
Setoran Surplus BLU	-	-	-			-			-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	777.360.623.704	-	777.360.623.704	-	(827.661.685)	776.532.962.019	-	(106.924.168)	776.426.037.851
EKUITAS AKHIR	1.246.634.386.274	-	1.246.634.386.274	-	(827.661.685)	1.245.806.724.589	-	(106.924.168)	1.245.699.800.421

Jakarta, April 2020
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Ali Sugeng

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TIM AUDITOR BPK

Vicky Hermawan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DJPBN SELAKU PENYUSUN LKPP

Denny Febriano Singawiria

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DJKN SELAKU PENYUSUN LBMN

Bambang Sulistyono

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Selisih Penyusutan

No	KD_BA	NUP_2	JNS_TRN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BPK	SALDO_DATA_SI MAK	SELISIH_SALDO_ BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI_BPK	AKM_DATA_SI MAK	SELISIH_AKM_B RUTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI_BPK	BEBAN_DATA_SIM AK	SELISIH_BEBAN BRUTO	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
1	87	087010199450448000KP.4040104001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	331924000	281166000	50758000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.149.050	281.166.000	- 277.016.950	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.954.954	283.583.048	- 263.628.094	9.715.738	Merupakan beban yang dihasilkan di SIMAK dan sesuai dengan uji manual.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
 Daftar Barang Milik Negara Yang Tidak Ditemukan
 Pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali
 Yang Masih Tersaji Pada Neraca dan LBMN

BA	SATKER	UNIK	NILAI_SIP REVAL	SIMAN_LAMA	SIMAN_ BARU	SIMAK_2019	NO_LHIP	TGL_LHIP	TRN_SIM AN	UR_TUJUAN	UR_STS_INV2	NO_TIKET_BR	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
87	4,5E+08	087010199450448000KP.4040104001.2	0	144,344,000	0	144,344,000	LHIP-825/REV/WKN.7/KNL.05/2019	#####	221	REVISI BARANG BERLEBIH	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20190805110555427041	144,344,000	Telah dilakukan koreksi pencatatan.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Saldo Aset

No	KD_BA	NUP_2	JNS_TRN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BPK	SALDO_DATA_SI MAK	SELISIH_SALDO_ BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI_BPK	AKM_DATA_SI MAK	SELISIH_AKM_ BRUTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI_BPK	BEBAN_DATA_SIM AK	SELISIH_BEBAN_ BRUTO	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
1	87	087010199450448000KP.4040104001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	331.924.000	281.166.000	50.758.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.149.050	29.473.118	-25.324.068	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.954.954	9.715.738	10.239.216	50.758.000	Saldo aset sudah sesuai.
2	87	087010199450448000KP.5010109002.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	256.618.000	181.205.000	75.413.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.077.250	213.848.333	-181.771.083	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.216.110	197.526.667	-187.310.557	75.413.000	Saldo aset sudah sesuai.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Beban Penyusutan

Rincian perbedaan hasil perhitungan ulang

No	KD BA	NUP 2	JNS TRN	TRN UR	NM AKUN ASET	SALDO UJI BPK	SALDO_DATA_S MAK	SELISIH_SA LDO_BRUT O	NM AKUN_AKM	AKM_UJI BPK	AKM_DATA_S MAK	SELISIH_AKM_ BRUTO	NM AKUN BEBAN	BEBAN_UJI BPK	BEBAN_DATA_SIM AK	SELISIH_BEBAN BRUTO	Tidak Dilakukan Perubahan/Koreksi	PENJELASAN
1	87	087010199450448000KP.5010109002.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	36.750.682.000	36.750.682.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.803.898.711	8.734.274.743	69.623.968	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.803.898.711	8.734.274.743	69.623.968	69.623.968	Kesalahan penambahan masa manfaat pada saat pengembangan tahun 2017 menyebabkan masa manfaat melebihi maksimal.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Beban Penyusutan

No	KD_BA	NUP_2	JNS_TRN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BPK	SALDO_DATA_SIMAK	SELISIH_SALDO_BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI_BPK	AKM_DATA_SIMAK	SELISIH_AKM_BRUTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI_BPK	BEBAN_DATA_SIMAK	SELISIH_BEBAN_BRUTO	Dilakukan Update/Koreksi Audited 2019	PENJELASAN
1	087	087010199450448000K P.5010109002.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	256.618.000	181.205.000	75.413.000	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	32.077.250	181.205.000	-149.127.750	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	117.616.582	145.940.999	-28.324.417	106.924.168	

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
 Daftar Barang Milik Negara Yang Tidak Ditemukan
 Pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali
 Yang Masih Tersaji Pada Neraca dan LBMN

BA	SATKER	UNIK	NILAI_SIP REVAL	SIMAN_LAMA	SIMAN_BARU	SIMAK_2019	NO_LHIP	TGL_LHIP	TRN_SIM AN	UR_TUJUAN	UR_STS_INV2	NO_TIKET_BR	Dilakukan Update/Koreksi Audited 2019	PENJELASAN
032	4,5E+08	087010199450448000KP.5020502002	0	3,669,000	0	122,353,000	LHIP-813/REV/WKN.7/KNL.05/2019	10/11/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	TIDAK DITEMUKAN LAINNYA	IP-RV-20190618134024465622	122,353,000	Dilakukan reklas ke aset lainnya.

ii.2

LRA BELANJA MENURUT AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 30/04/20 2:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	25,624,598,000	29,705,500,000	29,604,416,740	0	29,604,416,740	99.66	101,083,260
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	704,000	465,000	461,934	43,486	418,448	99.34	46,552
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,838,009,000	1,991,136,000	1,989,621,494	0	1,989,621,494	99.92	1,514,506
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	520,000,000	529,097,000	528,987,428	0	528,987,428	99.98	109,572
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,210,000,000	2,210,860,000	2,210,860,000	0	2,210,860,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,649,808,000	2,851,859,000	2,850,509,000	0	2,850,509,000	99.95	1,350,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	519,999,000	333,400,000	333,353,627	0	333,353,627	99.99	46,373
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,245,334,000	1,359,700,000	1,359,613,080	0	1,359,613,080	99.99	86,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,244,500,000	4,321,149,000	4,248,272,000	0	4,248,272,000	98.31	72,877,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,180,000,000	3,559,324,000	3,533,788,000	0	3,533,788,000	99.28	25,536,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	549,999,000	589,615,000	589,245,000	3,515,000	585,730,000	99.94	3,885,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	42,582,951,000	47,452,105,000	47,249,128,303	3,558,486	47,245,569,817	99.57	206,535,183
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	134,820,000	113,420,000	113,381,000	0	113,381,000	99.97	39,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	134,820,000	113,420,000	113,381,000	0	113,381,000	99.97	39,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	31,062,476,000	52,734,054,000	52,733,914,281	0	52,733,914,281	100	139,719
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	31,062,476,000	52,734,054,000	52,733,914,281	0	52,733,914,281	100	139,719
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	73,780,247,000	100,299,579,000	100,096,423,584	3,558,486	100,092,865,098	99.8	206,713,902
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,698,091,000	9,821,700,000	9,629,596,896	3,979,780	9,625,617,116	98.04	196,082,884
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	862,980,000	856,976,000	742,984,000	0	742,984,000	86.7	113,992,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	131,890,000	143,044,000	126,107,425	0	126,107,425	88.16	16,936,575
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,184,115,000	2,101,425,000	2,049,290,000	2,230,000	2,047,060,000	97.52	54,365,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	720,500,000	746,756,000	520,851,200	0	520,851,200	69.75	225,904,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	13,597,576,000	13,669,901,000	13,068,829,521	6,209,780	13,062,619,741	95.6	607,281,259
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	11,704,154,000	11,362,241,000	11,118,081,826	0	11,118,081,826	97.85	244,159,174
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,547,090,000	7,433,205,000	6,485,205,000	18,920,500	6,466,284,500	87.25	966,920,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,722,177,000	2,118,921,000	1,974,270,911	0	1,974,270,911	93.17	144,650,089
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	584,500,000	603,000,000	603,000,000	0	603,000,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 30/04/20 2:50 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	22,557,921,000	21,517,367,000	20,180,557,737	18,920,500	20,161,637,237	93.79	1,355,729,763
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,595,036,000	4,041,413,000	4,035,387,513	0	4,035,387,513	99.85	6,025,487
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,595,036,000	4,041,413,000	4,035,387,513	0	4,035,387,513	99.85	6,025,487
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	7,642,816,000	7,146,520,000	7,143,397,898	0	7,143,397,898	99.96	3,122,102
522112	Belanja Langganan Telepon	138,000,000	126,000,000	83,629,850	0	83,629,850	66.37	42,370,150
522113	Belanja Langganan Air	87,000,000	87,000,000	84,427,710	0	84,427,710	97.04	2,572,290
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	6,000,000	17,368,000	17,098,000	0	17,098,000	98.45	270,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	159,000,000	158,950,000	0	158,950,000	99.97	50,000
522141	Belanja Sewa	1,994,802,000	1,566,000,000	1,547,560,400	0	1,547,560,400	98.82	18,439,600
522151	Belanja Jasa Profesi	3,961,390,000	3,716,398,000	3,468,355,000	2,582,500	3,465,772,500	93.33	250,625,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,004,544,000	2,351,197,000	2,255,383,018	0	2,255,383,018	95.92	95,813,982
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,834,552,000	15,169,483,000	14,758,801,876	2,582,500	14,756,219,376	97.29	413,263,624
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,505,550,000	5,300,525,000	5,265,085,378	0	5,265,085,378	99.33	35,439,622
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	633,900,000	385,866,000	381,612,700	0	381,612,700	98.9	4,253,300
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	244,500,000	256,500,000	255,841,800	0	255,841,800	99.74	658,200
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,553,535,000	1,462,205,000	1,461,287,704	0	1,461,287,704	99.94	917,296
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	735,240,000	708,640,000	708,600,000	0	708,600,000	99.99	40,000
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,526,200,000	1,514,200,000	1,464,971,100	0	1,464,971,100	96.75	49,228,900
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	206,580,000	465,355,000	449,954,450	0	449,954,450	96.69	15,400,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	10,405,505,000	10,093,291,000	9,987,353,132	0	9,987,353,132	98.95	105,937,868
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	23,847,523,000	22,493,435,000	21,982,826,929	783,275,762	21,199,551,167	97.73	1,293,883,833
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,508,496,000	1,400,972,000	1,362,848,000	3,000,000	1,359,848,000	97.28	41,124,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,903,693,000	5,959,910,000	5,845,588,000	26,915,000	5,818,673,000	98.08	141,237,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,408,464,000	10,199,658,000	10,129,197,000	35,740,000	10,093,457,000	99.31	106,201,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	39,668,176,000	40,053,975,000	39,320,459,929	848,930,762	38,471,529,167	98.17	1,582,445,833
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2,807,115,000	2,256,566,000	2,249,152,682	132,587,440	2,116,565,242	99.67	140,000,758
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,292,443,000	1,039,486,000	1,036,820,455	9,769,800	1,027,050,655	99.74	12,435,345
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	4,099,558,000	3,296,052,000	3,285,973,137	142,357,240	3,143,615,897	99.69	152,436,103
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 30/04/20 2:50 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	1,183,700,000	4,335,000,000	4,317,610,000	0	4,317,610,000	99.6	17,390,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	1,183,700,000	4,335,000,000	4,317,610,000	0	4,317,610,000	99.6	17,390,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	110,942,024,000	112,176,482,000	108,954,972,845	1,019,000,782	107,935,972,063	97.13	4,240,509,937
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,804,914,000	13,227,650,000	12,950,421,023	0	12,950,421,023	97.9	277,228,977
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	9,804,914,000	13,267,650,000	12,990,421,023	0	12,990,421,023	97.91	277,228,977
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98,515,067,000	88,540,589,000	85,228,099,161	356,685,567	84,871,413,594	96.26	3,669,175,406
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	197,314,000	197,314,000	0	197,314,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	98,515,067,000	88,737,903,000	85,425,413,161	356,685,567	85,068,727,594	96.27	3,669,175,406
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	6,281,787,000	3,601,350,000	3,301,647,480	0	3,301,647,480	91.68	299,702,520
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	6,281,787,000	3,601,350,000	3,301,647,480	0	3,301,647,480	91.68	299,702,520
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	114,601,768,000	105,606,903,000	101,717,481,664	356,685,567	101,360,796,097	96.32	4,246,106,903
	JUMLAH BELANJA	299,324,039,000	318,082,964,000	310,768,878,093	1,379,244,835	309,389,633,258	97.7	8,693,330,742

ii.3

LRA PENDAPATAN MENURUT AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 30/04/20 2:51 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	368,050,000	15,615,000	0	15,615,000	4.24
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,999,999	0	94,999,999	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,412,243,000	0	1,412,243,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	0	266,400,000	0	266,400,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	368,050,000	1,789,257,999	0	1,789,257,999	486.15
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,596,446,000	1,868,797,000	0	1,868,797,000	117.06
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	1,596,446,000	1,868,797,000	0	1,868,797,000	117.06
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	10,193,440,000	9,534,055,200	0	9,534,055,200	93.53
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	10,193,440,000	9,534,055,200	0	9,534,055,200	93.53
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	269,307,604	0	269,307,604	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	269,307,604	0	269,307,604	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	140,255,542	0	140,255,542	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	200,619,057	0	200,619,057	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	611,700	0	611,700	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	95,790	0	95,790	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	341,582,089	0	341,582,089	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	12,157,936,000	13,802,999,892	0	13,802,999,892	113.53
	JUMLAH PENDAPATAN	12,157,936,000	13,802,999,892	0	13,802,999,892	113.53

ii.4

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 PER DESEMBER 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:47 AM
 lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	8,693,330,742	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,645,063,892	0
2.0	425119	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	368,050,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan Yang	1,596,446,000	0
2.0	425692	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi Yang	10,193,440,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	29,705,500,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	465,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,991,136,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	529,097,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,210,860,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	2,851,859,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	333,400,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,359,700,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,321,149,000
2.0	511134	Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	3,559,324,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	589,615,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	113,420,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	52,734,054,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	9,821,700,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	856,976,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	143,044,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,101,425,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	746,756,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	11,362,241,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	7,433,205,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,118,921,000
2.0	521231	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk	0	603,000,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	4,041,413,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	7,146,520,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	126,000,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	87,000,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	17,368,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	159,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	1,566,000,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	3,716,398,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	2,351,197,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	5,300,525,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	0	385,866,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	256,500,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,462,205,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	0	708,640,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1,514,200,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:47 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	465,355,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	22,493,435,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,400,972,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	5,959,910,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	10,199,658,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	2,256,566,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	1,039,486,000
2.0	526112	Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	0	4,335,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	13,227,650,000
2.0	532115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan	0	40,000,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	88,540,589,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	197,314,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	3,601,350,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	15,615,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,999,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,412,243,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	0	266,400,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,868,797,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	9,534,055,200
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	269,307,604
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	140,255,542
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	200,619,057
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	611,700
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	95,790
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	29,604,416,740	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	461,934	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	43,486
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,989,621,494	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	528,987,428	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,210,860,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,850,509,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	333,353,627	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,359,613,080	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,248,272,000	0
3.0	511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,533,788,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	589,245,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,515,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	113,381,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	52,733,914,281	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,629,596,896	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,979,780

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:47 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	742,984,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	126,107,425	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,049,290,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,230,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	520,851,200	0
3.0	521211	Belanja Bahan	11,118,081,826	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,485,205,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	18,920,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,974,270,911	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	603,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,035,387,513	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	7,143,397,898	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	83,629,850	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	84,427,710	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	17,098,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	158,950,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,547,560,400	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,468,355,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,582,500
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,255,383,018	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,265,085,378	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	381,612,700	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	255,841,800	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,461,287,704	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	708,600,000	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,464,971,100	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	449,954,450	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	21,982,826,929	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	783,275,762
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,362,848,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	3,000,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,845,588,000	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	26,915,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,129,197,000	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	35,740,000
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2,249,152,682	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	132,587,440
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,036,820,455	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	9,769,800
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	4,317,610,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,950,421,023	0
3.0	532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	40,000,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:47 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85,228,099,161	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	356,685,567
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	197,314,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	3,301,647,480	0
JUMLAH			333,265,208,727	333,265,208,727

ii.5

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,720,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,250,425,270	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55,137,840	0
0.0	117114	Suku Cadang	0	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	469,091,175	0
0.0	117131	Bahan Baku	676,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	29,626,123	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	802,566,806,600	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	221,057,763,568	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	364,584,089,636	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	52,918,334,000	0
0.0	134112	Irigasi	158,137,000	0
0.0	134113	Jaringan	9,805,503,526	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	26,865,394,160	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	182,723,430,638
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	30,986,612,256
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	20,313,147,363
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	14,492,290
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,166,384,062
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	60,483,100
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	0	0
0.0	162151	Software	15,970,656,383	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5,719,311,911	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	5,554,278,612
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	10,150,466,033
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	7,851,058
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	774,007,359
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,720,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	309,389,633,258
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,802,999,892	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,226,400	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,226,400
0.0	391111	Ekuitas	0	469,273,762,570
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	724,611,109,018
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39,836,299,654	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	62,398,591	0
0.0	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	0	16,241,500
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	25,519,398,478
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	15,615,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,999,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,412,243,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	0	266,400,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,868,797,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	9,534,055,200
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	269,307,604
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	140,255,542
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	200,619,057
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	611,700
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	95,790
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	70,873,935
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	29,604,039,640	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	461,934	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	43,486
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,989,604,784	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	528,987,428	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,210,860,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,850,509,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	333,334,913	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,359,613,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,248,272,000	0
3.0	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,533,788,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	589,245,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	3,515,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	113,381,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	50,876,570,754	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,629,596,896	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	3,979,780
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	742,984,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	126,107,425	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2,049,290,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,230,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	520,851,200	0
3.0	521211	Beban Bahan	11,202,648,826	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	6,534,425,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	18,920,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,974,270,911	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	603,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	7,329,520,148	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	83,409,127	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	79,148,210	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	17,098,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	158,950,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,547,560,400	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,480,255,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	2,582,500
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,255,383,018	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,075,408,088	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	255,841,800	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,461,287,704	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,464,971,100	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	449,954,450	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	22,309,020,001	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	783,275,762
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,421,498,000	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	3,000,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,970,928,000	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	26,915,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,144,497,000	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	35,740,000
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2,249,152,682	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	132,587,440
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,036,820,455	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	9,769,800
3.0	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	6,576,735	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12,850,709,903	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12,919,262,666	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8,133,599,956	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,566,897	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	202,868,912	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,434,861,993	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	112,961,620	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,256,888,560	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	399,355,350	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,710,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	4,327,679,438	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2020 1:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	866,939,050	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	86,662,455	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	22,216,549	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	139,929,400	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	111,369,903	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	7,375,000	0
JUMLAH			1,799,463,677,090	1,799,463,677,090

iii

**BERITA ACARA REKONSILIASI
INTERNAL BMN**

Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahunan Tahun 2019

Nomor: BA-09 /BU/IV/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Arsip Nasional Republik Indonesia, Jl. Ampera Raya No 7, Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dipo Winarto
 NIP : 19790515 199803 1 001
 Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Ali Sugeng
 NIP : 19700830 199803 1 001
 Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Arsip Nasional Republik Indonesia (087) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Keuangan Pengguna (LKP) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahunan Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data :

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	1.178.557.216.377	67.908.200.961	1.246.465.417.338
A	ASET LANCAR	2.268.275.397	(463.318.989)	1.804.956.408
1	Persediaan	2.268.275.397	(463.318.989)	1.804.956.408
B	ASET TETAP	1.173.679.764.938	65.011.713.843	1.238.691.478.781
1	Tanah	852.496.207.600	(49.929.401.000)	802.566.806.600
2	Peralatan dan Mesin	196.135.354.724	24.922.408.844	221.057.763.568
3	Gedung dan Bangunan	268.299.450.050	96.284.639.586	364.584.089.636
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.669.309.526	52.212.665.000	62.881.974.526
5	Aset Tetap Lainnya	15.627.955.878	11.237.438.282	26.865.394.160
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	28.583.355.350	(28.583.355.350)	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(198.131.868.190)	(41.132.681.519)	(239.264.549.709)
C	ASET LAINNYA	2.609.176.042	3.359.806.107	5.968.982.149
1	Aset Tidak Berwujud	11.520.424.655	4.450.231.728	15.970.656.383
2	Aset Lain-lain	7.254.929.769	(1.535.617.858)	5.719.311.911
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(16.166.178.382)	445.192.237	(15.720.986.145)
II	BMN NON NERACA	63.579.519	102.099.975	165.679.494
A	Ekstrakomptabel	63.579.519	102.099.975	165.679.494
1	Ekstrakomptabel	251.671.095	139.929.400	391.600.495
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(188.091.576)	(37.829.425)	(225.921.001)
B	BPYBDS	-	-	-
C	Barang Hilang	-	-	-
D	Barang Rusak Berat	-	-	-
TOTAL (I + II)		1.178.620.795.896	68.010.300.936	1.246.631.096.832

Rincian terlampir

- ii. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP dan LKP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahun 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 April 2020

Kepala Bagian Perlengkapan
dan Rumah Tangga



Dipo Winarto

NIP 19790515 199803 1 001

Kepala Bagian Keuangan



Ali Sugeng

NIP 19700830 199803 1 001

Mengetahui,
Kepala Biro Umum



Sarip Hidayat

NIP 19650403 198603 1 001

iv

**MONITORING TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN**

**MATRIKS LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS LAPORAN PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2019**

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2014 Nomor: 209/HP/XVI/07/2015 tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan Semester II Tahun 2018							
Sistem Pengendalian Intern							
1	Pengelolaan BMN Belum Tertib		2014	BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar: a. Memerintahkan Sekretaris Utama selaku KPB untuk menyempurnakan SOP Pengelolaan BMN di Lingkungan ANRI terkait dengan peminjaman BMN serta mensosialisasikannya;	Penyempurnaan SOP belum dilakukan Semester II Tahun 2019: Belum ada perkembangan tindak lanjut	Belum sesuai dan dalam proses	Semester I Tahun 2019: Sampai dengan saat ini Sub Bagian Pengelola BMN ANRI masih menyempurnakan SOP Pengelolaan BMN khusus peminjaman tertuang dalam SOP nomor 140.A tanggal 31 Desember 2015 dilingkungan ANRI dan telah disosialisasikan
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan							
1	Pengelolaan Aset Hasil Hibah Aset Gedung ANRI Gajah Mada Belum Memadai		2014	BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar: b. Mendaftarkan aset-aset hibah tersebut sebagai aset bersejarah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Masih dalam proses penilaian Semester II Tahun 2018: Belum ada perkembangan tindak lanjut	Belum sesuai dan dalam proses	b Semester I Tahun 2019 : Sampai dengan saat ini Sub Bagian Pengelola Barang telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta namun penyelesaian tersebut diusulkan untuk diserahkan kembali pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan Dinas tersebut tidak mempunyai tenaga ahli untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah dalam bentuk BMN bergerak.

**MATRIKS LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS LAPORAN PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2019**

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2017 Nomor: 36C/LHP/XVI/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2018							
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan							
1	Kesalahan pembebanan belanja perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp28.345.000,00 pemborosan perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp33.040.000,00 dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52.716.108,00		2017	BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar: a. Memerintahkan Sekretaris Utama untuk membuat sistem yang dapat memantau batas waktu pertanggungjawaban perjalanan dinas.	Semester II Tahun 2018: Belum sesuai karena belum dapat ditunjukkan bukti telah ada sistem yang dapat memantau batas waktu pertanggungjawaban perjalanan dinas.		Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan Sekretaris Utama melalui memorandum Kepala ANRI Nomor PW.06.02/05/2018 tanggal 28 Juni 2015 untuk membuat sistem yang dapat memantau batas waktu pertanggungjawaban perjalanan dinas.
4	Pekerjaan pembangunan E-Depot terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp64.198.400,00		2017	b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP pada Deputi Bidang Konserasi Arsip yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak segera menyetorkan sisa/kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ke kas negara. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.	Semester I Tahun 2018: Belum sesuai karena belum disebutkan dan ditunjukkan bukti sanksi Semester II Tahun 2018: Belum sesuai karena belum disebutkan dan ditunjukkan bukti sanksi		Semester I Tahun 2019: BPK akan melakukan penilaian kembali terhadap status rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan ANRI sebelumnya. Semester I Tahun 2019: BPK akan melakukan penilaian kembali terhadap status rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan ANRI sebelumnya.

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
				b. Memberikan teguran tertulis kepada rekanan pelaksana dan konsultan pengawas yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, serta memerintahkan rekanan pelaksana untuk melengkapi kekurangan pekerjaan.	Semester II Tahun 2018: Belum sesuai karena belum ada teguran tertulis ke konsultan pengawas dan bukti penyelesaian pekerjaan		Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memberikan teguran tertulis kepada rekanan konsultan pengawas yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, surat Kepala ANRI nomor PW.06.02/3227/2018 tanggal 29 November 2018. Dan PT. Telkom Indonesia telah menindaklanjuti dengan memenuhi pemasangan item-item perangkat sesuai dengan surat Senior Accountant Manager PT. Telkom Indonesia nomor TEL.227/YN000/DGS-10701000/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal penjelasan temuan auditor BPK untuk pekerjaan e-Depot TA 2017
				c. Memerintahkan PPK bersama Inspektorat untuk memantau penyelesaian kekurangan pekerjaan dan melaporkan hasil pemantauan kepada BPK.	Semester II Tahun 2018: Belum sesuai karena belum ada laporan penyelesaian kekurangan pekerjaan yang disampaikan oleh PPK dan Inspektorat kepada BPK		Semester I Tahun 2019: Inspektorat telah memantau kekurangan penyelesaian pekerjaan pada e-depot ANRI bersama dengan unit kerja terkait dan PT. Telkom. BA Penyelesaian kekurangan pekerjaan

**MATRIKS LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS LAPORAN PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2019**

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2018 Nomor: 85B/HP/XVI/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2019							
Sistem Pengendalian Intern							
1	Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Tertib		2018	<p>BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan :</p> <p>a. KPA untuk membuat perjanjian sewa atau perikatan yang diperlukan dalam pemanfaatan BMN sesuai dengan tarif yang berlaku.</p> <p>b. Sekretaris Utama untuk memutakhirkan dan menertibkan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan ANRI.</p>	Semester I Tahun 2019:		<p>Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan KPA melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/14/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk memutakhirkan dan menertibkan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan ANRI.</p> <p>Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan Sekretaris Utama melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/14/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk memutakhirkan dan menertibkan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan ANRI.</p>
Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2018 Nomor: 85C/HP/XVI/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2019							
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan							
1	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Warung Buncit berupa Paket Penggantian Kaca sebesar Rp65.539.239,00		2018	BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar memerintahkan PPK dan PPHP lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.	Semester I Tahun 2019:		Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan PPK pada Sekretariat Utama dan PPHP melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/10/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Penetapan dan Pembayaran honorarium tim dan honorarium Operasional Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala ANRI Tahun 2018 tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp22.650.000.00		2018	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar memerintahkan:</p> <p>a. PPK berpedoman pada ketentuan pelaksanaan APBN dalam menyetujui pembayaran honor tim pelaksana kegiatan.</p> <p>b. Petugas verifikasi keuangan lebih cermat melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran honor tim pelaksana kegiatan sesuai Standar Biaya Masukan.</p> <p>c. Merevisi SK Kepala ANRI tentang Pemberian Honor Operasional Satuan Kerja untuk Satuan Akuntansi Instansi Satker ANRI dan Pusat Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Keuangan</p>	<p>Semester I Tahun 2019:</p> <p>Semester I Tahun 2019:</p> <p>Semester I Tahun 2019:</p>		<p>Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan PPK melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/11/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk berpedoman pada ketentuan pelaksanaan APBN dalam menyetujui pembayaran honor tim pelaksana kegiatan.</p> <p>Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan Petugas verifikasi Keuangan melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/11/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk lebih cermat melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran honor tim pelaksana kegiatan sesuai Standar Biaya Masukan</p> <p>Semester I Tahun 2019: ANRI telah merevisi SK Kepala ANRI tentang Pemberian Honor Operasional Satuan Kerja untuk Satuan Akuntansi Instansi Satker ANRI melalui nomor dan Pusat Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola SAI Satker Pusat Jasa Kearsipan dan Keputusan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola SAI Satker ANRI Jakarta</p>

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
3	Pertanggungjawaban dan Pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp12.665.521,00		2018	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar memerintahkan:</p> <p>a. PPK pada Sekretariat Utama untuk meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan pembayaran perjalanan dinas.</p> <p>b. Petugas verifikasi perjalanan dinas luar negeri pada Satker ANRI Jakarta lebih cermat dalam melaksanakan belanja perjalanan dinas luar negeri.</p> <p>c. PPK Bersama Inspektorat untuk segera menagih kekurangan pembayaran sebesar Rp4.983.890,00 dan menyetorkannya ke kas negara. Bukti setor disampaikan kepada BPK</p>	<p>Semester I Tahun 2019:</p> <p>Semester I Tahun 2019:</p> <p>Semester I Tahun 2019:</p>		<p>Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan PPK pada Sekretariat Utama melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/13/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan pembayaran perjalanan dinas.</p> <p>Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan Petugas Verifikasi perjalanan dinas luar negeri melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/13/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk lebih cermat dalam belanja perjalanan dinas luar negeri.</p> <p>Semester I Tahun 2019: PPK telah menagih kekurangan pembayaran sebesar Rp4.983.890,00 dan menyetorkannya ke kas negara dengan NTPN A21B6NP192NL700 dan 21DA82PM45LK4400 tanggal 13 Mei 2019</p>

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
4	Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Arsip Kepresidenan di Gajah Mada sebesar Rp200.619.057		2018	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI agar memerintahkan:</p> <p>a. Memerintahkan PPK dan PPHP lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.</p> <p>b. Memerintahkan PPK Bersama Inspektorat untuk segera menagih kelebihan pembayaran kepada pelaksanaan kegiatan sebesar Rp200.619.057 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Bukti Setor disampaikan kepada BPK.</p>	<p>Semester I Tahun 2019:</p>		<p>Semester I Tahun 2019: Kepala ANRI telah memerintahkan PPK dan PPHP melalui memorandum kepala Nomor: PW.06.02/12/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.</p> <p>Semester I Tahun 2019: PPK telah menagih kekurangan pembayaran sebesar Rp200.619.057,00 dan menyetorkannya ke kas negara dengan NTPN B1D0D8DOB17E0URO dan tanggal 3 Mei 2019</p>

V

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERIODE TAHUN 2019 AUDITED**

Kode BA dan Nama K/L: (087) Arsip Nasional RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP	✓		Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	✓		Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akruwal	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2018 ?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
PENGUNAAN APLIKASI			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?	✓		Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	✓		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Akun Non Ref"		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		✓	Tidak

TELAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN</i>)		√	Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister" ? <i>Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"</i>		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
Akun dengan "frasa BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Persediaan, Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi, dan Beban terkait Aset dengan frasa BLU?		√	Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2018 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>			
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211 (<i>hibah langsung yang belum disahkan</i>) pada awal tahun ? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?		√	Ya/Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?		√	Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL. Cek apakah ada pengurangan dengan Jurnal, teliti kebenaran/keabsahan jurnal tsb.)</i>			
4. Jika ada akun 111827 (<i>Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan</i>), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?		√	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (<i>Penyesuaian Nilai Persediaan</i>)		√	Tidak
2. Adakah akun 391121 (<i>Ekuitas Transaksi Lainnya</i>) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114 (<i>Revaluasi Aset Tetap</i>)		√	Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211			
1. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut	Rp. 0,-		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp0,00		

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)			
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksanaan terdapat pada Kementerian Kesehatan)		√	Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAH TERKAIT BLU			
	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
Jika ada, berarti ada pendapatan & Belanja BLU yang belum di SP3B-BLU-kan, adakah penjelasannya ?			
2. Apakah telah melakukan identifikasi transaksi belanja/pendapatan dengan Satker Pemerintah Pusat lainnya (Untuk eliminasi BLU) ?		√	Ya
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			Rp70.873.935,00
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			Rp22.216.549,00
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			Rp48.657.386,00
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	√		Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			

LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			√	Tidak
3. Adakah beban bunga			√	Tidak
4. Adakah beban subsidi			√	Tidak
5. Adakah beban hibah			√	Tidak
6. Adakah beban transfer			√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain			√	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang		√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO		√		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			√	Tidak
2. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			√	Tidak
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?		√		Ya
NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)		√		Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?			√	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahunan 2019 dengan Audited 2018, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2018, Apakah demikian?		√		Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>				
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?		√		Ya

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	-	√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	-	-	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	-	-	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	-	√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	-	-	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?	√		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?	√		Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	-	-	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?	√		Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2019 di e-Rekon&LK?	√		Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	√		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-ik menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			

1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo	-	✓	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?	-	✓	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS	-	✓	
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo	-	✓	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo	-	✓	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo	-	✓	Tidak

e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2018 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	✓		Ya
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-Out Reval dengan benar ?	✓		Ya

Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2019

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	✓		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	✓		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan	✓		Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	✓		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		✓	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	-	-	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	✓		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	✓		Sama

Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.

Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	✓		
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	-	-	
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	✓		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?		✓	Ada

Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.

7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	-	-	Ya
---	---	---	----

8.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"</i>				
KESESUAIAN DENGAN L-BMN				
Penjelasan Perbedaan Rekon Internal LKKL dengan L-BMN				
1.	Adanya selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon & LK dikarenakan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 pada Satker Konsolidasi Arsip Nasional RI			
2.	Adanya selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan di e-Rekon & LK dikarenakan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 pada Satker Konsolidasi Arsip Nasional RI			
3.	Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada e-rekon&LK dikarenakan Koreksi Pencatatan Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan dan Belanja Bahan menjadi Aset/Persediaan pada Satker ANRI Jakarta			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)				
1.	Terdapat kesalahan akun Belanja Persediaan pada Satker ANRI Jakarta yaitu Pembebanan yang seharusnya Belanja Persediaan tetapi dipertanggungjawabkan sebagai Belanja Bahan Sebesar Rp7.500.000,00			

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



(Ali Sugeng)

NIP.197008301998031001

Jakarta, 28 April 2020

Penelaah,



(Budi Riyanto)

NIP.198406222009121005



2019



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA